

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat



ULAMA DALAM LINGKARAN KEKUASAAN

Politisasi Islam

Krisis Ekonomi
Turki



KH. Hafidz Abdurrahman:
Ulama Haram
Mendukung Rejim Zalim

AGENDA UMAT



Mojokerto. Kamis [9/8], KH Heru Elyasa memenuhi panggilan Polres Mojokerto. KH Elyasa yang juga Pengurus Forum Komunikasi Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah (FKU Aswaja) Jawa Timur ini, datang ke Polres Mojokerto didampingi sejumlah ulama Aswaja serta pengacaranya dari LBH Pelita Ummat Jatim, Muhammad Nur Rahmad, SH dan Harinoko, SH dari LBH Pelita Ummat Mojokerto. Kedatangan Kyai Elyasa ke Polres ini untuk dimintai keterangan atas pelaporan dirinya oleh salah satu ormas, terkait dugaan ujaran kebencian.



Mojokerto. Rabu [8/8] Pengurus Forum Komunikasi Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah (FKU Aswaja) Jawa Timur mendatangi Kantor Polsek Puri, Mojokerto. Kedatangan para ulama ini diterima bagian Humas Polsek Puri. Para Pengurus FKU Aswaja hadir ke Polsek Puri Mojokerto dalam rangka beraudiensi dengan aparat atas kasus persekusi yang dialami Pengurus FKU Aswaja Mojokerto, Kiai Abdurrahman, Pengasuh Ponpes Al-Anwar Puri, Mojokerto. Para ulama ini hadir dengan didampingi pengacara mereka, Ustad Jalal Harinoko dari LBH Pelita Umat.



Ngawi. Rombongan delegasi ulama dan kiai dari Ngawi, melalui perjalanan berat dan panjang, menghadiri undangan Jalsah Ammah Kiai dan Ulama Kabupaten Mojokerto, Ahad [5/8]. Rombongan delegasi berangkat dengan dua mobil. Di antara yang ikut adalah Ustad Ahmad, Gus Hawi, Pak Sunarto bersama Romo Kyai Misno, Pengasuh Pengajian Kitab Fiqih Syafiiyyah, Teguhan Paron.



Pasuruan. Ulama, kiai dan muhibbin dari Pasuruan juga hadir memenuhi undangan Jalsah Ammah Ulama dan Kiai Kabupaten Mojokerto untuk bersatu padu menghadapi persekusi terhadap ajaran Islam dan ulama.



Kediri. Dinginnya suasana pagi, Ahad [5/8] tak menyurutkan niat rombongan kiai, ulama dan muhibbin dari Kediri untuk berangkat menuju Mojokerto. Kehadiran mereka dalam rangka memberikan dukungan kepada ulama dan kiai di Mojokerto yang mengalami ujian kecil dalam dakwah.

Ulama Haram Mendukung Rejim Zalim

Berbeda dengan ulama generasi *salafus-shalih* dulu, yang begitu menjaga jarak dengan kekuasaan, hari ini banyak ulama yang seolah berlomba dekat dengan penguasa. Bahkan ada yang berhasrat ingin menjadi bagian dari kekuasaan. Tak peduli penguasa itu zalim. Padahal jelas, penguasa zalim haram didukung. Apalagi oleh ulama.

Politisasi Islam

Akhir-akhir ini, pada tahun politik, tampak jelas agama kembali jadi barang dagangan. Agama kembali dipolitisasi. Agama dijadikan alat untuk meraih kekuasaan politik. Padahal sebelumnya, petinggi negeri ini tegas menyatakan: agama harus dipisahkan dari politik. Hal yang kontradiksi ini begitu nyata di alam demokrasi.

Krisis Ekonomi Turki

Turki di bawah Erdogan, yang oleh sebagian kalangan dibangga-banggakan, terutama secara ekonomi, kini terbukti rapuh. Turki kini dilanda krisis ekonomi. Salah satu penyebabnya karena ekonomi Turki bertumpu pada utang luar negeri ribawi. Bahkan utang luar negeri adalah 'harga yang harus dibayar' dari naiknya Erdogan ke tampuk kekuasaan selama ini.

<i>Pengantar</i>	2	<i>Hiwar</i> : KH. Hafidz Abdurrahman: Ulama Haram Mendukung Rejim Zalim	39
<i>Dari Redaksi</i> : Khutbah Politik Nabi SAW. Saat Haji Wada'	3	<i>Soal Jawab</i> : Adakah Kriminalisasi Ulama Di Era Khilafah?	44
<i>Opini</i>	5	<i>Iqtishadiyah</i> : Freeport Dan Kuatnya Penjajahan Ekonomi Di Indonesia	48
<i>Muhasabah</i> : Standar Ganda	7	<i>Telaah Kitab</i> : Kapan Pendapat Majelis Umat Mengikat Khalifah?	52
<i>Fokus</i> : Ulama Dalam Lingkaran Kekuasaan	9	<i>Tafsir</i> : Balasan Bagi Kaum Yang Bertakwa	55
<i>Analisis</i> : Peran Penting Ulama Mengawal Kekuasaan	14	<i>Ibrah</i> : Berkah Di Balik Musibah	60
<i>Siyasah Dakwah</i> : Teladan Ulama Menghadapi Penguasa	19	<i>Hadis Pilihan</i> : Fitnah Mengintai Siapa Saja Yang Mendatangi Pintu Penguasa	62
<i>Afkar</i> : Ulama Dalam Jebakan Fitnah Dunia	23	<i>Takrifat</i> : Hadis Yang Ditolak	64
<i>Catatan Dakwah</i> : Politisasi Islam	27	<i>Dunia Islam</i> : Krisis Ekonomi Turki: Utang Luar Negeri adalah Harga dari Berkuasanya Erdogan	67
<i>Nisa</i> : Jadilah Penyelamat Umat	30	<i>Tarikh</i> : Khilafah Membangun Infrastruktur	70
<i>Fikih</i> : Dalil Thariqah Menegakkan Khilafah	33		
<i>Lintas Dunia</i>	36		

Pengantar

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, ulama kembali diuji. Bukan oleh musibah atau bencana. Namun, oleh fitnah dunia. Fitnah kekuasaan dan jabatan.

Hari-hari ini bangsa ini kembali diramaikan oleh perebutan kekuasaan setiap lima tahunan. Pilpres. Ajang lima tahunan ini kembali membelah umat. Termasuk ulamanya. Ada ulama yang konsisten menjaga jarak dengan penguasa. Mereka tetap kritis terhadap kekuasaan. Mereka tetap konsisten melakukan amar makruf nahi mungkar terhadap rezim zalim. Sebaliknya, tak sedikit ulama yang berusaha dekat penguasa. Bahkan terus menempel pada kekuasaan. Setali tiga uang. Penguasa pun berusaha meraih simpati ulama. Berusaha mengganggandeng tangan ulama. Tentu semata-mata demi mempertahankan kekuasaan. Penguasa berharap, kedekatan dengan ulama bisa menjadi alat untuk meraih simpati umat sekaligus menjadi legitimasi atas kekuasaannya yang jauh dari Islam. Penguasa tentu sadar, selama ini mereka anti Islam dan cenderung memushi para ulama. Saat-saat seperti ini, tentu mereka ingin menghapus kesan itu dari benak umat. Mereka ingin—saat makin dekat dengan Pilpres—umat melihat bahwa mereka mulai dekat dengan ulama. Celakanya, banyak ulama yang tidak sadar bahwa mereka hanya dimanfaatkan oleh penguasa demi melanggengkan kekuasaan mereka yang korup. Banyak ulama malah rela bahkan terkesan bangga menjadi stempel penguasa zalim saat ini.

Sikap ulama seperti saat ini tentu sangat jauh dengan sikap ulama dulu. Ulama *salafush shalih* dulu sangat ketat menjaga jarak dengan kekuasaan. Mereka cenderung tak mau dekat-dekat dengan penguasa. Khawatir terkena fitnahnya. Boro-boro berlomba-lomba mendatangi pintu penguasa. Diundang datang ke istana penguasa pun mereka enggan. Tentu bukan karena kekuasaan itu haram dan harus dijauhi. Namun, mereka khawatir jika kedekatan mereka dengan kekuasaan menjadikan mereka terkena fitnah dunia. Fitnah jabatan dan kekuasaan. Mereka khawatir tak lagi bisa bersikap kritis terhadap penguasa. Mereka khawatir lidah mereka kelu menghadapi kezaliman penguasa. Mereka khawatir tak lagi bisa melakukan amar makruf nahi mungkar terhadap penguasa.

Itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi
Politik Dan Dakwah
Islam **Alamat :** Jl.
Pancoran Barat I, No.
12B, Pancoran,
Jakarta Selatan. e-
mail: redaksialwaie
@gmail.com
Pemimpin Umum: M.
Anwari. **Pemimpin**
Perusahaan dan
Keuangan: M. Anwari
Pemimpin Redaksi:
Ibnu Faruq. **Redaktur**
Pelaksana: M. Arief
Billah. **Redaktur:** Abu
Umam, Yahya
Abdurrahman.
Layout: reeun.
Pemasaran: Tedi
Harga: Rp. 7.500,- (P.
Jawa) dan Rp.
10.000,- (Luar P.
Jawa).



KHUTBAH POLITIK NABI SAW. SAAT HAJI WADA'

Umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah menyelesaikan ibadah haji. Ibadah haji memiliki banyak keutamaan. Salah satunya, sebagaimana sabda Rasulullah saw., *Haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga.*” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Meskipun termasuk ibadah, aspek politik dari ibadah haji tidak dipisahkan. Di antaranya adalah tentang pentingnya persatuan umat Islam di seluruh dunia. Ibadah haji telah memberikan gambaran persatuan ini. Umat Islam dari seluruh penjuru dunia didorong oleh keimanan dan ketaatan kepada Allah hadir untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Berbagai bangsa, ras, suku dan warna kulit bersatu diikat oleh ikatan akidah Islam.

Persatuan umat Islam ini juga menjadi salah satu yang dinasihatkan dalam khutbah politik Rasulullah saw. saat Haji Wada'. Di Bukit Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, saat wukuf, Rasulullah saw. mengingatkan umatnya bahwa sesama Muslim adalah bersaudara yang diikat oleh akidah Islam: “Wahai sekalian manusia. Dengarkan kata-

kataku ini dan perhatikan! Setiap Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Kaum Muslim semua bersaudara. Seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya, kecuali jika dengan senang hati diberikan kepada dia. Janganlah kalian menganiaya diri sendiri.”

Dalam khutbahnya Rasulullah saw. juga mengapuskan sekat-sekat yang didasarkan pada keturunan, ras, Arab atau bukan Arab. Beliau mengingatkan, “*Hai manusia, sesungguhnya Rabb kalian itu satu. Bapak kalian juga satu. Kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak ada kelebihan orang Arab dari orang ajam, selain karena ketakwaan.*”

Khutbah ini menegaskan kembali bahwa umat Islam merupakan umat yang satu. Persatuan yang didasarkan pada akidah Islam inilah yang memperkuat umat Islam. Dengan prinsip ini, Islam menyatukan umat manusia.

Persatuan ini tentu membutuhkan payung politik yang disebut negara yang akan mengintegrasikan manusia di dalamnya dengan aturan yang sama, tujuan yang satu. Dalam



Islam negara ini disebut Khilafah.

Khilafah mengintegrasikan kaum Muslim dan manusia dari berbagai latar belakang. Secara historis, kekuasaan Khilafah Islam menyebar mulai dari Jazirah Arab, Persia, India, Kaukasus hingga mencapai perbatasan Cina dan Rusia. Khilafah membebaskan Syam bagian Utara, Mesir, Afrika Utara, Spanyol, Anatolia, Balkan, Eropa Selatan dan Timur, hingga di gerbang Wina Austria. Khilafah Islam pun mengintegrasikan kawasan beragama Kristen (Byzantium, Ethiopia, Koptik Mesir, Syam dan Bashrah); Majusi-Zoroaster (Persia, Bahrain, Oman, Yamamah, Yaman), Konfusius (Cina) dan Hindu (India). Khilafah Islam juga mengintegrasikan manusia dari berbagai ras, suka dan warna kulit: semit (Arab, Syriani, Kaldean), Hametik (Mesir, Nubia, Berber dan Sudan); Aria (Persia, Yunani, Spanyol dan India), Tourani (Turki dan Tartar).

Persatuan Dunia Islam di bawah naungan Khilafah inilah yang telah membuat umat Islam disegani oleh kawan dan ditakuti oleh musuh. Tidak ada yang membantah kalau umat Islam bersatu, pasti umat Islam kuat. Karena itu berbagai cara Barat lakukan untuk menghancurkan persatuan umat Islam. Puncaknya adalah saat Barat menghancurkan Khilafah Islam yang selama ini secara politik menaungi persatuan Dunia Islam. Negeri-negeri Islam kemudian dipecah-pecah menjadi negara-negara bangsa yang kecil, lemah dan tak berdaya.

Tidak aneh kalau Barat sangat khawatir di tengah-tengah umat kembali berdiri Khilafah Islam *'ala minhâj an-nubuwwah*. Pasalnya, jika Khilafah kembali tegak, itu artinya mereka akan berhadapan dengan negara adidaya yang menyatukan umat Islam. Khilafah akan memobilisasi tentara-tentara kaum Muslim untuk membebaskan negeri Islam yang ditindas. Rakyat yang siap syahid fi sabilillah akan berperang dibawah komando Khalifah untuk membela negeri-negeri Islam yang dijajah. Mereka akan berhadapan dengan negara Khilafah,

yang akan menjaga kekayaan alam negeri-negeri Islam, dari negara-negara imperialis yang rakus.

Pesan politik penting lainnya dalam Haji Wada' ini adalah saat Rasulullah saw. mengingatkan kaum Muslim untuk berpegang teguh pada al-Quran dan as-Sunnah. "*Wahai manusia, dengarlah dengan sungguh-sungguh dan pahamiilah kata-kataku yang telah kusampaikan kepada kalian. Sesungguhnya telah aku tinggalkan dua hal kepada kalian, yakni al-Quran dan Sunnahku. Sekiranya kalian berpegang teguh dan mengikuti keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya.*"

Berpegang teguh pada al-Quran dan as-Sunna, artinya umat Islam wajib diatur berdasarkan syariah Islam, bukan dengan yang lain. Islam ini sesungguhnya sudah sempurna, tidak membutuhkan ajaran-ajaran yang lain. Kita tidak butuh sistem demokrasi untuk mengurus politik kita. Kita tidak butuh sistem liberal untuk mengatur ekonomi kita. Ajaran Islam yang sempurna bisa mengatur urusan-urusan manusia dalam segala aspek; politik, ekonomi, kenegaraan, dll.

Bersamaan dengan Haji Wada' ini, Allah SWT menurunkan ayat al-Quran yang menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Kucukupkan bagi kalian nikmat-Ku dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agama kalian* (QS al-Maidah [5]: 3)."

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini: Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada umat ini. Pasalnya, Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Mereka tidak memerlukan lagi agama yang lain.

Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir, berdasarkan ayat ini berarti yang berhak mengatur umat Islam adalah syariah Islam, bukan yang lain.

Allahu Akbar! [Farid Wajdi]

Opini

Pembaca

TOLAK FREEPORT!

**Lukman Noerochim,
PhD**
(Forum Kajian Kebijakan
Energi Indonesia)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjelaskan, saat ini Indonesia masih membutuhkan Freeport Indonesia untuk

mengelola tambang di Papua. Beberapa perusahaan besar BUMN di dalam negeri belum pernah memiliki pengalaman untuk mengelola pertambangan besar seperti di Papua.

“Gini, kita lihat ya secara akal sehat. Banyak yang mengatakan kenapa kita nggak ambil dan kita kelola sendiri. Saya sepakat. Saya sepakat sekali tapi sampai hari ini belum ada bukti, kita pernah mengelola tambang sebegitu besar. Jadi kita nggak bisa menjude dengan apa yang belum pernah kita lakukan. Memang kita nggak pernah. Kita lakukan memang secara teori kita bisa secara teori, praktiknya belum pernah ada,” kata Jonan sebagaimana dikutip *Detik.com* (1/8/18).

Eksplorasi emas di Papua oleh Freeport sejatinya menggambarkan penjajahan oleh AS sendiri atas negeri ini. Penulis berpendapat, Indonesia pasti mampu mengelola seluruh kekayaan alam milik umat 100%, termasuk tambang emas di Papua. Adapun pemberian izin pengelolaan tambang kepada Freeport (juga kepada perusahaan lainnya) baik dengan KK atau IUPK jelas menyalahi Islam. Dalam Islam, tambang yang berlimpah haram diserahkan kepada swasta, apalagi asing.

Abyadh bin Hamal ra menuturkan bahwa *ia pernah datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta (tambang) garam. Beliau lalu memberikan tambang itu kepada dirinya. Ketika ia hendak pergi, seseorang di majelis itu berkata, “Apakah Anda (Ya Rasulullah) tahu apa yang Anda berikan? Sungguh Anda telah memberi dia (sesuatu laksana) air yang terus mengalir.” Ia (perawi) berkata, “Lalu Rasul menarik kembali tambang itu dari Abyadh.”* (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi).

Islam menetapkan tambang adalah milik umum (seluruh rakyat). Tambang itu harus dikelola langsung oleh Negara. Seluruh hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. Karena itu pemberian izin kepada swasta untuk menguasai pengelolaan tambang jelas menyalahi Islam. Karena menyalahi Islam, izin ataupun kontrak yang diberikan adalah batal demi hukum dan tidak berlaku. Sebabnya, Nabi saw, bersabda, *“Setiap syarat yang tidak ada di Kitabullah (menyalahi syariah) adalah batil meski 100 syarat.”* (HR Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban).

Jika memang Freeport dan pemegang kontrak pertambangan lainnya sudah terlanjur mengeluarkan biaya, biaya-biaya itu dikembalikan setelah diperhitungkan dengan hasil yang diambil. Hal itu dianalogikan dengan orang yang menanam di tanah orang lain. Nabi saw, bersabda, *“Siapa yang menanam di tanah satu kaum tanpa izin mereka maka dia tidak berhak atas tanaman itu dan untuk dia (dikembalikan) biayanya.”* (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad). □

KETIDAK- BERDAYAAN PENGUSAHA

**Bagas
Kurniawan**
‘Aliwa Institute



agi-lagi publik disuguhi cara yang paling mudah dan membuat mata kepala terbuka lebar. Saling ungkap dan saling tuduh memperbutkan singgasana Istana. Prof. Mahfud MD hadir dalam acara ILC (*Indonesia*

Lawyer Club) sontak memberikan respon dari banyak pemerhati politik, baik yang pro maupun kontra.

Ketika MMD dipastikan maju sebagai Cawapres mendampingi Capres petahana, pencalonannya viral baik di media cetak maupun media sosial. Lalu beberapa hari menjelang pengumuman banyak berita yang tidak henti-hentinya mem-*blow-up* akan terjadinya penentuan pasangan. MMD secara blak-blakan menceritakan kesan dan pesannya saat acara ILC berlangsung terkait dirinya yang akhirnya tidak terpilih sebagai Cawapres. Poin penting yang mesti harus dicatat, sekelas Presiden dalam menentukan siapa yang berhak mendampingi dirinya maju dalam Pilpres, harus pasrah ketika partai koalisi menentukan pilihan. Artinya, ‘*leader power*’ tidak bisa menjamin semua kebijakan agar dapat diwujudkan. Ia harus takluk terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan dalam sebuah keputusan.

Itulah mengapa, politik dalam ranah demokrasi selalu menjadi ajang ‘balap’; siapa yang lebih besar memberikan manfaat, di situlah peristiwa ‘kepentingan’ terjadi. Lalu, jika pemegang kekuasaan itu pun harus ‘manut’ kepada koalisi, apakah rakyat tetap harus ikut?

Telah nyata bahwa kepentingan-kepentingan itu selalu menjadi standar dalam ajang meraih kekuasaan. Tak segan politik kotor dimainkan agar nafsu melanggengkan kekuasaan bisa berjalan dengan aman. Bahkan ada yang tak jijik ketika sebuah pernyataan telah melukai umat, tetapi di kemudian hari menjadi sebuah cara untuk mendapatkan dukungan.

Sebentar lagi musim kampanye tiba. Lobi-lobi politik sangat kasatmata dilihat oleh rakyat, apalagi di media sosial. Tawar-menawar posisi tak terelakkan. Ada yang ingin mempertahankan. Ada pula yang ingin merebut kekuasaan. Di luar itu, ada yang ingin mendapatkan kue kekuasaan. Siapa pun yang terpilih nanti bakal jadi tuntutan. Walhasil, rakyat disuguhi permainan politik praktis berebut kekuasaan.

Rakyat, yang kini hidup dalam puing-puing kesengsaraan, harus menerima kenyataan pahit berbalut jargon menarik. Pasalnya, para elit parpol membutuhkan suara rakyat agar terpilih menjalankan kekuasaan. Nasib rakyat bisa dikatakan hanya ditentukan di balik kotak coblosan. Rakyat diberi janji manis, tetapi realita tidak kunjung berbuah manis. Yang ada justru hidup semakin sadis.

Reruntuhan pedoman Barat, yaitu pondasi demokrasi, hanya menghasilkan para pemimpin negeri bersikap lemah terhadap kebijakan. Lalu rakyat masih banyak bersikap apriori terhadap realita. Untuk itu rakyat negeri ini harus bangun dalam tidur panjang akan kesadaran politik, kesadaran ideologis. Jangan sampai umat terlena atas tarian sistem demokrasi-kapitalisme yang membuat negeri ini terlilit berbagai persoalan multidimensi.

Di alam demokrasi siapapun berhak mencalonkan diri untuk maju urusi negeri. Asalkan ada yang memilih. Pilihan dalam demokrasi, suara terbanyak menjadi hal yang harus diikuti. Firman Allah SWT sering dibaca ketika sudah masuk ke dalam jeruji besi. Akan di baca lagi ketika ada seseorang yang sudah mati. Itulah demokrasi.

Untuk itu, menyandera penguasa harus menuruti keputusan koalisi, sungguh sebuah capaian yang membuat siapapun akan tersandera dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Kekuasaan itu adalah candu, tidak mungkin seseorang akan menyerahkan kursi hanya dengan modal sukarela tanpa sedikit kompromi. ‘*No free for lunch*’ itulah sistem demokrasi, yang mengagungkan kekuasaan, tapi dengan kepentingan mereka pasti bisa dibeli. *Wallâhu a’lam.* □



Muhammad Rahmat Kurnia

STANDAR GANDA

Pada 15 Agustus 2018 masyarakat Indonesia dihentak oleh berita proklamasi kemerdekaan Negara Federasi Papua Barat (NFRPB). Tak tanggung-tanggung. Acaranya digelar di Universitas Cenderawasih Abepura Jayapura, Ibukota Provinsi Papua. Pelaksanaannya sebenarnya sudah berlangsung pada Selasa, 31 Juli 2018. Dalam acara pengenalan kampus pun mahasiswa diwajibkan memakai gelang Papua Merdeka. Lebih dari itu, pada akhir Juni 2018 sebenarnya rencana itu sudah kedengaran. Sebagaimana ditulis oleh *Suara.com*, Jumat (29/6/2018), Panglima Komando Daerah Militer TPBPNB/OPM Divisi I Mamta – Papua Barat, Augustine Kres, menegaskan bakal menggelar upacara Hari Ulang Tahun Bangsa Papua Barat pada hari Minggu pekan ini di markas besarnya. “Kami menyerukan, seluruh pertahanan militer OPM ke-8 Kodap di Tanah Air Papua Barat, khususnya di wilayah perbatasan RI – Papua Nugini dan seluruh lapisan masyarakat, untuk menggelar doa dengan penuh damai berdasarkan UUD 1971,” tegasnya kepada *Suara.com*.

Reaksi pun sangat sepi. Terdengar sekedar sayup-sayup. “Proklamasi Papua Barat adalah persekongkolan makar dan pemberontakan terencana. Untuk itu ia meminta separatis

Papua harus dibabat sampai habis hingga ke akar-akarnya,” ungkap Koordinator Aliansi Mahasiswa Anti Makar Otis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/8).

Suara di bawah riuh. Sebut saja Romi berkomentar, “Papua merdeka! Anda kemana, *Ndoro* Jokowi. Bagaimana mungkin di Forum Ospek Mahasiswa sudah mengenakan atribut Papua Merdeka, lantas Negara diam saja. Media pura-pura tidak tahu. *Sindo News, Metro TV, Detik.com, Kompas.com*???”

Lain lagi reaksi Rani, “Pada kemana *nih* orang-orang yang suka teriak NKRI harga mati. Kok diem-diem aja ...”

Rekasi Pemerintah tak terdengar. Diam. *Eramuslim* menyebut Pemerintah kecolongan. BIN kemana? Bila benar kecolongan, ini menyedihkan. Sebab, ini menunjukkan kinerja yang lemah. Atau boleh jadi tahu, namun dibiarkan. Wah, ini persoalan lagi, sebab dapat dipahami sebagai membiarkan deklarasi itu.

Saya jadi teringat pada perkataan Romo Muhammad Syafi’i, anggota DPR RI, beberapa bulan lalu, “Masalah Papua memang berat. Kompleks. Ada unsur luar negeri di sana.”

Ada sikap berbeda yang dilakukan oleh Pemerintah. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat di Universitas Cenderawasih tak dihiraukan, seakan tidak ada. Berbeda dengan

itu, kita masih ingat pada tahun 2016 ada sumpah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa. Di antara sumpahnya itu adalah berjuang melawan penjajahan asing, berjuang dengan perjuangan intelektual dan berjuang untuk membebaskan cengkeraman asing dengan penegakkan Khilafah. Reaksi pun sangat besar. Kita masih ingat, saat itu, para mahasiswa yang dianggap terlibat dipanggil. Muncul istilah kampus radikal. Dosen yang memiliki semangat keislaman kuat dicurigai. Intelektual yang mendukung dan menyuarakan kebebasan akademik di kampus dipersekusi. Organisasi keislaman di beberapa kampus dibubarkan. Pembubaran ormas Islam mencuat. Kampanye Islam radikal menggema di mana-mana. Demikian seterusnya. Reaksi sangat masif dan luar biasa. Ada sikap yang berbeda: tangkas, cepat dan keras saat menghadapi sikap mahasiswa Muslim namun

lambat dan terkesan diam saat mensikapi mahasiswa yang melakukan separatisme. "Itu mah turunan dari sononya. *Double standard!*" ujar Fadhil.

Ya, *double standard* alias standar ganda. Jangan heran. Ujung dari standar ganda ini adalah ketidakadilan. Bagaimana tidak. Tolok ukur yang digunakan berbeda. Hasil dan kesimpulannya pun tentu berbeda.

Secara *syar'i* pemimpin demikian telah diperingatkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah saw. Dia akan menjadi orang yang dibenci oleh Allah, Zat Maha Pengasih dan Penyayang. Beliau bersabda, "*Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada Hari Kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Adapun orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.*" (HR at-Tirmidzi).

Bahkan penguasa yang pura-pura tidak tahu atau berdusta disebut sebagai orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT di Akhirat kelak. Sabda Rasulullah saw., "*Ada tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada Hari Kiamat kelak. Dia tidak sudi memandangi muka mereka. Dia tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. Mereka adalah orang yang sudah tua berzina, penguasa yang suka berdusta dan fakir miskin yang takabur.*" (HR Muslim).

Pada sisi lain, sikap standar ganda yang intinya adalah ketidakadilan akan melahirkan keguncangan. Bahkan perlawanan. Tidak adil berarti tidak *balance*. Tidak setimbang. Secara alami hal ini akan mengundang keguncangan. Jangan heran. Sikap demikian akan mendatangkan ketidakstabilan. Jadi, tidak perlu mencari kambing hitam. Bila terjadi ketidakstabilan, penyebabnya adalah sikap standar ganda penguasa.[]

Ada sikap yang berbeda: tangkas, cepat dan keras saat menghadapi sikap mahasiswa Muslim namun lambat dan terkesan diam saat mensikapi mahasiswa yang melakukan separatisme. "Itu mah turunan dari sononya. *Double standard!*" ujar Fadhil.

ULAMA DALAM LINGKARAN KEKUASAAN

Usman Zahid

Ulama dan penguasa merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas terealisasinya syariah Allah SWT di muka bumi. Namun demikian, dalam perjalanan sejarahnya, kekuasaan tidak selalu menjadi pelaksana Kitabullah. Tidak semua ulama juga menjalankan peranannya. Umat menyaksikan ulama yang diam, bahkan banyak yang menjadi 'stempel' penguasa. Nabi saw. mengisyaratkan:

«أَلَا أُنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ دَائِرَةٌ فَدَوَّرُوا مَعَ الْكِتَابِ
حَيْثُ دَارَ، أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ
فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ»

Ingatlah, sesungguhnya roda Islam akan terus berputar. Karena itu teruslah kalian berputar bersama Kitabullah ke manapun dia berputar. Ingatlah, sesungguhnya Kitabullah dan kekuasaan akan berpisah. Karena itu jangan sekali-kali kalian meninggalkan Kitabullah (HR Abu Nu'aim).¹

Empat Golongan Ulama

Kaum Muslim, dalam rentang sejarahnya

yang amat panjang, yakni sejak berakhirnya Khilafah 'ala Minhaj an-Nubuwwah, hingga hari ini, sembilan puluh empat (94) tahun sejak runtuhnya turki Utsmani, secara global berada di bawah sebuah kekuasaan yang tidak ideal. Bahkan sebagiannya melenceng jauh dari Kitabullah, seperti pada beberapa masa Kekhilafahan Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Apalagi sejak runtuhnya Utsmaniyah. Saat itu pula sejarah mencatat sikap dan posisi para ulama terhadap kekuasaan tersebut terbagi menjadi empat golongan. *Pertama*: Golongan yang gigih melawan kerusakan dan kebatilan. Mereka berupaya mengembalikan kekuasaan pada relnya. *Kedua*: Golongan yang menjauh dari kekuasaan. Mereka menyibukkan diri dengan ilmu dan mendidik umat. *Ketiga*: Golongan yang menjadi bagian kekuasaan namun tetap istiqamah dalam kebenaran. *Keempat*: Golongan yang menjadi stempel penguasa (ulama *sû*).

1. Golongan pertama.

Ada sederatan nama ulama besar dan

Fokus

terkemuka yang terekam oleh sejarah. Abdullah bin Zubair bin al-'Awwam tercatat sebagai pemimpin dari sekelompok sahabat dan *tâbi'in*. Di antaranya Abdurrahman bin Abu Bakar, Ibn Umar dan Husain bin Ali. Setelah diskusi panas di antara mereka, ketika mulai tampak adanya gelagat dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang akan mewariskan kekuasaan kepada anaknya, Yazid bin Mu'awiyah, Abdullah bin Zubair berkata kepada orang-orang pilihan itu, "Baik. Jika kalian berjanji tidak akan menyelisihiku, maka aku yang akan menyelesaikan urusan dengan laki-laki itu (Muawiyah)."

Mereka mengatakan, "Baik, kami setuju."

Kemudian mereka mendatangi Muawiyah, namun berakhir dengan perselisihan. Muawiyah tidak menghiraukan mereka. Bahkan dia menghunus pedangnya di atas leher mereka. Lalu secara paksa mengambil baiat untuk anaknya, Yazid, dalam keadaan dia masih hidup.²

"Rasulullah saw. telah bersabda, Siapa menjadi pengurus dari urusan umatku, lalu dia bersikap lembut kepada mereka, maka balaslah dia—ya Allah—dengan kelembutan. Siapa saja mengurus salah satu urusan umatku, lalu dia membuat mereka sulit/susah, maka susah/sulitkan dia—ya Allah."

Tokoh lainnya adalah Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib ra. Bahkan ia telah dikabarkan oleh Nabi saw. sebagai syahid di medan laga melawan kebatilan penguasa.³ Sejarah mencatat Imam Husain enggan berbaiat kepada Yazid. Bahkan ketika diberi masukan oleh saudaranya, Ibn al-Hanafiyah, beliau berkata, "Andai di dunia ini tidak ada lagi tempat bernaung pun aku tidak akan berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah."⁴

Ketika beliau diancam mati, beliau balik berkata, "Sungguh mati dalam kemuliaan jauh lebih baik daripada hidup dalam kehinaan. Aku lebih suka mati daripada hina."

Ketika pertempuran dengan Yazid dimulai, beliau berkata, "Aku menyerahkan nyawaku dengan sukarela sebagai bentuk kesetiaanku kepada agama kakekku, Muhammad saw."⁵

Dari kalangan *tâbi'in* ada Ibn al-Asy'ats. Ia memimpin perlawanan para *fuqahâ'*. Perlawanan ini akhirnya memakan korban para *tâbi'in* dan *fuqahâ'* pilihan. Kemudian diakhiri dengan terbunuhnya Said bin Jubair oleh Hajjaj bin Yusuf.⁶

Ada pula Imam Abu Hanifah (w. 150 H). Ia berada di barisan Imam Muhammad an-Nafs az-Zakiyyah, cucu Husain bin Ali, melawan Abu Ja'far al-Manshur. Imam Abu Hanifah bahkan menginfakkan hartanya di jalan ini. Ia pun berfatwa tentang kebolehan melakukan perlawanan terhadap penguasa. Hal ini mengakibatkan Abu Hanifah dipenjara dan wafat di dalam penjara.⁷

Imam Malik (w. 179 H) juga tercatat dalam barisan ini. Ketika terjadi perlawanan oleh Muhammad an-Nafs az-Zakiyyah beliau berfatwa tantang batalnya baiat kepada Bani Abbasiyah. Beliau juga menyatakan tidak sah baiat orang yang terpaksa. Akibatnya, Imam Malik dihukum cambuk oleh Gubernur Madinah, Ja'far bin Sulaiman, hingga belikat beliau patah.⁸

Nama lainnya yang tercatat dalam barisan

ini adalah Imam Izzuddin bin Abdissalam dan Imam Zakariya bin Muhammad Zakariya al-Anshari. Keduanya adalah Mahaguru al-Azhar Mesir pada masanya.⁹ Dikisahkan bahwa Sultan Salim bin Utsman berkata kepada Imam Zakariya al-Anshari, “Tuanku, mohon doakan aku.” Imam Zakariya berkata: “Rasulullah saw. telah bersabda, Siapa menjadi pengurus dari urusan umatku, lalu dia bersikap lembut kepada mereka, maka balaslah dia—ya Allah—dengan kelembutan. Siapa saja mengurus salah satu urusan umatku, lalu dia membuat mereka sulit/susah, maka susah/sulitkan dia—ya Allah.”¹⁰ Imam Zakariya kemudian berkata kepada Sultan Salim, “Nabi telah mendoakanmu dan juga telah mengutukmu. Maka dari itu tidak ada guna lagi doaku setelah doa beliau.”¹⁰

Masih banyak lagi nama-nama ulama besar yang berada di barisan ini. Dari kalangan ulama terdahulu ada Imam an-Nawawi, Syaikh Taqiyuddin al-Hishni as-Syafii, dll. Dari kalangan ulama kontemporer ada al-‘Allmah Taqiyuddin an-Nabhani, Syaikh Abdul Aziz al-Badri, dan yang lain.

2. Golongan kedua.

Pada golongan ini terdapat sederetan nama ulama besar. Di antaranya Imam Muhammad bin Idris as-Syafii (w. 204 H). Dikenal dengan Imam Syafi’i. Para ulama menuturkan bahwa ketika Imam Syafii tiba di Mesir, beliau disambut oleh murid beliau, Rabi’ bin Sulaiman al-Muradi. Beliau ditawarkan agar mengambil posisi dekat dengan penguasa agar dipandang oleh masyarakat. Namun, Imam Syafii menolak dan berkata, “Rabi’, siapa saja yang tidak mulia dengan ketakwaannya, maka tidak ada lagi yang akan dapat membuat dirinya mulia.”¹¹

Nama lain yang berada pada deretan ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau tidak mau datang kepada para khalifah, para gubernur, maupun jajaran penguasa di bawahnya. Beliau pun enggan menulis surat

kepada mereka. Bahkan beliau melarang murid-muridnya dari hal itu. Ketika beliau ditanya tentang Ibrahim bin al-Harawi, beliau menjawab, “Dia laki-laki kotor.” Beliau melanjutkan perkataannya, “Siapa saja yang mengikuti para penguasa dan *qâdhi*, dia adalah kotoran.”¹²

Nama lainnya adalah Suwaid bin Ghafalah, Thawuf, an-Nakha’i, Abu Hazim al-A’raj, Sufyan at-Tsauri, Fudhail bin ‘Iyadh, Ibn al-Mubarak, dan yang lain.¹³

Sejumlah besar ulama salaf mengambil sikap ini.¹⁴ Mereka memilih sikap ini karena kehati-hatian mengingat beratnya mengatakan kebenaran di hadapan penguasa. Dalam hal ini Said bin al-Musayyib berkata:

إِذَا رَأَيْتَ الْعَالِمَ يَغْشَى الْأُمَرَءَ فَاحْذَرُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَص

*Jika engkau melihat seorang alim keluar-masuk bersama penguasa, maka waspadailah dia, karena dia adalah maling.*¹⁵

3. Golongan ketiga.

Berkebalikan dari sikap kelompok kedua, terdapat sejumlah ulama yang dekat dengan penguasa. Namun, mereka tetap istiqamah dalam kebenaran. Mereka tidak segan mengingatkan penguasa jika mereka melakukan kezaliman atau kebatilan. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Abi Layla, az-Zuhri, al-Auza’i, dan yang lain¹⁶.

Pada kelompok ini barangkali yang paling terkenal adalah Imam Abu Yusuf (w. 182 H). Murid senior Imam Abu Hanifah sekaligus *Qâdhi Qudhât* pertama dalam sejarah Islam.¹⁷ Menurut penuturan Ibn Khalikan, Abu Yusuf diangkat menjadi *qâdhi* di Baghdad pada masa Khalifah al-Mahdi (w. 169 H/785 M) dan al-Hadi (w. 170 H/786 M)¹⁸. Sebagai konsekuensi kedekatannya dengan Harun ar-Rasyid, Abu Yusuf kenal dengan sejumlah

Fokus

penyanyi yang dekat dengan Khalifah; seperti Ibrahim al-Mushili (w. 188 H) dan Ibn Jami' as-Sahmi (w. 192 H). Namun demikian, Abu Yusuf sangat berhati-hati berhubungan dengan mereka¹⁹. Bahkan beberapa bulan sebelum wafat, Abu Yusuf mengatakan, "Tujuh belas tahun aku menemani Abu Hanifah. Kemudian tujuh belas tahun aku tenggelam dalam dunia dan aku yakin ajalku telah dekat."²⁰

Diceritakan juga, pada hari wafatnya, Abu Yusuf berkata, "*Ya Allah, sesungguhnya Engkau Mahatahu bahwa aku tidak pernah sengaja berlaku zalim dalam membuat sebuah putusan hukum yang aku putuskan di tengah-tengah hamba-Mu. Dalam putusan itu, sesungguhnya aku telah mengerahkan daya upayaku agar sesuai dengan Kitab-Mu dan Sunnah Nabi-Mu. Setiap kali mengalami kesulitan, aku menjadikan Abu Hanifah di antara diriku dan diri-Mu. Dia bagiku, demi Allah, adalah sosok yang sangat memahami urusan agama-Mu dan*

tidak keluar dari kebenaran sementara dia mengetahuinya."²¹

Sosok lainnya adalah Imam al-Mawardi (w. 450 H). Orang pertama yang menyandang gelar *Aqdha al-Qudhât*.²² Beliau sekaligus sebagai guru ulama terkemuka, Khatib al-Baghdadi²³. Pada masanya, infiltrasi kaum Buwaihi sedang berada pada puncaknya. Al-Mawardi hidup pada masa al-Qadir Billah (w. 422 H) yang menduduki jabatan Khilafah selama empat puluh satu tahun, juga al-Qa'im Bi'amrillah (w. 467 H) yang menjadi Khalifah selama empat puluh lima tahun. Al-Mawardi berjuang membantu al-Qadir dan al-Qa'im pada saat-saat genting dari sejarah Khilafah Abbasiyah. Saat itu gerakan Syiah Imamiyyah dan Syiah Ismailiyah, yang menjadi cikal-bakal berdirinya Daulah Fathimiyah di Mesir berusaha menghancurkan Khilafah Abbasiyah.²⁴

Kitab-kitab al-Mawardi dalam bidang politik; *al-Ahkâm as-Sulthâniyah wa al-Wilâyât ad-Dîniyyah, Tashîl an-Nazhar wa Ta'jîl az-Zhafar, Adab al-Wazîr*, dan *Nashîḥah al-Mulûk* menjadi bukti bahwa beliau adalah orang yang dekat dengan penguasa. Namun demikian, beliau tetap istiqamah dalam kebenaran. Al-Mawardi melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana situasi politik yang begitu buruk yang dilewati Daulah Abbasiyah, kondisi tersobek-sobek yang dialami dan pergolakan yang dahsyat dalam mempersebutkan kekuasaan antara pemerintahan-pemerintahan tersebut. Berangkat dari realitas itulah, al-Mawardi menulis kitab tentang politik tersebut dengan tujuan menjelaskan kepada masing-masing akan batas-batas tanggung jawabnya yang tidak boleh dilangkahi. Beliau mengembalikan kebenaran pada posisinya setelah sebelumnya telah terabaikan.²⁵

Sosok lain yang cukup masyhur pada posisi ini adalah Syekh Abdullah bin Hijazi bin

Al-Mawardi melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana situasi politik yang begitu buruk yang dilewati Daulah Abbasiyah, kondisi tersobek-sobek yang dialami dan pergolakan yang dahsyat dalam mempersebutkan kekuasaan antara pemerintahan-pemerintahan tersebut. Berangkat dari realitas itulah, al-Mawardi menulis kitab tentang politik tersebut dengan tujuan menjelaskan kepada masing-masing akan batas-batas tanggung jawabnya yang tidak boleh dilangkahi.

Ibrahim as-Syafii. Lebih dikenal dengan nama asy-Syarqawi (w. 1227 H). Beliau adalah Grand Syaikh al-Azhar pada masanya. Meski beliau dekat dengan para penguasa, termasuk dari pihak Prancis, dapat dikatakan, beliaulah yang berjasa menyelamatkan al-Azhar, para ulamanya, dan segenap mahasiswanya dari serangan Prancis.²⁶

4. Golongan keempat.

Sejarah mencatat beberapa nama ulama yang dekat dengan penguasa, membantu kezaliman mereka dan menjadi setempel kekuasaan. Salah satu tokoh yang terkenal pada posisi ini adalah Ahmad bin Abi Du'ad (240 H). Biografinya disebut oleh sejumlah ulama, seperti al-Baghdadi di dalam *Târîkh Baghdâd* (IV/141), al-Mas'udi, *Murûj adz-Dzahab* (II/361-362), Ibn al-Atsir di dalam *Al-Kâmil* (VI/365), dan yang lain.²⁷ Dialah sosok pemimpin Muktaẓilah (menurut satu versi) atau Jahmiyah (menurut versi lain) yang memprovokasi Khalifah al-Makmun, al-Mu'tashim dan al-Watsiq untuk memaksakan akidah kemakhlukan al-Quran al-Karim dan menjebloskan siapa saja yang menolak ke dalam penjara. Imam Ahmad bin Hanbal merupakan salah satu korban dari kezaliman Ahmad bin Abi Du'ad.²⁸ Dia pula yang memprovokasi al-Watsiq untuk mengeksekusi mati Ahmad bin Nashr al-Khuza'i (w. 231 H), seorang tokoh Ahlus Sunnah yang gigih melakukan amar makruf nahi mungkar kepada penguasa.²⁹

Nama lain yang dikenal sebagai ulama yang tergelincir karena kekuasaan adalah Abu al-Hasan Muhammad bin Abi Syawarib al-Umawi (w. 325 H) dan Abu Sa'ib Utbah bin Abdillah al-Hadzami (w. 350 H). Abu al-Hasan dikenal sebagai ulama yang menjadi *Qâdhi Qudhât* yang gemar dengan suap-menyuap. Menurut at-Tanukhi, Abu al-Hasan gemar melakukan berbagai pelanggaran syariah. Hal ini telah

menjadi buah bibir di masyarakat.³⁰ Adapun Abu Sa'ib juga terkenal dengan kasus suap dan banyak melakukan pelanggaran syariah yang menciderai akhlak seorang ulama.³¹ □

Catatan kaki:

- ¹ Al-Ashfahani, Abu Nu'aim Ahmad bin Abdillah, *Hilyah al-Awliya' wa Thabaqat al-Ashfiya'*, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, 1405, juz V, hal. 165
- ² Lihat: *Tarikh Khalifah bin Khayyath*, riwayat Baqi bin Mukhallad, juz 1, hal. 253-256. (dikutip dari al-Badrani, *an-Nizham as-Siyasi ba'd Hadmi Dawlah al-Khilafah*, hal. 44)
- ³ Lihat: Dr. Sa'id Muhammad Muhammad Ali, *Muhawarah ad-Da'wah fi Hayah al-Imam al-Husain*, Kasyidah, Mesir, Cet. I 2013 Hal. 171-172
- ⁴ *Ibid*, hal. 174
- ⁵ *Ibid*.
- ⁶ Al-Badrani, *Op.Cit.* hal. 44
- ⁷ Dr. Abdussalam Yasin, *Rijal al-Qawamah wa al-Ishlah*, as-Shafa, 2001, hal. 76
- ⁸ *Ibid*.
- ⁹ Lihat: Ahmad Rabi' Ahmad Sayyid al-Azhari, *Min al-Mawaqif al-Khalidah li 'Ulama' al-Azhar as-Syarif*, Mesir, Kasidah, Cet.I, 2017, hal. 305 dan 306.
- ¹⁰ *Ibid*, hal. 307
- ¹¹ Al-Hafnawi, Muhammad Ibrahim, *al-Fath al-Mubin fi Ta'rif Mushthalahat al-Fuqaha' wa al-Ushuliyin*, Mesir, Dar as-Salam, Cet.VI, 2017, hal. 126
- ¹² Al-Maqdisi, Muhammad bin Muflih, *al-Adab as-Syar'iyyah wa al-Minah al-Mar'iyyah*, juz III, hal. 476
- ¹³ *Ibid*.
- ¹⁴ *Ibid*
- ¹⁵ *Ibid*, 178
- ¹⁶ *Ibid*, hal. 477
- ¹⁷ Dr. Shabaro, Muhammad Isham, *Qadhi Qudhat dalam Sejarah Islam*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, Cet. I, 2012, Alih Bahasa: Utsman Zahid as-Sidany, hal. 177
- ¹⁸ Ibn Khalikan, *Wafayat al-A'yan*, juz VI, hal. 379. Ibn Katsir, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, juz X, hal. 180
- ¹⁹ Dr. Shabaro, Muhammad Isham, *ibid*, hal. 191
- ²⁰ Ibn Katsir, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, juz X, hal. 181
- ²¹ At-Tanukhi, *Nisywar al-Muhâdharah*, juz VI, hal. 203. Ibn Khalikan, *Wafayat al-A'yan*, juz VI, hal. 388
- ²² Dr. Shabaro, *Op.Cit.* hal. 353
- ²³ *Ibid*, hal. 354
- ²⁴ *Ibid*, hal. 356
- ²⁵ *Ibid*, hal. 361
- ²⁶ Lihat biografi beliau di dalam: Ali Abdul Azhim, *Masyikhah al-Azhar*, hal. 149-177.
- ²⁷ Lihat: Shabaro, Isham, *Op.Cit.* hal. 273
- ²⁸ At-Tamimi, *al-Mihan*, hal. 444 (dikutip dari Shabaro, Isham, *Op.Cit.* hal. 294)
- ²⁹ Ibn Katsir, *Op.Cit.* juz X, hal. 303 dst.
- ³⁰ At-Tanukhi, *Nisywar al-Muhâdharah*, IV, hal. 142 (dikutip dari Shabaro, *Op.Cit.* hal. 227)
- ³¹ *Ibid*.

PERAN PENTING ULAMA MENGAWAL KEKUASAAN

Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy

Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa kekuasaan adalah bagian tak terpisahkan dari Islam. Kekuasaan Islam (Imamah atau Khilafah) merupakan salah satu rukun dalam Islam yang kewajibannya telah disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Di dalam *Kitab Al-Farq bayn al-Firq*, Imam Asyfirayaini (Abu Manshur al-Baghdadi asy-Syafii) menetapkan Imamah dan Khilafah merupakan bagian dari rukun dalam Islam yang disepakati Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan:

Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat atas perkara-perkara ushul yang menjadi bagian dari rukun-rukun agama. Setiap rukun dari rukun-rukun tersebut wajib atas setiap orang yang berakal dan baligh mengetahui hakekatnya. Setiap rukun dari perkara-perkara ushuluddin itu memiliki cabang-cabang. Di dalam cabang-cabang itu terdapat masalah-masalah yang telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bulat. Mereka menyatukan siapa saja

yang menyelisihinya mereka dalam perkara-perkara tersebut...Rukun Kedua Belas: Khilafah dan Imamah. Imamah wajib atas umat... (Asyfirayaini, *Al-Farq bayn al-Firq*, hal.279]

Menolak dan memusuhi Imamah/Khilafah sama artinya dengan menolak dan memusuhi salah satu pilar agama Islam yang telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Hakikat dan Fungsi Kekuasaan

Kekuasaan ditegakkan untuk menerapkan Islam secara *kâffah* dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Asas dan hukum yang diberlakukan untuk mengatur seluruh urusan rakyat dan negara harus bersumber dari Islam semata. Imam al-Ghazali mengatakan:

الِدِينُ أَسُّ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لَا أَسَّ لَهُ فَمَهْدُومٌ
وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

Agama Islam adalah asas dan kekuasaan adalah penjaga. Kekuasaan tanpa asas akan binasa, sedangkan agama tanpa penjaga

akan lenyap (Al-Ghazali, *Al-Iqtishâd fî al-'itiqâd*, 1/76).

Akidah Islam harus dijadikan sebagai asas kekuasaan. Kekuasaan ditegakkan untuk menjaga Islam.

Kekuasaan yang tegak di atas paham demokrasi-sekular, yang memberlakukan hukum-hukum sekuler buatan manusia, jelas-jelas tidak sejalan dengan "hakikat kekuasaan" dalam perspektif Islam. Kekuasaan seperti ini harus diubah agar kembali sejalan dengan hakikatnya, yakni menjaga Islam dari kelenyapan dan penelantaran. Imam an-Nawawi mengatakan, "Sudah menjadi keharusan atas umat adanya seorang imam yang menegakkan agama, menolong sunnah, menolong orang-orang yang dizalimi, memenuhi hak dan menempatkannya sesuai dengan tempatnya". (An-Nawawi, *Rawdhah ath-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn*, 3/433).

Imam al-Mawardi juga mengatakan:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَ
سِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ

Imamah itu menduduki posisi untuk Khilafah an-Nubuwwah dalam menjaga agama dan pengaturan urusan dunia (Al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, hlm. 5).

'Allamah Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani juga mengatakan, "Khilafah adalah kepemimpinan umum untuk seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariah Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru alam. Khilafah substansinya sama dengan Imamah. Imamah dan Khilafah memiliki makna yang sama." (An-Nabhani, *Al-Khilâfah*, hlm. 1).

Peran Penting Ulama Mengawal Kekuasaan

Tugas penting ulama adalah memastikan kekuasaan menjalankan fungsinya sesuai dengan Islam. Ketika penguasa menyimpang, ulama harus tampil ke depan meluruskan penyimpangan mereka. Ulama tidak boleh bersikap lemah. Ulama harus terus melakukan koreksi hingga penguasa tunduk dan berjalan kembali di atas Islam.

Ketika ulama berdiam diri terhadap penyimpangan penguasa, niscaya kerusakan menyebar luas di tengah-tengah masyarakat. Bahkan jika penyimpangan penguasa dibiarkan berlarut-larut, kekuasaan yang seharusnya melindungi Islam bisa berubah menjadi penghancur Islam. Ini seperti kekuasaan yang ada di negeri-negeri Islam saat ini.

Kerusakan masyarakat disebabkan oleh kerusakan penguasa. Kerusakan penguasa disebabkan kerusakan ulama. Imam al-Ghazali mengatakan:

فَقَسَادُ الرِّعَايَا بِفَسَادِ الْمُلُوكِ وَ فَسَادُ الْمُلُوكِ
بِفَسَادِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادُ الْعُلَمَاءِ بِاسْتِيْلَاءِ حُبِّ
الْمَالِ وَ الْجَاهِ

Rusaknya rakyat disebabkan karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa disebabkan karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama disebabkan karena dikuasai cinta harta dan ketenaran (Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, 2/357).

Jika ulama berdiam diri atas penyimpangan penguasa, atau malah menjustifikasi penyimpangan mereka, maka kekuasaan itu akan membawa masyarakat ke dalam kerusakan dan kebinasaan.

Sikap Ulama di Hadapan Para Penguasa

Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menggariskan ketentuan dan adab ulama di hadapan para penguasa. Di antaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, memberikan loyalitas

Analisis

hanya pada Islam. Tidak pernah gentar menghadapi kelaliman penguasa. Ulama adalah orang-orang yang lebih takut kepada Allah SWT di saat kebanyakan orang lebih takut kepada penguasa. Ia selalu memegang teguh Islam meskipun harus tersungkur mati di dalamnya. Muadz bin Jabal ra. menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«أَلَا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَقْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُوا
الْكِتَابَ، أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمْرًا يُفْضُونَ لَكُمْ، فَإِنْ
أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ، قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ: كَمَا صَنَعَ
أَصْحَابُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، نُشِرُوا بِالْمَنَاشِيرِ وَحُمِلُوا
عَلَى الْحَشَبِ مَوْتٌ فِي طَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي
مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

“Perhatikanlah, sungguh al-Quran dan penguasa akan berpisah. Karena itu janganlah

Ketika ulama berlaku lurus dan tegas kepada penguasa, hakikatnya ia telah mencegah sumber kerusakan. Sebaliknya, tatkala ia berlaku lemah kepada penguasa zalim, saat itulah ia menjadi pangkal segala kerusakan. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Ima Hujjatul Islam Imam al-Ghazali (Al-Ghazali, *Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn*, 2/357).

kalian memisahkan diri dari al-Quran. Perhatikanlah, akan ada para pemimpin yang memutuskan perkara untuk kalian. Jika kalian menaati mereka, mereka menyesatkan kalian. Jika kalian membangkang kepada mereka, mereka akan membunuh kalian.” Muadz bin Jabal bertanya, “Ya Rasulullah, apa yang mesti kami lakukan? Nabi saw. menjawab, “Seperti yang dilakukan para sahabat Isa bin Maryam as. Mereka digergaji dengan gergaji dan digantung di atas pohon. Mati dalam ketaatan lebih baik daripada hidup dalam maksiat kepada Allah ‘Azza wa Jalla.” (HR ath-Thabarani).

Kedua, mengawal kekuasaan agar tetap berjalan di atas syariah Islam. Ulama harus memperhatikan perilaku, kebijakan, kecenderungan dan orang-orang yang ada di sekeliling penguasa. Ia juga harus memahami konstelasi politik internasional, negara-negara berpengaruh, dan konvensi internasional yang mempengaruhi negaranya. Semua ini diperlukan untuk mengawal kekuasaan agar tetap sejalan dengan Islam dan kepentingan kaum Muslim.

Sulthan al-‘Ulama, ‘Izuddin bin Abdus Salam mengkritik Raja Ismail yang bersekongkol dengan orang-orang Eropa Kristen untuk memerangi Najamuddin bin Ayyub. Beliau tidak hanya membuat fatwa. Beliau juga mengkritik tindakan Raja Ismail di atas mimbar Jumat di hadapan penduduk Damaskus. Saat itu Raja Ismail tidak ada di Damaskus. Akibat fatwa dan khutbahnya yang tegas dan lurus, Al-‘Iz dipecat dari jabatannya dan dipenjara di rumahnya (As-Subki, *Ath-Thabaqât*, dan lain-lain).

Ketiga, menjadi garda terdepan dalam mengoreksi penguasa zalim. Ketika ulama berlaku lurus dan tegas kepada penguasa, hakikatnya ia telah mencegah sumber kerusakan. Sebaliknya, tatkala ia berlaku lemah kepada penguasa zalim, saat itulah ia menjadi

pangkal segala kerusakan. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Ima Hujjatul Islam Imam al-Ghazali (Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, 2/357).

Keempat, membimbing umat dan penguasa agar selalu berjalan di atas Islam. Ulama tidak saja menyibukkan diri pada ibadah *mahdhah* belaka. Mereka harus terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Hidup bersama mereka. Membina dan membimbing mereka dengan Islam. Mereka juga mencermati keadaan masyarakat dan penguasa. Mengawasi mereka. Berusaha semaksimal mungkin melakukan perbaikan atas keadaan mereka. Ini sebagai bentuk pengalaman hadis:

«بَدَأَ الْإِسْلَامُ عَرَبِيًّا، ثُمَّ يَعُودُ عَرَبِيًّا كَمَا بَدَأَ، فَطَوَيْ
لِلْعَرَبَاءِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ الْعَرَبَاءُ؟ قَالَ:
الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ.»

"Islam datang pertama kali dalam keadaan asing. Kemudian akan kembali menjadi asing. Sebagaimana Islam datang pertama kali. Beruntunglah orang-orang yang terasing." Ditanyakan, "Ya Rasulallah, siapakah orang-orang asing itu?" Beliau menjawab, "Orang-orang yang melakukan perbaikan jika masyarakat melakukan kerusakan." (HR Ahmad).

Kelima, membangkitkan umat. Meninggikan kesadaran mereka. Membentengi mereka dari paham, keyakinan dan sistem hukum yang bertentangan dengan Islam. Ulama selalu berinteraksi dengan umat. Bersabar atas kesakitan yang ditimpakan masyarakat kepada diri mereka. Nabi saw. bersabda:

«الْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَدَاهُمْ
خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ
عَلَى أَدَاهُمْ»

Seorang Muslim, jika berinteraksi dengan manusia, dan bersabar atas kesakitan (yang ditimpakan oleh) mereka, lebih baik daripada seorang Muslim yang tidak berinteraksi dengan manusia dan tidak bersabar atas kesakitan (yang ditimpakan oleh) mereka (HR at-Tirmidzi).

Ulama yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat di atas berhak mendapatkan gelar ulama akhirat, yakni ulama yang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah SWT kelak pada Hari Akhir.

Sikap yang Harus Dijauhi Ulama

Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menjelaskan perilaku ulama *sû'* (ulama jahat). Ulama jahat adalah seburuk-buruk manusia dan sumber kerusakan. Imam al-Ghazali mengatakan: *Al-Harits rahimahullâh* berkata, *"Saudaraku, ulama jahat itu adalah setan dari golongan manusia dan pembawa fitnah atas manusia. Mereka berhasrat pada harta dan kedudukan dunia. Mereka lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Mereka menakwilkan agama untuk kepentingan dunia. Di dunia, mereka tercela dan terhina. Di akhirat mereka adalah orang-orang yang merugi atau Zat Yang Mulia memaafkan mereka dengan karunia-Nya."* (Al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn*, 3/265).

Di antara perilaku keji ulama jahat adalah: *Pertama*, menjadi stempel kekuasaan zalim. Tidak ada yang lebih keji dibandingkan membantu kezaliman penguasa. Selain melanggengkan kekuasaan zalim, perbuatan ini menimbulkan madarat yang sangat besar bagi masyarakat; bagi urusan agama dan urusan dunia mereka. Ketika paham kufur atau kebijakan lalim penguasa dijustifikasi ulama, masyarakat awam akan terseret dalam kekufuran dan tenggelam dalam kesengsaraan. Nabi saw. benar-benar mencela perbuatan semacam ini. Beliau bersabda kepada Kaab bin 'Ujrah ra.:

Analisis

«أَعَاذُكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ، قَالَ: وَ مَا السُّفَهَاءُ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَهْتَدُونَ بِهُدْيِي، وَلَا يَسْتَنْوُونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَقْتُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَ لَسْتُ مِنْهُمْ، وَ لَا يَرُدُّونَ عَلَيَّ حَوْضِي»

“Semoga Allah SWT melindungi kamu dari pemimpin bodoh. Kaab bertanya, “Siapa pemimpin bodoh itu.” Nabi saw. menjawab, “Para pemimpin yang datang setelah aku. Ia tidak memberi petunjuk dengan petunjukku dan tidak menjalankan sunnahku. Siapa saja yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu kezaliman mereka, mereka tidak termasuk golonganku dan aku bukan golongan mereka, dan mereka tidak bisa mencapai telagaku.” (HR Ahmad dan al-Bazzar).

Ulama adalah pewaris Nabi yang bertugas menjaga kesucian Islam dan melindungi kepentingan umat Islam. Tugas ini akan berjalan sempurna ketika mereka memberikan loyalitas hanya pada Islam. Tidak silau oleh gemerlap dunia. Tidak pernah gentar menghadapi kebengisan penguasa.

Kedua, menjadi alat penguasa untuk memecah-belah umat. Di antara cara penguasa zalim untuk mempertahankan kekuasaannya adalah memecah belah umat Islam. Jika umat terpecah-belah, kekuatan mereka melemah, dan perjuangan dakwah Islam relatif mudah dipatahkan. Cara-cara seperti ini pernah dipraktikkan oleh Belanda saat menjajah Indonesia. Dengan politik *divide at impera*, kolonialis Belanda berhasil mempertahankan kekuasaannya selama ratusan tahun.

Ulama tidak boleh menjadi alat penguasa untuk membuat perpecahan di tengah-tengah kaum Muslim, baik melalui sentimen madzhab, suku, ras, atau bangsa. Ulama harus menyatukan umat dalam wadah perjuangan menegakkan syariah Islam dan Khilafah; menjauhkan mereka dari friksi dan perpecahan.

Ketiga, tidak menggadaikan agama untuk kepentingan dunia. Cinta dunia merupakan pangkal dari semua keburukan. Al-Imam al-Hafizh al-Munawi mengatakan, “Cinta dunia adalah pangkal semua keburukan. Cinta dunia akan menjatuhkan ke dalam ragam syubhat, lalu ke dalam ragam kemakruhan, kemudian ke dalam ragam keharaman. Al-Ghazali berkata, ‘Sebagaimana cinta dunia adalah pangkal semua keburukan maka benci dunia adalah pangkal dari semua kebaikan’.” (Al-Hafizh al-Munawi, *At-Taysir fi Syarh al-Jâmi` ash-Shaghîr*, 1/1000. Maktabah Syamilah).

Khatimah

Ulama adalah pewaris Nabi yang bertugas menjaga kesucian Islam dan melindungi kepentingan umat Islam. Tugas ini akan berjalan sempurna ketika mereka memberikan loyalitas hanya pada Islam. Tidak silau oleh gemerlap dunia. Tidak pernah gentar menghadapi kebengisan penguasa.

Wallâhu a`lam bi ash-shawâb. □

TELADAN ULAMA MENGHADAPI PENGUASA

Ibnu C. Ma'ruf

Ulama adalah pewaris para nabi. Yang diwarisi adalah ilmu (pengetahuan) tentang hakikat hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Hal ini sebagaimana disampaikan sendiri oleh Baginda Rasulullah saw: “*Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewarisi ilmu. Barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.*” (HR at-Tirmidzi, Ahmad, ad-Darimi dan Abu Dawud).

Dengan demikian, hakikat ulama adalah penjaga ilmu (pengetahuan). Selama ulama ada, selama itu pula dunia ini akan selalu disinari oleh pelita. Dengan itu manusia akan selalu mendapat petunjuk dan tidak akan salah dalam melangkah kakinya. Rasulullah saw. bersabda: “*Sesungguhnya ulama di bumi adalah seperti bintang-bintang di langit yang memberi petunjuk di dalam kegelapan bumi dan laut. Apabila dia terbenam, maka jalan akan tampak kabur.*” (HR Ahmad).

Sebaliknya, saat ulama tidak ada lagi, hilanglah pelita bagi dunia ini. Rasulullah saw. bersabda: “*Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya (secara langsung) dari hamba-hamba. Akan tetapi Dia*

mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Ulama tidak pernah takut apapun karena dia mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya. Ulama tak pernah takut mati sebab mereka tahu mati adalah pintu bertemu Allah Sang Kekasih. Ulama tak pernah takut miskin karena mengetahui hakikat bahwa kaya-miskin tidak ada pengaruhnya di sisi Allah SWT. Ulama tak pernah takut dengan cacian atau hinaan sebab cacian atau hinaan manusia tak ada nilainya. Satu-satunya yang ditakuti hanyalah Allah SWT. “*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama.*” (QS Fathir [35]: 28).

Oleh karena itu, saat ada orang tidak takut kepada Allah sehingga berani bermaksiat kepada-Nya atau orang itu justru takut kepada selain Allah, seperti takut kepada penguasa zalim, maka hakikatnya dia belum sampai pada derajat ulama yang sebenarnya. Memang bisa jadi, ia dianggap ulama oleh masyarakat atau bahkan menjadi ketua para ulama, tetapi dalam

pandangan Allah dia bukanlah ulama. Dia hanya orang yang mendapat gelar ulama, tetapi hakikatnya bukan ulama.

Ulama selalu berada di garda terdepan membela agama Allah, menjaga kemurnian Islam dan ajaran-Nya, mendidik masyarakat dengan syariah-Nya, meluruskan yang bengkok dari petunjuk-Nya dan berteriak dengan lantang terhadap berbagai kezaliman. Ulama tak pernah takut sedikit pun dengan penguasa zalim. Yang ditakuti hanyalah Allah SWT.

Berikut ini akan ditunjukkan sikap para ulama mujtahid terhadap para kekuasaan yang zalim pada zamannya. Para ulama tak gentar sedikit pun mengoreksi yang salah dan membela yang benar, apapun risikonya.

Beberapa Teladan Ulama

Diceritakan di dalam kitab *Al-Islâm bayna al-Ulamâ wa al-Hukkâm* karya Syaikh Abdul Aziz al-Badri. Pada saat Al-Mahdi Abu Ja'far

Ulama selalu berada di garda terdepan membela agama Allah, menjaga kemurnian Islam dan ajaran-Nya, mendidik masyarakat dengan syariah-Nya, meluruskan yang bengkok dari petunjuk-Nya dan berteriak dengan lantang terhadap berbagai kezaliman. Ulama tak pernah takut sedikit pun dengan penguasa zalim. Yang ditakuti hanyalah Allah SWT.

al-Manshur kembali dari menunaikan ibadah haji, dia memerintahkan agar Imam Sufyan Ats-Tsauri dibawa menghadap dirinya. Setelah Imam ats-Tsauri menghadap terjadilah percakapan yang serius antara Imam ats-Tsauri dengan Al-Mahdi.

Al-Mahdi berkata, "Mengapa sejak aku kembali dari menunaikan ibadah haji, engkau tidak pernah datang menghadapku, padahal banyak masalah yang ingin aku kemukakan dan minta pendapatmu? Selama ini apa yang engkau sampaikan selalu kami turuti, dan apa yang engkau larang selalu kami jauhi."

Setelah Al-Mahdi selesai berkata, Imam ats-Tsauri tidak menjawab pertanyaannya. Ia justru mempertanyakan masalah lain karena Al-Mahdi telah dinilai melakukan penyimpangan saat berhaji dengan menggunakan dana masyarakat, "Berapa banyak uang negara yang telah engkau habiskan dalam perjalanan itu?"

Al-Mahdi menjawab dengan jawaban standar khas pejabat, "Aku tak tahu, tetapi engkau dapat melihat rinciannya pada bendaharaku."

Terhadap jawaban yang mungkin dianggap standar oleh kebanyakan orang, Imam ats-Tsauri justru menganggap itu sebagai masalah besar. Lalu beliau mengatakan, "Apa jawabanmu pada Hari Kiamat nanti jika engkau ditanya Allah tentang hal itu?"

Imam ats-Tsauri mengkritik keras jawaban itu. Seakan-akan beliau mengatakan, apakah jika engkau ditanya Allah tentang penggunaan uang rakyat, lalu engkau akan berkata: "Ya Allah, tanyakan saja kepada bendaharaku." Ini adalah jawaban yang sangat konyol dari seorang pemimpin kepada Allah SWT.

Kemudian beliau melanjutkan nasihat dan kritiknya yang pedas sebagai perbandingan atas penyalahgunaan wewenang. Ia mengatakan, "*Ingatlah ketika Khalifah Umar ra. pulang dari menunaikan ibadah haji dan*

bertanya kepada pembantunya, 'Berapa banyak uang yang telah kita pergunakan dalam perjalanan haji ini?' Pembantu itu mengatakan, 'Delapan belas dinar, wahai Amirul Mukminin.' Umar lalu berkata, 'Celaka kita! Kita telah memperkosa harta Baitul Mal.'"

Seorang pegawai di sekitar Al-Mahdi pun menegur Imam ats-Tsauri karena ucapannya yang dia nilai tak layak tersebut, "*Tak layak engkau berkata demikian di hadapan Al-Mahdi, Amirul Mukminin.*"

Namun, justru Imam ats-Tsauri menjawab dengan tegas tanpa rasa takut, "*Diam! Sesungguhnya Fir'aun binasa karena Hamman, dan kau sendiri adalah Hamman.*"

Itulah Imam ats-Tsauri adalah sosok ulama yang menunaikan amanah keilmuannya dengan sebaik-baiknya. Ia berani menghadapi dan meluruskan penguasa jika memang penguasa tersebut ia nilai salah. Ia bukan tipe ulama pencari muka apalagi penjilat penguasa.

Contoh yang lain adalah kisah nyata yang dilakukan oleh seorang ulama Fudhail bin Iyadh. Ketika Khalifah Ar-Rasyid menghadap beliau pada tengah malam, saat tagannya bersentuhan, tanpa rasa takut beliau berkata, "Celaka aku. Tanganku disentuh oleh tangannya yang berlumuran darah."

Ar-Rasyid berkata, "Kedatanganku dengan niat yang baik. Semoga Allah memberkahi kedatanganku ini."

Kemudian Imam Fudhail menasihati penguasa itu tanpa rasa takut, "Tidak! Hatimu belumlah bersih. Engkau telah banyak berbuat dosa terhadap rakyat. Bahkan dosa keluarga dan para pegawaimu juga akan menimpa dirimu. Engkau telah memanjakan mereka dengan segala kemewahan. Akibatnya, mereka bebas berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Ketahuilah, kelak mereka akan meninggalkanmu saat Hari Perhitungan di hadapan Allah SWT. Contohnya Umar bin Abdul Aziz, ketika dia diangkat

Begitulah sikap seorang ulama di hadapan penguasa. Menasihati dengan tulus. Tidak mencari kedudukan dengan memberikan sanjungan palsu. Tidak memutar-balikkan ayat hanya untuk menyenangkan seorang penguasa.

sebagai khalifah, dia memanggil tiga ulama besar yaitu Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ka'ab dan Raja' bin Hayat. Kepada ulama itu, Umar berkata, 'Aku ditimpa musibah besar karena aku sudah ceroboh mau menerima jabatan khalifah ini. Aku mohon kalian bertiga dapat memberikan nasihat, saran dan petunjuk.' Ambillah pelajaran dari kisah tersebut. Umar menganggap jabatan itu sebagai musibah atas dirinya. Sebaliknya, engkau justru menganggap jabatan itu sebagai kepuasan bagi dirimu."

Kemudian Imam Al-Fudhail menasihati Ar-Rasyid dengan mengatakan, "*Sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan keselamatanmu sehingga pada hari akhir nanti engkau tergelincir ke dalam api Jahanam.*"

Begitulah sikap seorang ulama di hadapan penguasa. Menasihati dengan tulus. Tidak mencari kedudukan dengan memberikan sanjungan palsu. Tidak memutar-balikkan ayat

Siyasah Dakwah

hanya untuk menyenangkan seorang penguasa.

Demikianlah sekelumit contoh/teladan sikap ulama terhadap penguasa. Kisah-kisah lebih banyak dapat dibaca pada kitab *Al-Islâm bayn al-Ulamâ' wa al-Hukkâm* atau kitab-kitab lain yang telah ditulis oleh para ulama *mukhlis*.

Khatimah

Ulama memang semestinya hanya takut kepada Allah SWT, menjadi pembela kebenaran, menyampaikan yang haq secara lantang dan menyingkap yang batil secara jelas. Ulama berada di garda terdepan dalam menghadapi berbagai penyimpangan meskipun penyimpangan itu dilakukan oleh mereka yang sedang berkuasa.

Kekuasaan itu memang menyenangkan karena semua keinginan nafsu dapat terpuaskan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan itu cenderung mengantarkan pada penyimpangan-penyimpangan dan kezaliman-

Kekuasaan itu memang menyenangkan karena semua keinginan nafsu dapat terpuaskan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan itu cenderung mengantarkan pada penyimpangan-penyimpangan dan kezaliman-kezaliman, kecuali mereka yang mengambil dan menunaikan kekuasaan itu dengan benar.

kezaliman, kecuali mereka yang mengambil dan menunaikan kekuasaan itu dengan benar. Karena itulah Rasulullah mewanti-wanti agar berhati-hati dekat dengan kekuasaan. Rasul saw. pun mengungkapkan dengan bahasa yang sangat halus: *mendatangi pintu penguasa*. Beliau pernah bersabda, *“Siapa saja yang mendatangi pintu-pintu sultan (penguasa), maka dia akan terkena fitnah dan godaan.”* (HR at-Tirmidzi dan Ahmad).

Terhadap para pemimpin yang suka berdusta, Rasulullah saw. telah berpesan kepada kita, *“Akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Siapa saja yang masuk kepada mereka lalu membenarkan (menyetujui) kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telaga (pada Hari Kiamat). Siapa saja yang tidak masuk pada mereka (penguasa dusta) itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka, dan (juga) tidak mendukung kezaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku, dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telaga (pada Hari Kiamat).”* (HR Ahmad dan an-Nasa’i).

Terhadap pemimpin yang adil, yang menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, yang menjalankan syariah secara benar, yang tidak berbuat zalim kepada rakyatnya, kita memang diminta oleh Rasulullah agar taat kepada mereka. Taat di sini bukan ketaan yang buta, namun ketaatan yang didasari oleh pemahaman bahwa ketaatan itu dilakukan sebagai realisasi ketaata kepada Allah SWT. Rasulullah saw bersabda, *“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah meskipun kalian dipimpin oleh hamba sahaya dari Habasyi. Dengar dan taatilah dia selama memimpin kalian dengan Kitabullah.”* (HR at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim).

Wallâhu a’lam bi ash-shawab. □

ULAMA DALAM JEBAKAN FITNAH DUNIA

B aginda Nabi Muhammad saw. menyebut ulama sebagai *para pewaris nabi* (*waratsat al-anbiyâ*). Sebutan istimewa ini tidak pernah disematkan kepada golongan manusia manapun selain mereka. Kata *pewaris* menunjukkan betapa dekat hubungan mereka dengan para nabi, yakni sedekat hubungan nasab!

"Karena warisan itu berpindah kepada orang yang terdekat (hubungannya dengan mayit). Di antara umat manusia yang terdekat penisbatannya kepada agama adalah para ulama, yang berpaling dari dunia dan mencari akhirat. Bagi umat manusia mereka adalah pengganti para nabi yang memperoleh dua keutamaan, yaitu ilmu dan amal." Begitu kata Imam al-Munawi dalam *Faydh al-Qadir*.

Ketergelinciran Ulama

Rasulullah saw. bersabda, *"Seseorang itu diberi cobaan menurut agamanya. Jika agamanya kuat maka cobaannya pun akan besar. Jika agamanya lemah maka cobaannya akan menyesuaikan."*

Karena itu ulama tidak luput dari cobaan sebagaimana manusia lainnya. Bahkan cobaan atas mereka bisa lebih berat. Cobaan atas mereka akan lebih menggiurkan jika berupa

godaan keduniaan, lebih halus jika berupa tipu-daya, dan lebih berat jika berupa kesempatan hidup. Abu Said al-Khudri ra. dalam riwayat al-Hakim pernah bertanya: *Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya?* Dijawab, *"Para Nabi."* Ia bertanya lagi, *"Lalu siapa?"* Dijawab, *"Para ulama."* Ia bertanya lagi, *"Lalu siapa lagi?"* Dijawab, *"Orang-orang shalih."*

Yang paling berbahaya dari segala cobaan terhadap mereka adalah cobaan atau fitnah yang mengakibatkan rusaknya agama mereka. Hal itu akan menyebabkan malapetaka bagi umat manusia dan kerusakan dalam skala umum.

Al-Imam Ibn 'Abdilbarr sebagaimana tercantum dalam *Jâmi' Bayân al-'Ilm wa Fadhlîhi* mengatakan, *"Para ulama mengibaratkan ketergelinciran ulama itu bagaikan bocornya sebuah bahtera, yang jika tenggelam maka banyak manusia juga akan ikut tenggelam bersamanya."*

Bahkan ketergelinciran ulama dapat berpotensi menghancurkan Islam itu sendiri. Al-Imam ad-Darimi meriwayatkan dengan *sanadyang* sahih perkataan Sayidina Umar bin al-Khaththab ra., *"Islam itu dapat hancur dengan ketergelinciran ulama, orang munafik*

yang berdebat dengan (berdalilkan) al-Quran, dan pemerintahan para penguasa yang menyesatkan.”

Bahkan dalam riwayat Imam ad-Darimi lainnya disebutkan, *Ketergelinciran seorang alim berarti ketergelinciran seluruh manusia.*”

Mengapa pengibaratan ketergelinciran ulama begitu menakutkan? Tidak lain karena ketergelinciran mereka akan menyebabkan kesesatan manusia lantaran mereka akan mengikuti ulama yang tergelincir tersebut dengan mengira sebagai kebenaran.

Saat menjelaskan hadis *ittaquû jallat al-âlim (takutlah kalian akan ketergelinciran seorang ulama)*, Imam al-Munawi berkata, *“Maknanya, takutlah kalian atas perbuatan salahnya yang dilakukan secara terang-terangan, karena ketergelincirannya akan menyebabkan ketergelinciran banyak manusia karena mereka akan mengikutinya.”*

Cinta Harta dan Kedudukan

Di antara fitnah yang disebutkan oleh Nabi saw. akan menjangkiti ulama adalah kecintaan terhadap harta dan kedudukan. Ulama yang semacam itu oleh Rasulullah disebut dengan *ulamâ’ salâthîn* (ulama penguasa) karena mereka akan menjadi “stempel” penguasa. Fatwanya menjadi pembenar atas kebijakan-kebijakan zalimnya. Beliau pernah bersabda, *“Ulama adalah orang-orang kepercayaan para rasul, selama mereka tidak menggeluti dunia dan menuruti penguasa. Jika mereka melakukan itu maka jauhilah mereka.”*

Alangkah ironis jika *himmah* (semangat) seorang ulama sampai bergeser dari yang semula hanya untuk akhirat menjadi pecinta dan pemburu dunia; yang tadinya sebagai pengingat dan pengoreksi penguasa menjadi pembenar dan pendukung atas kezaliman mereka. Menerangkan hadis tersebut Imam al-Munawi mengatakan, *“Bahaya mereka (ulama yang terpedaya) terhadap agama dan kaum*

Muslim lebih besar dari bahaya yang ditimbulkan oleh kaum kafir dan kaum jahil.”

Tugas ulama adalah menjadi pengawal yang tegas bagi penguasa agar senantiasa berada di jalan yang benar, tidak menyimpang dari koridor syariah dan tidak berlaku lalim. Jika yang mereka lakukan justru sebaliknya maka itu akan menyebabkan kerusakan di mana-mana. Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dalam *Al-Ihyâ’* mengatakan, *“Rusaknya rakyat itu disebabkan oleh rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa itu disebabkan oleh rusaknya ulama. Rusaknya ulama itu disebabkan oleh kecintaan mereka atas dunia dan kedudukan.”*

Nabi Muhammad saw. bersabda, *“Akan ada setelah (wafat)-ku (nant) para pemimpin pembohong. Siapa saja yang masuk pada mereka lalu membenarkan (menyetujui) kebohongan mereka dan membantu/mendukung kezaliman mereka maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak (punya bagian untuk) mendatangi telaga (pada Hari Kiamat). Siapa saja yang tidak masuk pada mereka itu, tidak membenarkan kebohongan mereka, dan tidak mendukung kedhaliman mereka, maka dia adalah dari golonganku, aku pun dari golongannya, dan ia akan mendatangi telaga (pada Hari Kiamat).”* (HR an-Nasa’i).

Sudah menjadi kebiasaan para ulama yang *mukhlis*, tidak mengharap imbalan harta benda serta jabatan apapun dari aktivitas amar makruf nahi mungkar yang mereka lakukan. Bahkan mereka rela mati syahid di jalan tersebut. Imam al-Ghazali menggambarkan: *“Demikianlah perjalanan hidup para ulama serta kebiasaan mereka dalam melakukan aktivitas amar makruf nahi mungkar tanpa mempedulikan kerasnya para penguasa. Sebab mereka bertawakal kepada Allah yang dengan karunia-Nya akan menjaga mereka. Mereka pun rela terhadap ketetapan Allah jika suatu saat mengaruniai mereka mati syahid. Sebab niat mereka yang*

ikhlas dan tutur-kata mereka menjadi berpengaruh di hati yang keras hingga membuatnya lunak. Adapun sekarang, ketamakan (terhadap dunia) telah menjerat lisan-lisan mereka hingga mereka terdiam (dari melakukan amar makruf nahi mungkar). Kalaupun mereka berkata-kata, hal itu tidak berpengaruh pada kondisi mereka dan mereka mengalami kegagalan.”

Tidak Bersabar Terhadap Siksaan Penguasa

Haji Abdul Malik Karim Amarullah atau akrab disapa Buya Hamka pernah mendapatkan ujian berat dan dijebloskan penjara di era rezim Soekarno.

Berdakwah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim memang tidak mudah. Dipenjara, disiksa maupun dibunuh adalah risiko yang harus diterima. Namun demikian, Rasulullah saw. telah memberikan kabar gembira bagi mereka yang syahid di kalangan para da'i yang tetap tegas menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Beliau bersabda, *“Penghulu para Syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthallib dan orang yang berdiri di hadapan penguasa zalim, lalu ia menyuruh dan melarang penguasa tersebut, lalu penguasa itu membunuh dirinya.”* (HR al-Hakim).

Hari ini kita menjumpai orang-orang yang mengaku ulama. Namun, mereka menyerahkan agama mereka kepada penguasa. mereka membenarkan perilaku penguasa dengan menyitir ayat-ayat al-Quran. Mereka mengetuk pintu-pintu penguasa dengan menawarkan fatwa dan menjual suara umat yang mereka tipu. Mereka tidak tahu malu di hadapan manusia dengan mengatakan bahwa hukum yang dibuat sang penguasa adalah hukum yang sudah final.

Jika ulama berada di luar kekuasaan, para ulama salaf lebih banyak yang melakukan peran

koreksi terhadap penguasa. Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya. Ia lahir pada 164 Hijriyah dan hidup di masa Daulah Abbasiyah. Pada masa pemerintahan al-Makmun, Khalifah Ketujuh Daulah Abbasiyah, terjadi fitnah Khalq al-Qur'an. Penguasa memaksakan doktrin bahwa al-Quran itu makhluk. Paham ini dilanjutkan penggantinya, Khalifah al-Mu'tashim. Siapa pun yang menolak paham ini akan disiksa. Imam Ahmad termasuk di antara mereka yang menolak. Walau harus mendekam dalam penjara, ia tak mengubah pendiriannya. Bahkan ketika pedang Khalifah al-Mu'tashim nyaris menebas lehernya, ia tetap bergeming.

Begitulah sikap para ulama. Dengan risiko apa pun, mereka berani mengatakan kebenaran di depan penguasa zalim. Persis seperti yang disabdakan Rasulullah saw. dalam hadisnya, *“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di depan penguasa zalim.”* (HR Ahmad, Ibn Majah, Thabrani dan al-Baihaqi).

Peran Ulama di Zaman Fitnah

Islam tidak bisa dipisah dari kekuasaan. Di sinilah idealisme dan realitas bertarung. Mereka yang berada di lingkaran kekuasaan tak hanya harus tetap memegang teguh idealismenya, tetapi juga tetap harus melihat realita. Di sinilah kesulitan menemukan puncaknya. Benturan antara idealisme dan realitas kadang begitu keras seolah tak bisa dipadukan. Jelas yang dibutuhkan dari seorang ulama tak hanya fatwa fikih dakwah, tetapi juga fatwa fikih *siyâsah* (politik). Yang diperlukan tak hanya kemampuan berjihad menemukan jawaban atas persoalan, tetapi juga kemampuan menyampaikan jawaban itu sesuai dengan kebutuhan, keadaan dan tempat.

Hendaknya ulama memiliki kesabaran, ketegaran dan keberanian dalam memegang teguh dan menyampaikan kebenaran. Akibatnya, pendiriannya tidak mudah tergerus

oleh iming-iming duniawi. Sebabnya, ilmu adalah amanah. Dengan mengkhianati amanah ini seorang alim akan diazab terlebih dulu mendahului para penyembah berhala. Demikian sebagaimana perkataan Imam Ibn Ruslan, *“Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya kelak akan diazab mendahului para penyembah berhala.”*

Apalagi di zaman yang penuh fitnah seperti saat ini. Peran ulama sangat diharap dan dinantikan, dalam menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan lantang. Al-Khathib al-Baghdadi meriwayatkan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi, *“Jika kelak terjadi banyak fitnah secara terang-terangan (dalam riwayat lain dikatakan: perbuatan-perbuatan bid’ah), dan para sahabatku dicaci-maki, maka hendaklah semua orang yang berilmu menunjukkan ilmunya (dalam rangka menjelaskan kesesatan yang sedang terjadi). Siapa yang tidak melakukan itu, maka atas dia laknat Allah, para malaikat, serta manusia seluruhnya. Allah pun tidak menerima amalan serta sikap adil mereka.”*

Kita berlindung kepada Allah SWT dari bahaya ulama *sû’*, yang ilmunya tidak dijadikan penuntun. Ia tidak beramal sesuai dengan ilmu yang ia ketahui. Asy-Syathibi mengatakan, *“Ulama *sû’* adalah ulama yang tidak beramal sesuai dengan apa yang ia ketahui.”*

Ibn Taimiyah, setelah mengutip QS al-A’raf ayat 146, berkata, *“Inilah kondisi orang yang tidak beramal sesuai dengan ilmunya, tetapi mengikuti hawa nafsunya. Itulah kesesatan, sebagaimana firman Allah dalam QS al-A’raf ayat 175-176. Ini seperti ulama *sû’*.”*

Di antara ulama *sû’* itu adalah ulama *salathîn*, yaitu ulama yang menjadi stempel penguasa. Anas bin Malik ra. menuturkan sebuah hadis, *“Kebiasaan bagi umatku (datang) dari ulama *sû’*. Mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa masa mereka untuk*

mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka itu.” (HR al-Hakim).

Menurut adz-Dzhabi, ulama *sû’* adalah ulama yang mempercantik kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa. Mereka memutarbalikan kebatilan menjadi kebenaran untuk penguasa. Mereka diam saja (di hadapan penguasa), padahal mampu menjelaskan kebenaran.

Khatimah

Ulama harus tetap berpegang teguh pada posisi keulamaannya yang sangat mulia. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tugas utama para nabi, termasuk Rasulullah saw., adalah untuk menegakkan tauhid dan hukum-hukum Allah SWT (syariah Islam). Hal yang sama tentu menjadi tugas para ulama saat ini. Peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab para ulama dalam upaya membangkitkan umat menuju tegaknya kembali *‘izzul Islam wal Muslimin* sangatlah besar.

Untuk membangkitkan umat adalah penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa seluruh problem yang dihadapi umat sekarang berpangkal pada ketiadaan kehidupan Islam, yang di dalamnya diterapkan syariah di bawah kepemimpinan seorang khalifah.

Walhasil, jika ulama didatangi penguasa, mereka tidak memilih untuk cari aman dan mengharapkan jabatan dunia dari penguasa. Yang terbaik adalah mereka tidak menunggu, tetapi proaktif secara lugas datang kepada penguasa untuk beramar makruf nahi mungkar dan mengoreksi penguasa.

Rusaknya ulama di antaranya karena sifat tamak terhadap dunia. ad-Darimi menuturkan, Umar bertanya kepada Kaab, *“Apa yang mengeluarkan ilmu dari hati ulama?”* Kaab menjawab, *“Ketamakan.”* □



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

POLITISASI ISLAM

7 iap kali menjelang pemilu, perbincangan tentang Islam dan umat Islam selalu meningkat. Maklum, ini negeri mayoritas Muslim. Siapa saja yang ingin unggul dalam Pemilu harus memperhitungkan faktor ini. Yang abai, bersiaplah menanggung risiko pahit. Pilkada DKI lalu adalah contoh nyata. Meski berlaga dengan dana melimpah dan dukungan penuh Presiden dan segenap perangkat birokrasi, Ahok tetap saja tumbang. Tak kuasa melawan arus politik Islam yang melanda dia menyusul penghinaannya terhadap al-Quran.

Tidak aneh bila sejak dulu, setiap kekuatan politik di negeri ini, selalu berusaha merangkul kekuatan Islam. Pada masa Orde Baru, Golkar mendirikan Satkar Ulama. PDI-P yang notabene sering berseberangan dengan aspirasi Muslim pun punya Baitul Muslimin (Rumah Kaum Muslim). Kini, menjelang Pilpres 2019, koalisi capres Jokowi menggandeng KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum MUI yang pernah menjadi tokoh kunci dalam pemidanaan Ahok, sebagai cawapresnya. Tentu ini sebuah paradoks. Bagaimana bisa, orang yang semula oleh Jokowi dan Ahok mungkin sangat dibenci,

kini justru berada disisi tokoh yang sangat diidolakan? Namun, dalam politik itu tidaklah aneh. Apa saja bisa terjadi. Dalam politik katanya tak ada musuh dan kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan sendiri. Atas nama kepentingan itu, semua bisa dilakukan, termasuk memanfaatkan agama dan tokoh agama. Dari situlah politisasi Islam terjadi.

Politisasi Islam adalah menjadikan Islam sebagai alat untuk meraih kepentingan politik. Dalam *Wikipedia.org*, politisasi agama diartikan sebagai tindakan manipulasi pemahaman dan pengetahuan keagamaan/kepercayaan melalui propaganda, indoktrinasi, kampanye, sosialisasi dalam wilayah publik, diinterpretasikan agar terjadi migrasi pemahaman, dan menjadikannya seolah-olah merupakan pengetahuan keagamaan/kepercayaan. Kemudian, dilakukan tekanan untuk mempengaruhi konsensus keagamaan/kepercayaan dalam upaya memasukan kepentingan atau agenda politik. Ringkasnya, Islam—ibarat baju—dipakai ketika diperlukan dan ditanggalkan ketika sudah tak dibutuhkan.

Karena itu menjelang Pemilu, ramai para elit politik 'macak' (berhias) islami. Pakai

Catatan Dakwah

songkok/peci. shalat subuh keliling kampung, melakukan kunjungan ke pesantren-pesantren, menggandeng ulama dan lain. Setelah pemilu usai, mereka tinggalkan itu semua. Shalatnya mungkin masih. Peci atau sorban juga mungkin tetap dikenakan, tapi ya sebatas itu. Tak lebih. Mereka tetap melalaikan bahkan menolak prinsip-prinsip Islam dalam politik. Tetap dengan ringan menuduh siapa saja yang menginginkan tegaknya ajaran Islam sebagai radikal, intoleran dan tuduhan lain, lalu tak segan mempersekusi tokoh-tokohnya dan membubarkan organisasinya. Tidak ada lagi sikap dan narasi manis seperti yang mereka lakukan jelang Pemilu.

++++

Politisasi Islam atau politisasi agama secara umum tidak bisa dilepaskan dari cara pandang tentang relasi antara agama dan politik. Setidaknya ada tiga pola yang berjalan selama ini. *Pertama*: Islam dan politik terpisah jauh.

Antara Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Bahkan politik merupakan salah satu bentuk pengamalan Islam. Karena itu politik harus berdasar dan untuk kepentingan Islam. Bila politik diartikan sebagai pengaturan kehidupan rakyat, maka pengaturan itu harus berdasar Islam. Dalam keyakinan Islam, hanya bila masyarakat diatur dengan Islam akan tercipta kebaikan atau rahmat bagi semua.

Islam hanya ditempatkan dalam konteks hubungan individu dengan Tuhannya saja. Islam dianggap tidak punya kepentingan untuk memberikan arah pada pengaturan kehidupan rakyat karena bagi dia itu adalah masalah duniawi, sementara agama hanya konsern pada urusan ukhrawi.

Kedua: Islam diajak turut berperan, tetapi hanya pada masalah etika atau menjadi alat legitimasi ketika diperlukan. Dalam posisi ini, Islam tidak boleh terlibat terlalu jauh dalam urusan politik karena itu dianggap akan mengotori agama dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip kebhinnekaan. Dengan berperan seperti ini, agama dianggap akan tetap terjaga kesuciannya dan netral dari berbagai tarikan kepentingan politik.

Ketiga: Antara Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Bahkan politik merupakan salah satu bentuk pengamalan Islam. Karena itu politik harus berdasar dan untuk kepentingan Islam. Bila politik diartikan sebagai pengaturan kehidupan rakyat, maka pengaturan itu harus berdasar Islam. Dalam keyakinan Islam, hanya bila masyarakat diatur dengan Islam akan tercipta kebaikan atau rahmat bagi semua.

Pilihan pola kedua apalagi pola pertama jelas mengingkari esensi dari ajaran Islam. Ini akan membuat Islam bagai agama yang lemah dan tidak memiliki banyak guna. Padahal Islam itu sejatinya diturunkan justru untuk kepentingan mengatur hidup manusia di dunia. Politik yang digerakkan oleh elemen yang menganut pola ini tak akan membawa masyarakat ke arah yang dicita-citakan Islam. Bila tampak mereka membawa Islam atau mengajak unsur Islam, seperti banyak terlihat dewasa ini, justru itu merupakan bukti nyata dari politisasi Islam. Pasalnya, Islam hanya dimanfaatkan untuk meraih kepentingan politik. Setelah itu, Islam ditanggalkan.

Pilihan umat Islam pada pola pertama dan kedua inilah yang boleh disebut sebagai

pangkal dari kemunduran Islam dalam kancah politik, yang kemudian menjalar ke kemunduran di bidang-bidang lain. Pilihan ini pula yang membuat politisasi Islam yang dilakukan oleh berbagai kelompok politik bisa terus-menerus terjadi hingga sekarang. Parahnya, hal itu justru dinikmati oleh segelintir elit umat. Lalu ketika tujuan politik tercapai, itu dianggap sebagai “keberhasilan perjuangan”.

Maka dari itu, mestinya yang harus diambil adalah pola ketiga. Pola ini berkesesuaian dengan karakter Islam. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan antar manusia. Politik Islam berarti pengaturan urusan umat didalam dan luar negeri dengan hukum Islam. Sejarah membuktikan, Islam telah mengambil peran sangat nyata dalam perubahan-perubahan besar peradaban dunia, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks peran ketiga, secara pasti Islam akan berhadapan dengan tiga pertanyaan pokok. *Pertama:* Bagaimana Islam memosisikan atau melakukan penilaian terhadap masyarakat yang ada sekarang. *Kedua:* Gambaran tentang tatanan masyarakat ideal seperti apa yang dicita-citakan. *Ketiga:* Bagaimana perubahan masyarakat yang ada sekarang menuju masyarakat yang dicita-citakan itu akan dilakukan.

Salah satu kepentingan terbesar Islam sebagai sebuah *mabda'* adalah mengubah masyarakat sesuai dengan visi dan cita-citanya mengenai transformasi sosial. Tidak hanya Islam. Bahkan semua ideologi menghadapi suatu pertanyaan pokok, bagaimana mengubah masyarakat dari kondisi yang ada sekarang menuju pada keadaan yang lebih dekat dengan tatanan idealnya. Sebagai sebuah *mabda'*, Islam menderivasikan pemikiran-pemikiran sosialnya dari dalil-dalil untuk transformasi sosial menuju tatanan

menggunakan Islam sebagai dasar dalam berpolitik bukanlah politisasi Islam, melainkan islamisasi politik, yang saat ini justru makin tak diminati. Padahal ini merupakan kewajiban agung yang sangat mulia dan menjadi pangkal dari kebangkitan Islam di seluruh sektor kehidupan.

masyarakat islami.

Oleh karena itu, jelas bahwa realitas sosial dalam kaca mata Islam bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga diubah dan dikendalikan. Ini berakar pada misi ideologisnya, yakni cita-cita untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar pada masyarakat dalam kerangka mewujudkan nilai-nilai tauhidullah (mengesakan Allah). Tentu misi ini hanya mungkin bisa dilakukan ketika Islam ditempatkan pada pola ketiga.

Dengan demikian, menggunakan Islam sebagai dasar dalam berpolitik bukanlah politisasi Islam, melainkan islamisasi politik, yang saat ini justru makin tak diminati. Padahal ini merupakan kewajiban agung yang sangat mulia dan menjadi pangkal dari kebangkitan Islam di seluruh sektor kehidupan.

Alhasil, *Politisasi Islam No, Islamisasi Politik Yes!* □

JADILAH PENYELAMAT UMAT

Ratu Erma R.

Jika Anda merasa hidup kian sulit—sandang, pangan, papan, transportasi dan hajat hidup lainnya terasa mahal—maka itu akibat dari kapitalisasi hajat publik di sistem ekonomi kapitalis. Jika di depan-belakang Anda, samping kiri-kanan banyak kriminalitas, asusila dan sejumlah pelanggaran sosial lainnya, maka itu adalah buah dari liberalisasi budaya sistem demokrasi-liberal. Jika di layar TV, di lini masa media sosial Anda, bertabur fitnah terhadap Islam, kriminalisasi ulama, sandiwara politik dan sejenisnya, maka itu adalah politik oportunistis di sistem demokrasi.

Wajib disadari bahwa sekulerisasi agama dari kehidupan umat Islam melahirkan banyak kesulitan dan penyimpangan. Sistem ini memformat identitas Muslim dan umat Islam yang bertentangan dengan format syariah Islam, menyimpangkan fitrah, menjauhkan dari kebaikan.

Muslim dipaksa berlari mengikuti arus modernitas yang dibentuk tatanan sekular, seraya menanggalkan keislamannya. Jika tidak demikian, ia khawatir terasing dari pergaulan lingkungan modern. Faktanya, pada saat yang sama seorang Muslim merasakan *disorientasi*. Antara tujuan hidup hakiki dan apa yang ia alami tidak sejalan. Kerap disergap ketidakpuasan materi, kelelahan fisik dan kekacauan psikis, serasa hampa dari kesadaran ruhiah. Lingkungan tidak menopang dirinya untuk kembali pada fitrah alaminya, justru menjeratnya dengan kesalahan yang berulang.

Di sisi lain, umat Islam dalam pusaran peradaban post-modern hari ini gagap bersikap. Kebenaran dianggap tidak tunggal, bukan milik agama tertentu. Semua penganut agama berhak menyatakan kebenaran yang dia yakini seraya mengakui kebenaran yang diyakini orang lain.

Di tengah kehidupan majemuk umat dipaksa menanggalkan identitas ideologisnya, manut pada tatanan kapitalistik-liberalistik. Akibatnya, ia berada pada anak tangga terbawah peradaban. Diformat sesuai keinginan musuh. Dilabeli buruk tanpa pembelaan. Dimiskinkan. Direndahkan dalam peradaban materialis. Umat Islam menjadi bantalan politik oportunistis. Suaranya diperlukan untuk kekuasaan kapitalis, sekaligus menjadi pasar potensial untuk produk kapitalis. Hingga hari ini, meski disebut peradaban modern, tak tampak kebangkitan umat Islam. Karena itu tindakan penyelamatan umat Islam agar kembali pada identitas hakikinya sebagai *khayru ummah* adalah agenda urgen yang wajib diwujudkan.

Sadar Kewajiban

Memahami kewajiban *amar makruf nahi mungkar* (dakwah) adalah kunci penyelamatan umat Islam dan tragedi kemanusiaan. Setiap Muslim wajib terlibat dalam perubahan

tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah perintah Allah untuk tegaknya peradaban mulia. Setiap Muslim harus paham bahwa kewajiban dakwah sama dengan kewajiban shalat, shaum, zakat, haji dan sebagainya. Ini adalah kesadaran penting yang harus ada saat ini. Apalagi di tengah upaya kriminalisasi dakwah Islam. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

Siapa saja yang melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Jika belum bisa, cegahlah dengan mulutmu. Jika belum bisa, cegahlah dengan hatimu. Itulah pertanda lemah-lemah iman.

Peka Persoalan Umat

Muslim harus peka terhadap persoalan umat. Wajib punya kepedulian dan tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan mereka. Hari ini umat diatur oleh penguasa zalim yang menerapkan aturan kafur. Selama umat dalam cengkeraman mereka dan sistem sekular, maka penderitaan umat tidak akan pernah usai. Apalagi penguasa zalim itu juga kebanyakan dari kalangan Muslim. Mereka juga menjadi sasaran dakwah. Mereka wajib dinasihati. Dikoreksi kebijakannya yang menyalahi aturan Islam. Kepedulian kita terhadap urusan pengaturan umat hari ini adalah bagian dari kewajiban untuk menyelamatkan mereka. Tidak berdakwah untuk menghilangkan kezaliman di tengah umat akan mengundang musibah dan murka Allah. Rasulullah saw. bersabda, *“Perumpamaan mereka yang memelihara batas-batas agama Allah dengan golongan yang melanggarnya adalah seperti sebuah kapal yang dipenuhi penumpang di bagian atas dan bawahnya. Golongan yang di atas, ketika ingin mengambil air, mesti naik ke*

Muslim harus peka terhadap persoalan umat. Wajib punya kepedulian dan tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan mereka. Hari ini umat diatur oleh penguasa zalim yang menerapkan aturan kafur. Selama umat dalam cengkeraman mereka dan sistem sekular, maka penderitaan umat tidak akan pernah usai.

bagian atas kapal untuk mendapatkannya. Penumpang di bagian bawah berkata, ‘Lebih baik jika kita lubangi saja lantai kapal ini untuk mendapatkan air sehingga kita tidak lagi menyusahkan saudara-saudara kita di bagian atas.’ Jika para penumpang di atas tidak mencegah perbuatan mereka, maka mereka semua akan tenggelam. Jika mereka mencegah, mereka semua akan selamat.” (HR at-Tirmidzi).

Ambisi Terapkan Islam

Jadilah Muslim yang berambisi menerapkan hukum Allah di muka bumi. Syariah Islam telah diterapkan semasa Rasulullah saw. Dilanjutkan oleh kepemimpinan para *khalifah* pengganti beliau. Hal ini telah membawa kebaikan di sepanjang masa. Tak sulit menemukan gambaran kebaikan akhlak Muslim, keadilan penguasanya, ketenteraman, keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta kemuliaan

Nisa'

umat di banyak buku *tarikh*.

Allah SWT sebagai Pembuat hukum menyatakan dengan jelas bahwa Rasulullah saw. diutus sebagai *'rahmatan lil 'alamin'*. Setiap hukumnya memberikan solusi persoalan manusia. Dimana hukum syariah diterapkan, di sana ada kebaikan. Pemahaman ini menjadi motivasi Muslim untuk berkontribusi dalam upaya penegakan kembali syariah Islam sebagai pengatur urusan. Keyakinannya terhadap syariah Islam sebagai solusi menimbulkan ambisi kuat untuk berjuang demi penyelamatan umat.

Tidak Bekerja Sendiri

Menyelamatkan umat, mengembalikan mereka identitas hakikinya dan menempatkan pemimpin Muslim sebagai penguasa bumi dengan cara mengganti sistem kapitalis-sekular-demokrasi-liberal bukan tugas orang-perorang. Ia adalah tugas bersama umat, tugas

Menyelamatkan umat, mengembalikan mereka identitas hakikinya dan menempatkan pemimpin Muslim sebagai penguasa bumi dengan cara mengganti sistem kapitalis-sekular-demokrasi-liberal bukan tugas orang-perorang. Ia adalah tugas bersama umat, tugas kelompok umat. Kelompok ini wajib ada berdasarkan perintah Allah SWT (QS Ali Imran [3]: 104).

kelompok umat. Kelompok ini wajib ada berdasarkan perintah Allah SWT (QS Ali Imran [3]: 104).

Kelompok dakwah yang dibentuk Rasulullah saw. beserta aktivitasnya menjadi contoh riil upaya penerapan syariah Islam *kâffah*. Kelompok dakwah sekarang mesti mengambil perbuatan Rasul sebagai contoh dan menapaki jalan yang sama serta cara yang sama. Rasulullah tidak bekerja sendiri. Beliau mengajak yang lain untuk mendakwahkan Islam hingga akhirnya menegakkan Daulah Islam di Madinah. Sebab itu untuk menyelamatkan umat hendaknya bekerja dengan kelompok dakwah yang menyeru umat untuk menuntut penerapan Islam.

Demikianlah, perjuangan Islam demi penyelamatan umat menuntut adanya kesadaran akan kewajiban dakwah *amar makruf nahi mungkar*. Langkah ini bukan saja mendakwahkan hukum-hukum Islam, tetapi mengubah tatanan kehidupan dan melepaskan umat dari cengkeraman kezaliman penguasa.

Jalan perjuangan ini tidak sanggup dilewati sendiri, tetapi wajib bersama dengan kelompok yang menetapkan tujuan dan langkah yang sama.

Jalan ini penuh liku. Yang sanggup melintasi jalan ini adalah Muslim yang serius dan sungguh-sungguh mengabdikan dirinya, tenaga, pikiran, waktu dan hartanya untuk mengabdikan pada sang Khalik; Muslim yang ikhlas dan berani, sabar menerima ujian; Muslim yang *istiqamah* bekerja berdasar pada dalil syariah, yang hatinya terpaut dan jiwanya bergantung pada satu-satunya tempat bergantung, yaitu Allah SWT. Mereka adalah yang mengimani bahwa surga Allah itu tidak murah, mesti ditebus dengan sesuatu yang berharga. Jadilah bagian dari penyelamat umat, karena Anda akan selamat dunia – akhirat.

Wallâhu a'lam bi ash-shawwâb. □

DALIL THARIQAH MENEGAKKAN KHILAFAH

7 *thariqah* dakwah untuk menegakkan Khilafah mencakup tiga tahapan dakwah yang dipraktikkan oleh rasulullah saw. di Makkah hingga berhasil menegakkan Daulah Islam di Madinah. Secara global dalil-dalil tentang *thariqah* ini *qath'i* adalah sebagai berikut:

Rasul saw. menyeru orang-orang secara rahasia pada awal dakwahnya sekitar tiga tahun. Beliau membina kaum Muslim di Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam.

Kemudian beliau mengumumkan menyerukan dakwah secara terang-terangan setelah turun firman Allah SWT:

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

Karena itu sampaikanlah secara terang-terangan segala perkara yang telah diperintahkan kepada kamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik (TQS al-Hijr [15]: 94).

Ayat tersebut, secara *qath'i tsubût* dan *qath'i dilâlah*, menunjukkan bahwa Rasul saw., sebelum ayat tersebut turun, berdakwah secara rahasia. Lalu setelah ayat ini turun, beliau mengumumkan dakwah. Sejak itu beliau melakukan *ash-shirâ'u al-fikri* (pergolakan intelektual) dan *al-kifâhu as-siyâsi* (perjuangan politis) hingga akhirnya beliau melakukan *thalab an-nushrah*.

Saat melakukan *ash-shirâ'u al-fikri* beliau menjelaskan kebatilan ibadah menyembah

berhala. Beliau juga menegakkan *hujjah* atas orang-orang kafir. Ayat-ayat terkait hal itu banyak. Di antaranya:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)? (TQS ath-Thur [52]: 35).

﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ* وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا

تَعْمَلُونَ﴾

Ibrahim berkata, "Apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat itu? Padahal Allahlah Yang menciptakan kalian dan apa yang saja yang kalian perbuat." (TQS ash-Shafat [37]: 95-96).

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِمَّا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ

فِي آيَاتِي فَارْهَبُون﴾

Allah berfirman, "Janganlah kalian menyembah dua tuhan. Sungguh Dialah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu hendaklah kepada-Ku saja kalian takut." (TQS an-Nahl [16]: 51).

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا

لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Sekali-kali tidak ada pula tuhan (yang lain) beserta Dia. Kalau ada tuhan beserta Dia masing-masing tuhan itu akan membawa

mahluk yang dia ciptakan. Lalu sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Mahasuci Allah dari apa saja yang mereka sifatkan itu (TQS al-Mu'minin [23]: 91).

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ*
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

Katakanlah, "Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan Yang bergantung kepada Dia segala sesuatu. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia (TQS al-Ikhlâs [112]: 1-4).

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ* وَلَا
أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ*
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

Katakanlah, "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian. Untuk aku agamaku (TQS al-Kafirun [109]: 1-6).

Masih banyak ayat-ayat lainnya.

Adapun *al-kifâhu as-siyâsi* ditandai dengan ayat-ayat yang tururn yang membodoh-bodohkan mimpi mereka, klaim-klaim dan berbagai kesesatan mereka. Ayat-ayat dalam hal itu juga banyak. Di antaranya:

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي هَبٍ وَتَبَّ* مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا
كَسَبَ* سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ* وَأَمْرًائُهُ حَمَالَةٌ
الْحُطْبِ* فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ﴾

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah

berfaedah bagi dia harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut (TQS al-Masad [111]: 1-5).

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا
مَّمْدُودًا* وَبَيِّنَ شُهُودًا* وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا* ثُمَّ
يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ* كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا*
سَأَرْهِفُهُ صَعُودًا* إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ* فُقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ*
ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ* ثُمَّ نَظَرَ* ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ* ثُمَّ
أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ* فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ* إِنْ
هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ* سَأُصْلِيهِ سَقَرَ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا
سَقَرَ* لَا تُتَّبِعِي وَلَا تَتَّبِعِي* لَوَاحِئَهُ لِلبَشَرِ* عَلَيَّهَا
تِسْعَةَ عَشَرَ﴾

Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku sendiri telah menciptakan dirinya. Aku menjadikan bagi dia harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia. Aku pun melapangkan bagi dia (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya. Sekali-kali tidak. Sebab sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (al-Quran). Aku akan membebani dia dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang dia tetapkan. Karena itu celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermuka masam dan merengut. Kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, "(Al-Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dulu). Ini tidak

lain hanyalah perkataan manusia Aku akan memasukkan dia ke dalam Neraka Saqar. Tahukah kamu apakah Neraka Saqar itu? Neraka Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga) (TQS al-Muddatstsir [74]: 11-30).

﴿وَلَا تُطْع كُلَّ حَلَّافٍ مِّمِّينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ نَبِيبٍ *
مَنَاعٍ لِلْحَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُنْتَانَ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ * أَنْ
كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ * إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * سَنَسِفُهُ عَلَىٰ الْحُزْمِ﴾

Janganlah kamu mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Yang banyak mencela. Yang kian ke mari menghambur fitnah. Yang banyak menghalangi perbuatan baik. Yang melampaui batas lagi banyak dosa. Yang kaku kasar. Selain itu yang terkenal kejahatannya karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak. Jika dibacakan kepada dia ayat-ayat Kami, dia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala." Kelak akan Kami beri tanda dia di belalai-nya (TQS al-Qalam [68]: 10-16).

Masih banyak ayat-ayat lainnya.

Adapun *thalabu an-nushrah* dari *ahlul quwah wa al-man'ah* Rasul saw. minta dari kabilah-kabilah yang kuat. Beliau mengutus Mush'ab bin Umair ke Madinah dan kaum Anshar memberikan nushrahnya. Lalu terjadilah Baiat 'Aqabah II.

Berikutnya beliau menegakkan Daulah Islamiyah pertama di Madinah Munawarah.

Tiga tahapan ini didasarkan pada dalil-dalil yang *qath'i*. Akan tetapi, ada sebagian rincian dalam ketiganya yang diriwayatkan dengan riwayat *zhanni*. Misal rincian *tatsqif* (pembinaan) secara sembunyi-sembunyi. Rincian tentang pengumuman dakwah dan

Tiga tahapan ini didasarkan pada dalil-dalil yang *qath'i*. Akan tetapi, ada sebagian rincian dalam ketiganya yang diriwayatkan dengan riwayat *zhanni*. Misal rincian *tatsqif* (pembinaan) secara sembunyi-sembunyi. Rincian tentang pengumuman dakwah dan sebagian rincian tentang *ash-shirâ'u al-fikri* dan *al-kifâhu as-siyâsi*. Juga rincian tentang hijrah dan penegakan Daulah setelah Baiat Aqabah II. Sebagian rincian-rincian ini didasarkan pada dalil-dalil *zhanni* yang shahih.

sebagian rincian tentang *ash-shirâ'u al-fikri* dan *al-kifâhu as-siyâsi*. Juga rincian tentang hijrah dan penegakan Daulah setelah Baiat Aqabah II. Sebagian rincian-rincian ini didasarkan pada dalil-dalil *zhanni* yang shahih. Siapa saja yang men-*tadaburi* kitab-kitab dan dalil-dalil kami, niscaya dia memandang bahwa tiga tahapan tersebut dalil-dalilnya *qath'i*, dan sebagian rinciannya didasarkan pada dalil-dalil *zhanni* yang terpenuhi secara *istinbâth*. [Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah, 17 Syawal 1439 H/01 Juli 2018 M]

Sumber:

<http://hibz-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/53397.html>
<https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/843736222490117/?type=3&theater>
<https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/1uGundYMo8i>



LINTAS DUNIA

Samakan Muslimah Bercadar dengan Kotak Surat, Fenomena Bola Salju Islamofobia

Ada pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson dalam sebuah artikel di surat kabar *Daily Telegraph*. Ia mengatakan bahwa “para wanita Muslim yang mengenakan burqa (cadar) seperti “kotak surat”. Ia lalu menyamakan mereka dengan “para bandit bank”. Pernyataan ini dinilai sebagai fenomena bola salju Islamofobia.

“Mereka senantiasa memelihara dan menabur kebencian masyarakat Barat dan dunia terhadap Islam. Sementara itu, hinaan mereka atas hijab wanita Muslim hanya indikasi dari keberadaan bola salju kebencian yang begitu besar pada mereka,” kata aktivis Hizbut Tahrir Farah Ghazi seperti dilansir *hizb-ut-tahrir.info*, Kamis (10/8/2018).

Kata “mereka” yang dimaksud Farah Ghazi bukan hanya Inggris saja, namun juga Amerika Serikat, Prancis dan negara-negara Barat lainnya. Semuanya berada di belakang provokasi Islamofobia melalui pelabelan kaum Muslim dan Islam dengan “terorisme” dan “ekstremisme”.

Menurut Farah, kebencian dan permusuhan mereka terhadap kaum Muslim telah menyebabkan fenomena Islamofobia di dunia mewabah.

“Jika kami bertanya kepada sebagian besar dari mereka yang meyakini Islam sebagai ancaman terhadap mereka, apa yang mereka ketahui

tentang Islam, maka mereka akan menjawab dengan jawaban yang menunjukkan ketidaktahuan mereka,” bebenya.

Dalam hal ini, lanjut Farah, kaum kafir Barat telah memetik buah usahanya dalam mendistorsi Islam dan memutarbalikan fakta-fakta sebenarnya. Kadang-kadang mereka menggambarkan Islam sebagai agama penindasan dan ketidakadilan terhadap kaum Muslim dan orang-orang lemah, seperti kaum wanita dan anak-anak. Di lain waktu Islam diidentikkan dengan terorisme dan ekstremisme.

Seorang pemikir Amerika John Esposito mencoba untuk memantau permusuhan ini. Ia mengatakan, “Hal ini telah menjadi seperti memaksakan penutup kebodohan pada pandangan masyarakat Barat terhadap Islam dan peradabannya. Jadilah prototipe seorang Muslim yang sangat baik itu pada para peneliti di pusat penelitian menjadi satu kata, yaitu (teroris). Inilah yang membuat para peneliti harus berpikir mendalam untuk melihat fakta-fakta dan motif-motif sebenarnya di balik berbagai fenomena terorisme.”

Slogan Haji Tahun Ini Bagian dari Proses Sekularisasi

Slogan “Dunia di Jantung Kerajaan” sebagai identitas haji tahun ini, sebagaimana yang diumumkan oleh rezim Al-Saud, tidak bisa dilihat kecuali sebagai bagian dari proses sekularisasi.

“Tidak bisa dilihat kecuali sebagai bagian dari proses sekulerisasi dan kampanye kegilaan terhadap Islam, hukum-hukumnya dan tempat-tempat sucinya yang dilakukan oleh Putra Mahkota sebagai langkah cepat untuk memenuhi perintah majikannya, Amerika,” tegas aktivis Hizbut Tahrir Fatimah binti Muhammad, seperti diberitakan *hizb-ut-tahrir.info*, Rabu (8/8/2018).

Sebelumnya, Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengumumkan bahwa rezimnya berusaha untuk kembali ke “Islam moderat” dan “terbuka untuk dunia, semua agama, semua tradisi dan masyarakat”.

“Tampak bahwa identitas baru yang berisi konspirasi terhadap tempat-tempat suci yang paling disucikan kaum Muslim, dan menjadikannya di jantung usaha-usaha berdosa yang mengabadikan hegemoni kaum kafir Barat penjajah, dan melayani agendanya di wilayah yang tidak mengecualikan internasionalisasi ibadah haji, serta menjadikan dua tempat suci di bawah kendali internasional,” bebarnya.

Menurut Fatimah, para penguasa Al-Saud tidak peduli tentang tempat-tempat suci Islam. Mereka adalah orang pertama yang merusak dan melanggarnya. Mereka telah menghancurkan banyak monumen Islam dan situs bersejarah yang penting. Lalu di atasnya dibangun menara tinggi dan hotel mewah yang merendahkan Masjidil Haram dan Ka’bah.

“Pertanyaannya, apakah ini prestasi peradaban di dua tempat masjid suci, atau pelanggaran atas kesucian Ka’bah yang dilakukan oleh rezim Al-Saud?! Mereka tidak mempersiapkan untuk melayani para jamaah haji kecuali sebanyak uang yang mereka dapatkan dari para jamaah haji melalui hotel, transportasi dan pajak yang dibebankan pada para jamaah, serta berbagai tarikan dan pungutan ilegal terhadap para jamaah,” ungkapnya.

Tanpa Alasan, Syaikh Ismail Alwahwah Ditahan di Yordania

Kantor Media Hizbut Tahrir Australia menyatakan aktivis Hizbut Tahrir Australia Syaikh Ismail Alwahwah (Abu Anas) ditahan dengan cara kriminal oleh Direktorat Jenderal Intelijen Yordania (GID) di Bandara Internasional Queen Alia sejak Rabu 25 Juli 2018.

“Hingga sekarang sudah 10 hari beliau ditahan, tanpa dikenakan tuduhan apapun. Ismail belum juga diberikan penasehat hukum,” tulis rilis yang dilansir *Mediaumat.news*, Selasa (7/8/2018).

Ismail Alwahwah menderita beberapa penyakit komplikasi yang mengancam nyawanya. “Kami menganggap rezim Yordania bertanggung

jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kesehatannya,” tulis rilis tersebut.

Yordania memiliki catatan penindasan dan penyiksaan yang buruk. Banyak aktivis politik mendekam di penjara karena tidak adanya aturan hukum.

“Kami menyimpan kekhawatiran besar akan kondisi Ismail. Kejahatan yang harus dikutuk dengan keras adalah penahanan yang tidak adil terhadap Ismail, terlepas dari apa tuduhan yang mungkin atau yang tidak mungkin dari rezim Yordania yang diciptakan kemudian,” tegasnya.

Ismail Alwahwah adalah warga negara Australia. Selain itu ia mendapatkan suaka politik di Australia pada tahun 1997 karena tindakan keras yang ia hadapi di tangan rezim Yordania.

Oleh karena itu, pemerintah Australia harus melakukan segala upaya untuk mengamankan dengan segera pembebasan Ismail Alwahwah.

“Kegagalan untuk melakukan hal itu tidak hanya dianggap sebagai kelalaian, tetapi juga dianggap tidak lebih dari keterlibatan dengan rezim. Pasalnya, Australia mengakui dirinya sebagai pemasok dari tindakan represif yang dilakukan di luar hukum,” pungkask rilis tersebut.

Perdana Menteri Ethiopia: UEA Tak Layak Ajarkan Islam

Perdana Menteri Ethiopia yang baru terpilih Abiy Ahmed menghardik Mohammed bin Zayed al Nahyan, Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab, dalam perdebatan baru-baru ini tentang Islam dan Timur Tengah.

Saat berpidato pada komunitas Muslim Amerika-Ethiopia di Virginia selama perjalanan pertamanya ke Amerika Serikat pada tanggal 27 Juli, Ahmed mengatakan, Putra Mahkota menawarkan “untuk mengajari Islam kepada mereka”. Dia menjawab, hal itu tidak akan mungkin karena UAE telah “kehilangan agamanya.”

“Kita perlu belajar bahasa Arab dengan cepat. Jadi kita bisa lebih memahami agama dan

mengajarkannya kepada Anda, dan mengembalikan Anda kepada agama,” kata perdana menteri itu mengutip perkataannya kepada putra mahkota itu.

Seperti diberitakan *Hurriyat Daily News*, video pernyataan Abiy tersebut menjadi viral di media sosial Turki pada tanggal 31 Juli.

“Baik Ahmed maupun Nahyan tidak layak untuk berbicara tentang Islam,” ujar pengamat politik Dunia Islam Farid Wajdi, seperti dilansir *Mediaumat.news*, Selasa (7/8/2018).

Kemudian ia pun mengutip firman Allah SWT dalam QS an-Nisa ayat 60 (yang artinya): *Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah mengimani apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.*

Penculikan Tak Surutkan Perjuangan Penegakkan Khilafah di Pakistan

Delegasi Hizbut Tahrir mendesak Pemerintah Pakistan membebaskan dua aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Pakistan yang diculik sejak 15 hari lalu.

“Hizbut Tahrir menyerukan pembebasan segera Dr. Roshan dan Sister Romana. Mereka tidak melakukan kesalahan apa pun. Para



penguasa Pakistan harus tahu bahwa pengkhianatan mereka yang berkelanjutan dengan imbalan dolar Amerika tidak akan menyelamatkan mereka dari murka Allah SWT di dunia ini dan hukuman yang lebih besar di akhirat,” ujar delegasi HT, Rabu (15/8/2018) di Komisi Tinggi Pakistan di London, Inggris.

Delegasi juga menyatakan penculikan tidak akan menyurutkan perjuangan HT Pakistan dalam menegakkan khilafah.

“Penculikan dan penangkapan aktivis HT Pakistan yang terus berlangsung tidak akan menghalangi HT untuk melanjutkan perjuangan politiknya yang tanpa kekerasan dalam mengungkap sistem demokrasi yang korup dan berjuang untuk menegakkan kembali khilafah di Pakistan,” ujar delegasi HT, Rabu (15/8/2018) di Komisi Tinggi Pakistan di London, Inggris.

Pada tengah malam 30 Juli 2018, intelijen Pakistan menculik Dr. Roshan Hussein dan Romana di rumahnya di Karachi ketika keduanya sedang beristirahat. Penculikan ini menyusul penculikan-penculikan lain termasuk penculikan Juru Bicara HT Pakistan Naveed Butt pada 2011.

Menurut delegasi, penculikan-penculikan tersebut sebenarnya mengungkapkan kebangkrutan rezim baik secara politik dan intelektual karena gagal memenuhi tantangan politik Hizbut Tahrir. Sebaliknya, Pemerintah menggunakan taktik yang khas dari rezim diktator dan represif yang mengganggu dunia Muslim saat ini. **[Joko Prasetyo]**



KH Hafidz Abdurrahman: **ULAMA HARAM MENDUKUNG REJIM ZALIM**

Pengantar Redaksi

Pada ‘tahun politik’ ini, banyak ulama mendekati penguasa, atau sebaliknya, penguasa mendekati ulama. Bagaimana sebetulnya kondisi ini menurut pandangan Islam? Bolehkah ulama mendekati penguasa? Bagaimana pula seharusnya ulama menyikapi penguasa zalim?

Itulah di antara sedikit pertanyaan yang diajukan oleh *Redaksi* kepada KH Drs. Hafidz Abdurrahman, MA, kali ini. Berikut wawancara selengkapnya dengan beliau.

Kiai, bagaimana hubungan Islam dengan kekuasaan? Apakah bisa dipisahkan?

Islam dan kekuasaan tak dapat dipisahkan. Falsafah Islam menyatakan “*mazj al-mâdah bi*

ar-rûh” [mengintegrasikan materi dengan ruh]. Kekuasaan bersifat materi, sedangkan Islam sebagai dasar dan *ruh*. Karena itu Imam al-Ghazali menyatakan, “*Ad-Dîn uss[un] wa as-*

Hiwar

sulthânu hâris[un], fa mâ lâ ussa lahu mahdûm[un], wa mâ lâ hârisa lahu fadha'î. Artinya, agama adalah pondasi bangunan, dan kekuasaan adalah penjaganya. Bangunan yang tidak ada pondasinya pasti runtuh, dan yang tidak ada penjaganya, pasti akan lenyap.

Dalam ungkapan lain, Imam al-Ghazali menyatakan, *"Ad-Dîn wa as-sulthân taw'amani*". Maknanya, agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar.

Dengan demikian Islam tidak mengenal pemisahan agama dengan kekuasaan. Pemisahan agama dengan kekuasaan merupakan paham sekularisme yang jelas bertentangan dengan Islam. Sekularisme adalah akidah kufur.

Lalu bagaimana posisi ulama dalam kekuasaan?

Dalam masyarakat dan Negara Islam, Islam dijadikan sebagai dasar dan hukum positif, baik dalam kehidupan individu, masyarakat maupun negara. dalam sistem seperti ini, ulama mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Eksistensi ulama nyaris tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan.

Pada zaman keemasan Islam, sebut saja Khilafah Rasyidah yang pertama, mulai dari pejabat tertinggi, hakim hingga panglima militer, diisi oleh para ulama. Sebut saja Abu Bakar, ketika menjadi Khalifah, Umar bin al-Khatthab saat menjadi *wazir* [pembantu]-nya, Khalid bin al-Walid sebagai panglimanya. Begitu juga para khalifah setelah itu.

Namun demikian, Khilafah adalah sistem pemerintahan dan negara manusia, bukan malaikat. Karena itu, meski berbagai jabatan dipegang oleh para ulama, amar makruf nahi mungkar tetap dilakukan.

Tidak semua ulama berada dalam kekuasaan. Ada juga yang memilih tetap di luar kekuasaan. Semuanya merupakan pilihan. Meski demikian, harus dicatat bahwa Islam

tidak mengenal oposisi.

Sejauh mana fungsi ulama dalam melakukan muhâsabah terhadap penguasa yang zalim?

Amar makruf nahi mungkar adalah kewajiban seluruh kaum Muslim, baik terhadap sesama rakyat maupun penguasa. Bahkan kewajiban amar makruf nahi mungkar terhadap penguasa dilipatgandakan pahala dan kebaikannya karena dampak dan pengaruhnya yang luar biasa. Dalam riwayat Imam al-Hakim, Nabi saw. menyatakan, *"Penghulu para syuhada adalah Hamzah dan siapa saja yang berdiri di hadapan penguasa zalim, lalu menasihati penguasa tersebut, kemudian penguasa itu membunuh dirinya."*

Karena amar makruf nahi mungkar ini membutuhkan ilmu, maka tugas ini banyak diemban oleh para ulama. Apalagi para ulama hakikatnya adalah orang yang hanya takut kepada Allah. Karena itu, mereka selalu menjadi tokoh terdepan dalam melaksanakan amar makruf nahi mungkar, termasuk *muhâsabah* terhadap para penguasa.

Inilah yang dilakukan oleh para sahabat seperti Asma' binti Abu Bakar kepada Mu'awiyah, al-Hasan bin 'Ali dan Zubair bin al-Awwam terhadap Yazid bin Muawiyah. Juga *tâbi'in* seperti Said bin Jubair terhadap al-Hajjaj bin Yusuf, juga para ulama setelah beliau seperti Imam Ahmad bin Hanbal kepada al-Ma'mun, dan sebagainya. Mereka tak jarang harus berhadapan dengan penjara, bahkan kematian.

Apa ukuran yang bisa digunakan ulama untuk menilai bahwa penguasa sekarang ini zalim atau tidak?

Sebenarnya mudah. Lihat saja QS al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Dalam ketiga ayat ini, Allah menyebut penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah dengan predikat kafir, zalim dan fasik. Sama-sama tidak menerapkan

Hiwar

hukum Allah, tetapi statusnya berbeda. Ini menjadi *qarīnah* bahwa pembedanya adalah keyakinan mereka ketika menerapkan hukum kufur. Apakah mereka meyakinkannya atau tidak? Jika yakin bahwa hukum tersebut benar, maka statusnya kafir. Jika tidak maka ada kemungkinan zalim atau fasik.

Zalim dan fasik dibedakan. Orang zalim ketika melakukan maksiat masih memiliki rasa malu dan takut diketahui orang. Adapun orang fasik tidak memiliki rasa malu lagi dan takut kepada orang. Sebaliknya, ia bangga dengan kemaksiatannya.

Ini di satu sisi, terkait dengan hak Allah. Di sisi lain, terkait dengan hak manusia, kezaliman itu jelas sekali, ketika penguasa itu tidak mengurus rakyatnya; tidak memenuhi hak-haknya seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, keamanan, termasuk keyakinan agamanya. Apalagi ketika penguasa itu merampas hak-hak rakyatnya dan bahkan menindas mereka; menerapkan hukum tidak adil dan tebang pilih; mengkriminalisasi ajaran Islam, ulama; dan membubarkan organisasi dakwah. Semua ini bukti kezaliman penguasa yang kasatmata.

Lalu bagaimana seharusnya ulama bersikap terhadap rezim Jokowi sekarang?

Sikap ulama seharusnya menjaga jarak dengan rezim yang terbukti zalim. Apalagi ketika rezim ini sudah lemah dan nyaris jatuh. Keberadaan ulama yang mempunyai jamaah di belakangnya bisa menjadi sandaran kekuasaan rezim. Diharapkan akan bisa mempertahankan rezim. Ketika rezim ini hendak mengikuti kontestasi dalam Pemilu, keberadaan ulama dalam barisan mereka menjadi semacam pendorong mobil mogok. Mereka akan dicampakkan setelah kontestasi ini selesai.

Allah SWT sudah mengingatkan dalam QS Hud ayat 112 (yang artinya), *"Janganlah kalian*

cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kalian disentuh api neraka, sedangkan kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kalian tidak akan diberi pertolongan.

Bagaimana dengan adanya anggapan bahwa rezim Jokowi sekarang lebih dekat dengan ulama karena sering mengundang ulama ke Istana, sering kunjungan ke Pesantren dll?

Dekat dengan ulama itu tidak bisa dilihat dari satu kacamata kelompok tertentu, tetapi harus dilihat secara utuh. Ketika dekat dengan ulama kelompok tertentu, sebut saja ulama NU, tetapi memusuhi ulama lain yang dianggap tidak sejalan dengan dia, maka kedekatan dengan ulama tertentu ini justru harus dimaknai sebagai strategi politik belah bambu. Yang satu diinjak, yang satu diangkat.

Strategi ini harus diwaspadai oleh umat Islam yang menjadi basis massa para ulama itu. Jika umat dan ulama terjebak dalam skenario ini, maka mereka akan menjadi korban. Bukan hanya mereka, karena mereka ini menjadi tulang punggung Indonesia, maka yang menjadi korban adalah Indonesia. Penjajahan, penjarahan, pemiskinan, pembodohan dan sebagainya adalah dampak yang tidak bisa dilepaskan dari skenario ini.

Bagaimana pula dengan yang mengatakan bahwa rezim sekarang merupakan *ulil amri* sehingga wajib ditaati?

Ulil amri memang wajib ditaati. Namun, konteks ketaatan ini dijelaskan dalam QS an-Nisa' ayat 59. Ayat ini menyatakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu mutlak. Sebaliknya, ketaatan kepada *ulil amri* itu dibatasi. Ada syaratnya. Syaratnya, *ulil amri* itu harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan

Hiwar

menerapkan hukum Islam. Itu syaratnya. Pada saat itu, *ulil amri* ini wajib ditaati.

Jika tidak, berarti *ulil amri* itu maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks itu, kata Nabi saw., sebagaimana riwayat Imam Ahmad, “*Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Al-Khaliq [Allah].*”

Selain itu, QS Hud ayat 112 di atas juga menjadi dasar penyikapan terhadap ahli maksiat.

Inilah ketentuan hukum syariahnya. Itulah mengapa ulama pada masa lalu mengambil jarak dengan kekuasaan yang zalim dan terus-menerus mengingatkan para penguasa zalim meski mereka hidup dalam sistem Islam.

Bagaimana dengan narasi yang dibangun, jangan menjelek-jelekkan penguasa sekarang?

Saat ini banyak orang yang keliru dalam melihat dan mendudukan fakta. Mereka tidak mempunyai standar yang jelas dan benar. Misalnya, siapa saja yang mengkritik penguasa kaum Muslim dianggap Khawarij. Ini kesimpulan ngawur, dan bukan hukum fikih, melainkan analogi generalisasi [*qiyâs syumûl*]. Logika mereka, “Khawarij adalah kelompok yang menentang penguasa yang sah. Jadi siapa saja yang mengkritik penguasa yang sah, dia Khawarij.”

Sama dengan analogi mengoreksi [*muhâsabah*] dengan menjelek-jelekkan. *Muhâsabah* itu adalah kewajiban syariah. Dibangun berdasarkan kaidah dan hukum syariah tentang amar makruf nahi mungkar. Bahkan lahir dari cinta [*mahabbah*]. Tujuannya untuk menolong [*nushrah*]. Dasarnya antara lain Hadis Nabi saw. dalam riwayat Imam al-Bukhari, “*Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun dizalimi.*” Ada yang bertanya, “*Bagaimana menolong yang zalim?*” Jawab Nabi saw., “*Dengan menghentikan kezalimannya.*”

Mungkin saja *muhâsabah* disertai dengan mengemukakan berbagai kejelekan kebijakan penguasa. Namun, semua itu agar mereka dan umat menyadari dampak kebijakan yang ada, agar dihentikan, dan diubah, kemudian diterapkan kebijakan yang benar. Ini juga bagian dari prinsip dakwah, yaitu *al-hadmu wa al-binâ'* [meruntuhkan yang salah dan membangun yang benar].

Bagaimana dengan kaidah yang digunakan seperti akhaf adh-dharurayn atau ahwan asy-syarrayn untuk melegalkan rezim sekarang?

Dalam konteks ini, Ibn Taimiyyah menjelaskan, “*Tidak boleh menolak kerusakan kecil dengan kerusakan yang besar. Juga tidak boleh menolak dua bahaya yang lebih ringan dengan mendatangkan dua bahaya yang lebih besar. Syariah telah mendatangkan dan menyempurnakan kemaslahatan serta mengururkan dan meminimalisir kerusakan sesuai dengan kadar kemampuan. Perintahnya adalah: Memenangkan satu dari dua kebaikan jika tidak mungkin didapatkan dua-duanya. Menolak satu dari dua keburukan jika tidak mungkin menolak keduanya sekaligus.*” (Ibn Taimiyyah, *Majmû' al-Fatawa*, XXIII/343).

Banyak pihak yang tidak berjuang dengan sungguh-sungguh mengubah rezim yang fasik dan zalim, kemudian tiba-tiba menggunakan kaidah ini, demi keuntungan pribadi atau kelompoknya. Padahal keberadaan rezim tersebut justru merupakan kerusakan atau bahaya yang lebih besar. Jadi, kaidah ini tidak tepat digunakan dalam konteks ini, yang justru malah sebaliknya.

Apa bahaya bagi umat dan negara kalau ulama justru mendekati penguasa dan melegalkan kezalimannya?

Bahayanya justru melanggengkan keburukan

Hiwar

dan kerusakan yang lebih besar. Sumber keburukan dan kerusakan yang lebih besar itu adalah rezim zalim itu. Lihat saja, misalnya, dalam waktu 4 tahun, hutang menggunggung, BUMN dijual kepada asing-aseng, angka kemiskinan semakin memprihatinkan, narkoba, pembunuhan, dll. Bahkan yang lebih mengerikan adalah kriminalisasi ajaran Islam, ulama dan organisasi dakwah.

Apa yang tidak boleh dilakukan ulama terhadap penguasa?

Tidak boleh menjadi stempel kekuasaan yang buruk dan bertentangan dengan Islam. Tidak boleh menjadi alat penguasa untuk memecah-belah umat. Tidak menggadaikan agamanya untuk kepentingan diri sendiri dan penguasa jahat. Itu di antaranya.

Dalam riwayat ath-Thabarani dan ad-Dailami, Nabi saw. menyatakan, *"Janganlah kalian mendekati pintu penguasa karena ia benar-benar menjadi berat dan menghinakan."*

Imam Ja'far ash-Shadiq ra. juga menyatakan, *"Para fuqaha' adalah orang-orang amanah [di mata] Rasul. Jika kalian melihat fuqaha' telah condong kepada para penguasa, maka curigailah mereka."*

Karena itu pada masa lalu para penguasa itulah yang mendatangi para ulama, bukan ulama mendatangi istana mereka. Ini juga untuk menunjukkan akhlak dan adab mereka kepada para ulama yang merupakan pewaris Nabi saw., dan orang-orang yang dipercaya Rasul, menjadi penyambung lidah mereka.

Bagaimana dengan anggapan bahwa ulama harus menasihati penguasa secara sembunyi tidak boleh secara terbuka?

Menasihati penguasa dengan sembunyi-bunyi bukan satu-satunya cara. Pasalnya, ada hadis lain yang juga memerintahkan menasihati mereka secara terbuka. Bahkan itu

dipraktikkan oleh para sahabat, *tâbi'in*, *atbâ' tâbi'in* dan generasi setelah mereka. Karena itu hadis menasihati penguasa dengan sembunyi-sembunyi harus dimaknai sebagai salah satu cara [*uslûb*], bukan satu-satunya. Jangan itu seolah-olah merupakan metode baku [*tharîqah*].

Lalu bagaimana umat menyikapi ulama yang menjilat kepada kekuasaan jahat?

Pertama, mereka jelas bukan ulama yang hanya takut kepada Allah. Sebaliknya, mereka adalah orang munafik. *Kedua*, jangankan menjilat, condong dan mendekati pintu mereka saja dilarang oleh Nabi saw. *Ketiga*, sebagaimana penjelasan Imam Ja'far, terhadap ulama seperti itu hanya ada satu sikap, "patut dicurigai". Dengan begitu, berarti keadilannya hilang. Jika keadilannya hilang, maka tidak boleh mengambil ilmu dari mereka.

Itulah yang diingatkan Ibn Sirin, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, *"Ilmu ini agama. Karena itu periksalah dari siapa kalian mengambil agama kalian."*

Terakhir. Apa yang harus dilakukan ulama dalam perjuangan penegakan Khilafah?

Harus berdiri di garda terdepan. Ilmu mereka mengharuskan untuk itu. Mereka orang yang paling tahu tentang kewajiban menegakkan Khilafah; tahu bagaimana sistem Khilafah serta dampaknya ketika ada dan tiada. Jika mereka tidak berjuang untuk menegakkan Khilafah, artinya itu menyalahi ilmunya.

Cukuplah, peringatan Nabi saw, sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawi, dalam kitab *Al-Majmû' Syarh al-Muhaddzab*, *"Orang yang paling keras azabnya pada Hari Kiamat, adalah orang alim yang ilmunya tidak bermanfaat."* *Fal iyâdzu billâh.* []



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

ADAKAH KRIMINALISASI ULAMA DI ERA KHILAFAH?

Soal:

Benarkah pada era Khilafah Islam terjadi kriminalisasi terhadap ulama? Jika tidak benar, bagaimana konteksnya?

Jawab:

Sebelum menjelaskan realitas sejarah hubungan para ulama dengan kekuasaan, maka harus dipahami bahwa Khilafah adalah:

رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ لِّجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَالَمِ لِتَطْبِيقِ
الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَحَمْلِ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَى
الْعَالَمِ

Khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. ¹

Karena Khilafah merupakan kepemimpinan bagi seluruh kaum Muslim di seluruh dunia, maka Khilafah bukan hanya milik seorang khalifah, tetapi milik para ulama dan seluruh kaum Muslim. Tujuan Khilafah, sebagai *zhillullâh* [bayangan Allah] di muka bumi, adalah untuk menerapkan seluruh hukum Allah, dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya itu, Khilafah juga mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dalam rangka

menerapkan hukum Allah ke luar negeri. Itulah misi Khilafah, sebagai negara yang diwariskan oleh Rasulullah saw.

Dalam mewujudkan misi dan tujuannya itu, Khilafah tidak bisa sendiri. Ia ditopang oleh masyarakat dan individu. Semuanya ini bagian dari politik Islam, sebagai satu kesatuan. Itu tampak dari fakta politik:

السياسة هي رعايته شؤون الأمة داخلياً وخارجياً،
وتكون من قبل الدولة والأمة فالدولة هي التي
تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي
تحاسب بها الدولة.

Politik adalah mengurus urusan umat, baik di dalam maupun luar negeri, yang dilakukan oleh negara dan umat. Negara adalah pihak yang mengurus langsung secara praktis pengurusan [urusan umat] ini, sedangkan umat adalah pihak yang mengoreksi negara dalam pengurusannya. ²

Karena itu Islam tidak mengenal dikotomi “agamawan” dan “negarawan”. Pasalnya, baik ulama maupun penguasa kaum Muslim sama-sama menjalankan aktivitas politiknya masing-masing. Penguasa, dengan kekuasaannya, melaksanakan tugas mengurus urusan umat secara langsung, dengan menerapkan hukum

Islam, dan mengemban dakwah ke luar negeri. Adapun rakyat, baik ulama maupun bukan, melaksanakan tugas mengoreksi negara dalam melaksanakan tugas mengurus urusan mereka. Semuanya itu merupakan satu-kesatuan system. Ini sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi saw.:

مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ
اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا،
وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا إِذَا
اسْتَقْرَأَ مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ
أَنَا حَرَقْنَا فِي نَصِينَا حَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا؟ فَإِنْ
تَرَكَوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا وَهَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ
أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَّوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا

Perumpamaan orang yang terikat dengan hukum Allah adalah seperti orang yang mengundi tempat duduknya di atas kapal. Sebagian mendapatkan tempat di atas. Sebagian yang lain di bawah. Orang yang mendapat bagian di bawah, jika membutuhkan air, pasti akan melewati orang yang ada di atasnya. Lalu mereka berkata, "Kalau saja kita lubangi tempat kita sendiri, maka kita tidak akan menyusahkan orang yang di atas kita." Jika yang lain membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, maka dia akan celaka, dan semua juga akan celaka. Namun, jika mereka mencegah tangan orang itu melakukannya, maka dia akan selamat, dan mereka semuanya juga akan selamat (HR al-Bukhari).

Iniilah gambaran sistem Islam. Karena itu, baik yang memegang kekuasaan maupun rakyat dan ulama yang di luar kekuasaan, dalam pandangan Islam, merupakan satu kesatuan. Maka dari itu di dalam Islam pun tidak ada

kelompok oposisi. Meski demikian, tidak berarti dengan begitu tidak ada lagi *check and balance*. Tentu tidak. Pasalnya, menerapkan Islam secara praktis dan sempurna adalah kewajiban penguasa, sementara rakyat mengoreksi pelaksanaannya. Dua-duanya hukumnya wajib.

Selain itu, di dalam sistem Khilafah, ada mekanisme *check and balance* yang dilakukan oleh kekuasaan, baik melalui Majelis Umat, Mahkamah Mazalim sampai partai politik. Di luar itu, rakyat—baik ulama maupun non-ulama—mempunyai peranan untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan negara. Karena para ulama adalah orang yang paling mengerti hukum syariah tentang pengurusan urusan umat, maka mereka berada di garda terdepan dalam mengoreksi kebijakan negara, yang dianggap menyalahi hukum syariah, zalim atau merugikan kepentingan publik.

Namun demikian, yang harus diingat, Khilafah bukanlah negara teokrasi [*dawlah uluhiyyah*], tetapi negara manusia [*dawlah basyariyyah*]. Para Khalifah dan pembantunya bukanlah malaikat. Mereka manusia biasa. Karena itu mereka bisa bersalah. Negara Khilafah juga tidak *ma'shûm* [bebas dari kesalahan]. Namun, karena mekanisme amar makruf nahi munkar ditegakkan, begitu juga dakwah Islam dilaksanakan, maka kesalahan-kesalahan manusiawi itu bisa diselesaikan, diatasi dan ditutupi.

Itulah mengapa, sejarah Khilafah dipenuhi dengan berbagai sikap ulama yang selalu kritis terhadap kekuasaan, bukan karena oposan, tetapi karena keinginan kuat agar sistem Khilafah ini tetap *on the track*. Tidak keluar dari jalurnya. Muawiyah, sahabat Nabi saw. yang juga mujtahid, saat menjadi Khalifah, kebijakannya dikoreksi oleh Abu Muslim al-Khulani di depan publik, karena dianggap salah dalam pembagian *ghanîmah*. Kritik Abu Muslim yang keras itu dibalas dengan

Soal Jawab

kemarahan. Muawiyah pun menghilang. Ia masuk ke rumah, mandi, lalu keluar menemui khalayak, dan mengatakan, “Abu Muslim benar.” (HR Abu Nu’aim).³

Sufyan at-Tsauroi juga mengkritik Khalifah al-Mahdi karena penggunaan dana Baitul Mal yang digunakan untuk haji, yang dia tidak tahu jumlahnya. Kata Sufyan, “Apa alasanmu kelak ketika di hadapan Allah tentang itu?” Saat pembantu Khalifah hendak membela dia, Sufyan mengingatkan, “Diam kamu! Fir’aun itu benar-benar binasa karena Haman dan Haman binasa karena Fir’aun.”⁴

Karena kritik keras yang dilakukan oleh Syaikh ‘Abdul Qadir al-Kailani kepada Khalifah al-Muqtafi bi Amrillah, karena telah mengangkat Yahya bin Sa’id, yang terkenal dengan nama Ibn al-Muzahim, dan dikenal zalim, sebagai hakim [*qâdhi*], “Kalaulah ada kezaliman orang yang paling zalim ditimpakan kepada kaum Muslim, lalu apa yang kelak akan

kamu katakan kepada *Rabb* semesta alam, yang Mahakasih?” Dia langsung bangkit dan memecat Ibn al-Muzahim.⁵

Para ulama pada masa Khilafah juga menjadi tempat rujukan para penguasa. Jawaban mereka pun tegas dan jelas. Hathith bin az-Ziyat, pernah ditanya oleh al-Hajjaj bin Yusuf, tentang dirinya. Dengan tegas Hathith menjawab, “Kamu adalah musuh Allah di muka bumi.” Bahkan ketika ditanya tentang Khalifah ‘Abdul Malik, “Dia lebih durjana daripada kamu. Kamu adalah salah satu kesalahannya.” Jawaban-jawaban pedas Hathith itu akhirnya mengantarkan beliau menjadi syahid.⁶

Hal yang sama juga dialami oleh Imam Ahmad. Beliau syahid di tangan al-Ma’mun. Hanya perlu dicatat, kasus-kasus seperti ini hanyalah *human error*, yang dilakukan manusia, karena tidak maksum.

Dari segi hukum, tindakan para penguasa itu jelas salah karena menyalahi hukum syariah. Betapapun kerasnya kritik yang dilakukan terhadap dirinya. Pasalnya, kritik tersebut merupakan bentuk aktivitas politik yang wajib dilakukan oleh para ulama sebagai bagian dari amar makruf nahi mungkar.

Karena itu, faktor ketakwaan masing-masing, baik penguasa maupun ulama, termasuk rakyat, ikut menentukan lurus dan tidaknya sistem pemerintahan ini. Sebagai contoh, al-Mahdi pernah disarankan oleh ar-Rabi’ untuk membunuh Sufyan at-Tsauroi karena dianggap lancang kepada sang Khalifah. Jawaban sang Khalifah, “Celaka kamu. Apakah orang seperti ini dan selevel dengan beliau kita bunuh, yang justru akan membuat kita merana untuk kebahagiaannya. Tulis untuk dia sebagai *Qâdhi* Kufah.”⁷

Tindakan al-Mahdi ini lahir dari ketakwaannya. Dia yakin, dengan membunuh ulama, justru membuat dirinya merana seumur hidup. Adapun ulama yang dibunuh justru

Dari segi hukum, tindakan para penguasa itu jelas salah karena menyalahi hukum syariah. Betapapun kerasnya kritik yang dilakukan terhadap dirinya. Pasalnya, kritik tersebut merupakan bentuk aktivitas politik yang wajib dilakukan oleh para ulama sebagai bagian dari amar makruf nahi mungkar.

mendapatkan kebahagiaan karena syahid bersama keyakinannya.

Namun, ketika faktor ketakwaan itu tidak ada, maka para penguasa itu akan melakukan penyimpangan demi penyimpangan. Menutup mata, telinga bahkan hati dari nasihat sekalipun nasihat itu tulus diberikan. Inilah yang terjadi pada al-Hajjaj bin Yusuf. Begitu juga ulama yang tidak mempunyai ketakwaan. Alih-alih melakukan amar makruf nahi mungkar kepada penguasa, justru sebaliknya, menjadi penjilat. Sebagaimana kisah pengkhianatan Wazir al-Qumi dan at-Tusi, di era Khilafah 'Abbasiyyah.

Selain faktor ketakwaan, ada faktor lain: perbedaan paham dan fanatisme mazhab. Faktor perbedaan paham dan fanatisme mazhab ini berbahaya ketika menimpa penguasa. Bisa menyeret negara menjadi negara mazhab dan mazhab lain yang berbeda dengannya akan diberangus. Inilah yang terjadi pada Khalifah al-Ma'mun dan al-Mu'tashim. Keduanya menganut paham Muktazilah. Keduanya memenjarakan ulama sekelas Imam Ahmad.

Karena itu, ketika Khilafah Rasyidah yang kedua kelak berdiri dalam waktu tidak lama lagi, dengan izin dan pertolongan Allah, pondasi ketakwaan mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Baik pada individu, masyarakat maupun negara. Khilafah juga bukan negara kelompok, suku, bangsa atau mazhab tertentu. Khilafah akan mengayomi dan menyatukan semua kelompok, suku, bangsa, mazhab, bahkan agama dalam naungannya. Dengan begitu, perbedaan kelompok, suku, bangsa, mazhab dan agama tidak bisa memicu terjadinya konflik vertikal maupun horizontal.

Selain itu, ada peranan yang berbeda, baik di dalam maupun di luar kekuasaan, tetapi misi dan tujuannya sama, yaitu mengurus urusan umat, dengan menerapkan hukum syariah secara murni dan konsekuen. Mereka yang di

Karena itu, ketika Khilafah Rasyidah yang kedua kelak berdiri dalam waktu tidak lama lagi, dengan izin dan pertolongan Allah, pondasi ketakwaan mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Baik pada individu, masyarakat maupun negara. Khilafah akan mengayomi dan menyatukan semua kelompok, suku, bangsa, mazhab, bahkan agama dalam naungannya. Dengan begitu, perbedaan kelompok, suku, bangsa, mazhab dan agama tidak bisa memicu terjadinya konflik vertikal maupun horizontal.

luar kekuasaan tidak memposisikan dirinya sebagai oposisi, tetapi pengontrol jalannya pemerintahan. Karena itu keduanya justru saling menguatkan. Dengan begitu, betapapun kerasnya kritik, tidak akan dikriminalisasi karena itu merupakan kewajiban yang harus ditegakkan. Adapun apa yang terjadi dalam sejarah, itu tak lebih dari kesalahan manusia [*human error*].

Wallâhu a'lam. []

Catatan kaki:

- ¹ Dr. Mahmud Al-Khalidi, *Qawâ'id Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*, hlm. 226; al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzam al-Hukmi fi al-Islam*, hlm. 34.
- ² Al-'Allamah Syaikh 'Abdul Qadim Zallum, *Afkar Siyasiyyah li Hizb at-Tahrir*, hlm...
- ³ Al-Hafidz Abu Nu'aim, *Hilyatu al-Auliya'*; al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, V/70.
- ⁴ Al-'Allamah Syaikh 'Abdul 'Aziz al-Badri, *al-Ulama' Baina al-Hukkam*, hlm. 73.
- ⁵ Al-'Allamah Syaikh 'Abdul 'Aziz al-Badri, *Ibid*, hlm. 76.
- ⁶ Al-'Allamah Syaikh 'Abdul 'Aziz al-Badri, *Ibid*, hlm. 86.
- ⁷ Al-'Allamah Syaikh 'Abdul 'Aziz al-Badri, *Ibid*, hlm. 85.

FREEPORT DAN KUATNYA PENJAJAHAN EKONOMI DI INDONESIA

Kasus Freeport kembali menjadi polemik. Terutama setelah Presiden Jokowi menyatakan bahwa *Holding* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang PT Inalum telah mencapai kesepakatan dengan Freeport McMoran soal akuisisi saham 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Dengan adanya kesepakatan ini, Indonesia akan menguasai 51 persen saham Freeport yang beroperasi di Papua. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu.

Pernyataan ini dianggap pencitraan yang kelewatan. Faktanya, divestasi tersebut hanya baru penawaran saja, terlalu mahal dan dibiayai dari utang.

Jalan Panjang Divestasi Saham

PT Freeport masuk ke Indonesia bermodalkan perjanjian kontrak karya pada 7 April 1967 yang dikenal dengan Kontrak Karya (KK) I. KK I tahun 1967 ini memberikan hak kepada Freeport Sulphur Company (sekarang Freeport-McMoRan) melalui anak perusahaannya, yaitu Freeport Indonesia Incorporated, sebagai kontraktor tunggal dalam mengeksplorasi, eksplorasi serta memasarkan tembaga lainnya selama 30 tahun di luas lahan

konsesi 10 ribu hektar di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Namun, karena ada temuan cadangan emas terbesar di Grasberg, maka pada 1991 Freeport memperbarui kontrak karya. Kontrak karya jilid II ditandatangani pada 1991. Pada KK kedua disepakati masa berlaku kontrak karya 30 tahun dengan periode produksi berakhir pada 2021, serta kemungkinan perpanjangan dua kali 10 tahun atau baru akan berakhir pada 2041.

Pada KK jilid kedua inilah muncul keharusan Freeport-McMoRan untuk mendivestasikan atau menjual 51 persen sahamnya kepada Pemerintah secara bertahap dalam kurun waktu 20 tahun sejak kontrak karya ditandatangani atau paling lambat pada 2011, sesuai Pasal 24 Kontrak Karya 1991 antara Freeport-McMoRan dengan Pemerintah. Ironisnya Freeport-McMoRan merasa tidak memiliki kewajiban untuk melakukan divestasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Karya 1991. Sebab, pada 1994, Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang mengizinkan kepemilikan saham 100 persen oleh asing dan kewajiban divestasi dilakukan setelah 15 tahun berproduksi.

Selain itu, PP ini juga menyatakan perusahaan penanaman modal asing (PMA)

tidak wajib mendivestasikan sahamnya kepada pihak Indonesia. PP ini pun menjadi payung teduh bagi Freeport. Selain itu, klausul dalam Kontrak Karya jilid II 1991 menyebutkan jika ada dua pasal yang isinya bertabrakan, maka PMA bisa memilih peraturan yang lebih menguntungkan. PP ini dijadikan tameng berkelit FCX untuk segera mendivestasikan 51 persen saham PT FI kepada Pemerintah Indonesia.

Lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang juga mengatur masalah divestasi saham, juga tak dihiraukan oleh FCX. Pasal 112 Ayat 1 menyatakan, setelah lima tahun berproduksi, badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta nasional. Jika dihitung sejak aturan ini terbit, maka pada 2014, sebanyak 51 persen saham Freeport Indonesia sudah bisa didivestasikan kepada perusahaan atau perorangan nasional.

Namun, Pasal 169 UU yang sama juga menyebutkan, kontrak karya dan perjanjian perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Ini artinya, Pemerintah mengakui kontrak karya yang dibuat bersama FCX pada 1991. Ini yang menimbulkan kontradiksi, ketentuan mana yang harus dipatuhi. Untuk dapat menjalankan amanah pasal 112 UU Nomor 4 ini, maka terlebih dulu harus dilakukan perubahan terhadap kontrak karya.

Tahun 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara agar tetap dapat menjalankan divestasi saham.

Pasal 97 PP ini menyebutkan pemodal asing pemegang (Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah lima tahun sejak produksi wajib melakukan divestasi saham. Dengan itu sahamnya paling sedikit 20 persen dimiliki oleh peserta Indonesia. PP ini kemudian diubah dan dikuatkan lagi menjadi PP Nomor 24 Tahun 2012 dan PP Nomor 77 Tahun 2014. PP ini mengatur rincian divestasi antara lain: pada tahun keenam divestasi saham sebesar 20 persen, tahun ketujuh divestasi saham sebesar 30 persen, tahun kedelapan 37 persen, tahun kesembilan 44 persen dan tahun kesepuluh 51 persen dari jumlah seluruh saham.

Pada Era Jokowi kembali mencuat isu divestasi saham. Pada 27 Agustus 2017, para menteri Jokowi mengklaim sudah berhasil membuat kesepakatan terkait hasil negosiasi dengan Freeport, kemudian dijelaskan tiga kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan Freeport antara lain:

1. Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia.
2. Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar.
3. Freeport Indonesia sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK).

Berdasarkan Kesepakatan di atas, dibuatlah Heads of Agreement (*HoA*) pada tanggal 12 juli 2018. Isinya menyatakan bahwa Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang PT Inalum telah mencapai kesepakatan dengan Freeport McMoran soal akuisisi saham 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Meskipun demikian, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana sudah mengingatkan Heads of

Iqtishadiyah

Agreement (HoA) yang ditandatangani oleh Inalum, Freeport McMoran dan Rio Tinto pada Kamis (12/7/2018) menyisakan permasalahan terkait dengan status HoA dan harga pembelian. “Menurut Menteri BUMN pada konferensi pers dinyatakan HoA mengikat. Sementara dalam rilis dari laman London Stock Exchange disebutkan bahwa Rio Tinto melaporkan HoA sebagai perjanjian yang tidak mengikat (*non-binding agreement*). Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan, adanya kesepakatan HoA bukan berarti 51% saham Freeport sudah bisa dikuasai. Sebab, HoA sifatnya tidak mengikat dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Freeport dan Penjajahan Ekonomi

Sejak Kontrak Karya “generasi pertama” ini, PT Freeport sudah mendapat keistimewaan dari Pemerintah. Pemerintah membolehkan Freeport menikmati masa bebas pajak selama tiga tahun, konsesi pajak sebesar 35 persen selama tujuh tahun berikutnya, serta pembebasan segala macam pajak ataupun royalti selain lima persen pajak penjualan. Kondisi ini tidak ada perubahan signifikan sampai saat ini. Bahkan Freeport seolah-olah perusahaan yang kebal hukum.

Sebelum kasus disvestasi muncul, juga terjadi polemik terkait tunggakan pajak PT Freeport. Polemik ini muncul setelah Hakim Mahkamah Agung membatalkan keputusan Pengadilan Pajak yang mengesahkan tagihan pajak air permukaan Pemerintah Provinsi Papua ke Freeport sebesar Rp 2,6 Triliun. Gubernur Papua Lukas Enembe pernah mengadukan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena PT Freeport Indonesia belum juga melunasi pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Aduan disampaikan Lukas saat rapat terbatas evaluasi Proyek Strategis Nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/7) tahun lalu. Namun,

harapan untuk mendapatkan pembayaran itu kandas setelah Keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan PT Freeport Indonesia.

Begitu juga hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan adanya potensi kerugian negara akibat operasional PT Freeport Indonesia di Papua sebesar Rp 185,58 triliun. Penyebabnya adalah sejumlah pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu. Temuan ini dituangkan BPK dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penerapan kontrak karya Freeport Indonesia tahun anggaran 2013 hingga 2015. Penyebab potensi kerugian negara paling besar adalah dampak pembuangan limbah operasional penambangan (*tailing*) di sungai, hutan, estuary dan ada yang telah mencapai kawasan laut. Nilainya mencapai Rp 185 triliun. Namun, temuan ini dianggap angin lalu. Bahkan ketika diklarifikasi di dalam rapat dengan pihak DPR, pihak Freeport tanpa beban mengatakan tidak mengetahui adanya temuan itu.

DPR juga menyoroti perkembangan negosiasi Pemerintah dengan Freeport. Salah satu yang menjadi sorotan terkait pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (*smelter*). Anggota komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Toto Daryanto, mengatakan hingga kini perkembangan pembangunan *smelter* Freeport belum kunjung signifikan. Padahal perusahaan asal Amerika Serikat itu berjanji akan membangun pabrik itu di Papua atau Gresik. Dengan janji tersebut Freeport mendapat izin perpanjangan untuk mengeksport konsentrat sebesar 1,24 juta ton dari 1,6 juta yang diajukan pihak Freeport.

Protes terhadap Freeport juga datang dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio. Dia mengatakan Freeport dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara merupakan bagian dari 52 perusahaan yang separuh

pendapatannya berasal dari Indonesia. Namun, keduanya malah melantai di bursa saham luar negeri.

Keistimewaan-keistimewaan yang didapatkan oleh Freeport merupakan simbol bagaimana kuatnya penjajahan Kapitalisme dalam bentuk investasi di negara ini. Eksistensi Freeport juga menjadi cermin betapa lemahnya Pemerintah dan kuatnya konspirasi mereka untuk melanggengkan eksistensi perusahaan-perusahaan asing dalam mengeruk kekayaan alam negeri ini.

Harga Terlalu Mahal dan Didanai Asing

Nilai disvestasi saham menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno diperkirakan berkisar US\$ 3,5 miliar hingga US\$ 4 miliar atau paling mentok setara Rp 57 triliun. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batu Bara harga divestasi ini terlalu mahal. Seharusnya, kata dia, Pemerintah bisa dan harus meminta harga yang jauh lebih rendah. "Mengingat Freeport pun harus membayar sanksi akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan," kata Marwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/7/2018).

Menurut dia, yang semestinya dijadikan rujukan perhitungan harga saham adalah periode Kontrak Karya (KK) tambang Freeport yang berakhir tahun 2021. Bukan periode KK hingga 2041 seperti yang diinginkan Freeport. "Dengan masa berlaku KK yang tersisa hanya tinggal 3-4 tahun, maka nilai aset dan bisnis Freeport mestinya jauh lebih rendah dari US\$ 3 miliar-US\$ 4 miliar," tutur Marwan.

Dengan rujukan periode kontrak yang tinggal 3-4 tahun, menurut Marwan, saham Freeport semestinya hanya berkisar US\$ 1-1,5 miliar. "Jika ditambah dengan sanksi-sanksi hukum akibat kerusakan lingkungan yang nilainya sangat besar diperhitungkan, maka nilai yang harus dibayar negara untuk saham

divestasi Freeport diperkirakan hanya beberapa ratus juta dolar AS saja.

Ironisnya, selain mahal, dana untuk disvestasi juga akan dibiayai dari utang yang diperoleh dari swasta. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, perusahaan itu bakal mengandalkan pinjaman dana dari I I bank.

Solusi Islam

Tambang emas yang dikelola PTFI merupakan tambang terbesar di dunia. Nilai cadangannya mencapai US\$ 42 miliar. Ditambah dengan cadangan tembaga senilai US\$ 116 miliar dan perak senilai US\$ 2,5 miliar. Total cadangan terbukti mencapai US\$ 160 miliar atau setara Rp 2.290 triliun.

Agar semua itu menjadi milik umat dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat tentu harus ada solusi. Solusinya harus berdasarkan sistem ekonomi Islam atau berdasarkan syariah Islam.

Dalam pandangan Islam, tambang Freeport merupakan milik umum yang wajib dikelola oleh Negara. Haram diserahkan kepada swasta apalagi asing. Kesepakatan Freeport sejak KK I sampai saat ini adalah kesepakatan yang batil. Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan setiap syarat atau perjanjian yang bertentangan dengan Kitabullah adalah batil walaupun ada 100 syarat. Karena itu dalam pandangan Islam, tambang Freeport harus segera diambil alih oleh Negara saat ini juga tanpa menunggu 2021 atau tanpa melalui proses disvestasi.

Akan tetapi, solusi tersebut hanya bisa dilakukan oleh negara yang kuat yang menerapkan syariah Islam. Negara ini harus mampu untuk menghadapi negara, institusi dan regulasi global yang menjadi pelindung eksistensi Freeport dan perusahaan asing. Negara itu tidak lain adalah Negara Khilafah Rasyidah Islamiyyah yang sedang diperjuangkan oleh sebagian umat Islam saat ini. [MAN/LM dari berbagai sumber]

KAPAN PENDAPAT MAJELIS UMAT MENGIKAT KHALIFAH? (Pasal 110 Kitab *Muqaddimah ad- Dustûn*)

Telaah Kitab kali ini membahas Pasal 110. Pasal ini membahas ketentuan yang terkait dengan hasil-hasil musyawarah, apakah mengikat Khalifah atau tidak. Dalam pasal 110 dinyatakan: “Masalah-masalah yang di dalamnya musyawarah (*syura*) bisa diberlakukan, yang (hasilnya) bersifat mengikat (*mulzimah*) ketika Khalifah meminta bermusyawarah, maka keputusannya diambil berdasarkan suara mayoritas tanpa memandang apakah pendapat itu benar atau salah. Adapun selain masalah-masalah tersebut yang termasuk di bawah *syura* yang (hasilnya) tidak mengikat, maka keputusannya ditetapkan berdasarkan kebenaran (pendapat yang benar) tanpa memandang lagi suara mayoritas atau minoritas.”

Maksudnya, persoalan-persoalan yang masuk dalam cakupan *syura* dan menjadi bagian dari *al-masyûrâ*, maka keputusannya diambil berdasarkan suara mayoritas, tanpa memperhatikan benar atau salahnya keputusan tersebut. Dalam persoalan-persoalan semacam ini, jika Majelis Umat telah memutuskan suatu keputusan berdasarkan suara mayoritas, maka keputusan Majelis

Umat dalam perkara semacam ini bersifat mengikat. Artinya, Khalifah wajib mengadopsi dan menjalankan hasil musyawarah tersebut meskipun bertentangan dengan pendapatnya.

Yang dimaksud musyawarah adalah mengambil pendapat atas suatu urusan dengan cara membicarakannya dengan orang lain, lalu ditetapkan sebuah kesimpulan berdasarkan aklamasi atau suara terbanyak. Musyawarah termasuk cara pengambilan pendapat.

Atas dasar itu, tidak ada musyawarah dalam masalah yang berhubungan dengan penetapan hukum syariah dan pendapat-pendapat *syari'iyah*. Masalah seperti ini wajib ditetapkan berdasarkan ijtihad; menggali hukum dari nash-nash al-Quran dan sunnah oleh seorang mujtahid. Selain mujtahid tidak diperkenankan menggali hukum syariah dari nas-nas syariah. Begitu pula pengambilan pendapat dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan definisi atas suatu perkara, baik definisi yang bersifat *syari'iyah* maupun non *syari'iyah*. Misalnya, definisi tentang hukum syariah, masyarakat, akal dan lain sebagainya. Semua itu harus didasarkan pada definisi yang paling sesuai dengan fakta yang hendak didefinisikan, bukan ditetapkan berdasarkan musyawarah (aklamasi atau suatu mayoritas).

Adapun dalam urusan-urusan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan, pengambilan pendapat harus merujuk kepada orang yang memang ahli dalam masalah tersebut. Musyawarah hanya terjadi dan boleh diselenggarakan dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan suatu aktivitas yang hendak dikerjakan atau urusan-urusan teknis. Pengambilan keputusannya didasarkan pada aklamasi atau suara mayoritas. Hanya dalam urusan seperti inilah musyawarah bisa diberlakukan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah hanya terjadi dan boleh diselenggarakan di luar tiga perkara di atas,



yakni hanya terjadi dalam masalah yang berhubungan dengan suatu aktivitas yang hendak dikerjakan atau urusan-urusan teknis.

Dalil yang mendasari ketetapan ini adalah perilaku Rasulullah saw. ketika bermusyawarah dengan para sahabat. Pada saat Perang Uhud, Nabi saw. lebih condong menghadapi musuh di Kota Madinah. Sebaliknya, para sahabat lebih condong untuk keluar dan menyongsong musuh di luar Kota Madinah. Di dalam *Sîrah Ibnu Hisyâm* dituturkan sebagai berikut:

Ibnu Ishaq berkata, “Jika kalian melihat mereka berdiam di Madinah, usirlah mereka di mana pun mereka berada. Jika mereka berdiam diri, mereka berdiam diri dalam keadaan yang sulit. Jika mereka masuk menyerang kita, kita akan memerangi mereka di dalamnya (Madinah). Pendapat ‘Abdullah bin Ubay bin Salul sejalan dengan pendapat Rasulullah saw. dalam masalah ini yang menyatakan tidak akan keluar (Madinah) menyongsong mereka (kafir Quraisy). Rasulullah saw. tidak suka keluar (dari Kota Madinah). Seorang laki-laki dari kalangan kaum Muslim yang termasuk orang yang dimuliakan Allah SWT dengan *syahâdah* saat Perang Uhud dan dari kalangan orang-orang yang tidak ikut serta dalam Perang Badar berkata, “Ya Rasulullah, keluarlah bersama kami untuk menyongsong musuh-musuh kami, agar mereka tidak memandang kami takut dan lemah terhadap mereka.”.....Tatkala Rasulullah saw. keluar karena desakan mereka, mereka (para sahabat) berkata, “Ya Rasulullah, apakah kami telah membuat Anda tidak suka (terpaksa) yang hal itu mestinya bukan menjadi hak kami? Jika Anda mau, silakan Anda duduk, Allah swt bersalawat atas Anda.” Rasulullah saw. menjawab, “Tidak boleh bagi seorang nabi, jika ia telah mengenakan baju besinya, meletakkannya kembali, hingga ia berperang.” Rasulullah saw pergi berperang bersama 1000

orang sahabatnya (Ibnu Hisyam, *Sîrah Ibnu Hisyâm*, 2/63. Maktabah Syamilah).

Wajh al-istidlâl dari riwayat ini adalah dalam persoalan-persoalan teknis atau aktivitas yang hendak dilaksanakan secara bersama-sama. Keputusannya ditetapkan berdasarkan suara mayoritas. Saat itu, mayoritas Sahabat menghendaki untuk menghadapi musuh di luar Kota Madinah. Sebaliknya, Rasulullah saw.—sebagai kepala negara Daulah Islamiyyah—berpendapat sebaliknya, yakni menyongsong musuh di dalam Kota Madinah. Hanya saja, beliau mengikuti pendapat suara terbanyak yang menginginkan menghadapi musuh di luar kota Madinah.

Dalam perkara-perkara seperti ini, yakni aktivitas yang hendak dikerjakan, pendapat Majelis Umat yang didasarkan suara mayoritas mengikat Khalifah.

Adapun dalam perkara-perkara lain di luar perkara teknis atau di luar masalah-masalah yang berhubungan dengan suatu aktivitas yang hendak dilakukan, maka keputusannya ditetapkan berdasarkan “mana pendapat yang paling benar”. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah perilaku Rasulullah saw. yang menganulir pendapatnya dan mengikuti pendapat Hubab bin Mundzir ra. di medan Perang Badar. Pada saat Perang Badar Kubra, Nabi Muhammad saw. menetapkan sebuah tempat untuk bertahan menghadapi pasukan Quraisy. Hubab bin al-Mundzir bin al-Jamuh ra. bertanya kepada Nabi saw., “Wahai Rasulullah, apakah tempat ini termasuk tempat yang ditentukan Allah dan kita tidak boleh memajukan atau mengundurkannya? Ataupun tempat ini ditetapkan berdasarkan pendapat, perang dan taktik perang? Rasulullah saw. menjawab, “*Ini termasuk pendapat, pedang dan taktik perang.*” Hubab bin Mundzir bin al-Jamuh pun menyampaikan usulan kepada Nabi saw., “*Wahai Rasulullah, ini bukanlah tempat*



Telaah Kitab

yang tepat. Pergilah bersama para Sahabat hingga tiba di mata air yang paling dekat dengan orang-orang Quraisy. Kita berhenti di sana, kemudian kita tutup dan timbun mata air itu. Setelah itu kita bangun sebuah kolam. Lalu kita penuhi kolam itu dengan air. Dengan begitu kita bisa berperang melawan orang-orang Quraisy dalam keadaan kita bisa minum, sedangkan mereka tidak bisa minum.” Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh, engkau menyampaikan usulan yang tepat.”

Selanjutnya, Rasulullah saw. dan para Sahabat berangkat ke medan Badar. Sesampainya di mata air yang dekat dengan pasukan Quraisy, beliau berhenti, mengambil air, dan mengisikannya di kolam-kolam yang telah dibangun oleh kaum Muslim hingga penuh. Lalu para Sahabat melemparkan timba-timba mereka ke kolam yang telah kosong tersebut (Ibnu Hisyam, *Ash-Sîrah an-Nabawiyah*, hlm. 424).

Wajh al-istidlâl riwayat ini adalah keputusan untuk perkara-perkara yang membutuhkan keahlian wajib ditetapkan berdasarkan pendapat ahlinya. Rasulullah saw. menganulir pendapatnya, lalu mengikuti pendapat Hubab bin al-Mundzir ra., karena beliau ra. adalah orang yang paling memahami kondisi medan Badar.

Berdasarkan riwayat-riwayat di atas dapat disimpulkan poin-poin berikut ini:

1. Dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan suatu aktivitas yang hendak dikerjakan atau urusan-urusan teknis, pengambilan keputusan didasarkan pada aklamasi atau suara mayoritas. Hanya dalam urusan seperti inilah musyawarah bisa diberlakukan. Di dalam riwayat di atas disebutkan bahwa Rasulullah saw. mengikuti pendapat mayoritas yang menghendaki menghadapi musuh di luar Kota Madinah.

2. Dalam urusan-urusan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan, pengambilan pendapat harus sandarkan pada pendapat orang yang memang ahli dalam masalah itu. Misalnya, untuk menetapkan sistem irigasi yang paling efektif dan efisien bagi pertanian dan perkebunan yang luas, harus dirujuk pada pendapat ahli irigasi dan perkebunan, bukan suara mayoritas atau aklamasi. Dalam riwayat di atas dituturkan bahwa Rasulullah saw. membatalkan pendapat beliau, lalu mengikuti pendapat Hubab bin al-Mundzir dalam urusan pertahanan perang di medan Perang Badar. Alasannya, Rasulullah saw. memahami, Hubab adalah orang yang lebih memahami medan Badar dibandingkan beliau. Atas dasar itu, keputusan Majelis Umat dalam perkara-perkara seperti ini tidak mengikat Khalifah. Pasaunya, keputusan yang berhubungan atau terkait dengan masalah-masalah ini dikembalikan pada pendapat yang paling tepat.

Dalil yang menunjukkan bahwa selain urusan-urusan yang berhubungan dengan suatu aktivitas yang hendak dikerjakan atau urusan-urusan teknis, pendapat Majelis Umat tidak mengikat, Khalifah adalah sunnah Nabi saw. Pada saat Perjanjian Hudaibiyah, Nabi saw. menolak pendapat para Sahabat meskipun mereka bersikeras terhadap keputusan Nabi saw. Pasaunya, apa yang beliau lakukan pada saat Perjanjian Hudaibiyah terkait dengan hukum syariah/wahyu. Dalam urusan seperti ini, beliau tidak pernah lemah terhadap desakan Sahabat. Ini menunjukkan bahwa dalam masalah-masalah yang terkait dengan hukum, tidak berlaku di dalamnya pendapat mayoritas, dan pendapat Majelis Umat tidaklah mengikat.

Wallâhu al-Musta'ân wa Huwa Wâliyyu at-Tawfiq. [Gus Syam]



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



BALASAN BAGI KAUM YANG BERTAKWA

(Tafsir QS 'al-Mursalat [77]: 41-45)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (41) وَفَوَاقِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيئًا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (43) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ (44) وَإِلَّا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ (45)

(Inilah hari yang (di dalamnya) mereka tidak dapat berbicara dan tidak diizinkan meminta uzur sehingga mereka (dapat) meminta uzur. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Inilah hari keputusan. (Pada hari ini) Kami mengumpulkan kalian dan orang-orang terdahulu. Jika kalian mempunyai tipudaya, lakukanlah tipudaya kalian itu terhadap-Ku. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan (QS al-Mursalat [77]: 35-40).

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *Inna al-muttaqina fi zhilal wa 'uyun* (Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan [yang teduh] dan [di sekitar] mata-mata air). Ayat ini memberitakan tentang keadaan kaum yang bertakwa.

Menurut Muqatil dan al-Kalbi, *al-muttaqin* di sini adalah kaum yang menjaga diri dari syirik terhadap Allah SWT. Alasannya, surat ini dari awal hingga akhirnya berisi celaan bagi orang-orang kafir atas kekufuran mereka.¹

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Fakhruddin ar-Razi dan al-Baidhawi. Menurut al-Baidhawi, ini kebalikan dari orang-orang yang mendustakan.²

Namun, ada yang berpendapat, di samping menjauhi syirik juga mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Al-Jazairi berkata, "Mereka adalah orang-orang yang menjauhi syirik dan kemaksiatan."³

Dikatakan pula, "Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dan menaati Dia dengan mengerjakan apa yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang dilarang."⁴

Ibnu Katsir juga berkata, "Mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah SWT dengan menunaikan semua yang Dia wajibkan dan meninggalkan semua yang Dia haramkan."⁵

Demikian juga Ibnu Jarir ath-Thabari. Mufassir tersebut, "Mereka adalah orang-orang

yang menjaga diri mereka dari siksa Allah SWT dengan menunaikan kewajiban-kewajiban-Nya di dunia dan menjauhi larangan-Nya.”⁶

Disebutkan bahwa mereka di akhirat kelak *fi zhilâl wa ‘uyûn*. Kata *zhilâl* merupakan bentuk jamak dari kata *zhill* (naungan).⁷ Yang dimaksud dalam ayat ini adalah *zhill al-asyjâr* (naungan pepohonan). Demikian menurut al-Khazin.⁸

Menurut Abdurrahman aa-Sa’di, disebabkan oleh pepohonan yang beraneka ragam dan bunga-bunga yang menawan.⁹

Menurut Imam al-Qurthubi dan asy-Syaukani, di samping *zhill al-asyjâr* (naungan pepohonan), *zhill al-qawshûr* (naungan istana). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

﴿هُم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرْبَابِكِ مُتَكِنُونَ﴾

Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan (QS Yasin [36]: 56).¹⁰

Ini tentu berbeda dengan keadaan orang-orang yang celaka. Mereka pada Hari Kiamat berada di dalam naungan *yahmum*, yaitu asap hitam yang busuk baunya.¹¹

Selain berada dalam naungan, mereka juga dalam *‘uyûn*. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata *al-‘ayn* (mata air). Menurut asy-Syaukani, yang dimaksud dengan *al-‘uyûn* di sini adalah *al-anhâr* (sungai-sungai). Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, itu adalah sungai-sungai yang mengalir di sela-sela pepohonan pada kebun-kebun mereka.¹²

Mata air itu ada yang berupa air, susu, khamr, dan madu.¹³

Kemudian dilanjutkan: *Wa fawâkiha mimmâ yasytahûna* (dan [mendapat] buah-buahan yang mereka inginkan). Ini adalah kenikmatan yang akan didapatkan oleh mereka di dalam surga. Mereka akan mendapatkan *fawâkih*. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata *al-fâkihah* (buah-buahan).

Disebutkan bahwa buah-buahan itu

mimmâ yasytahûna (yang mereka sukai). Menurut al-Khazin, *mimmâ yasytahûn* berarti *yataladzdzûna bihâ* (mereka merasakan lezatnya buah itu).¹⁴

Ibnu Katsir berkata, “Yakni berbagai macam buah-buahan. Apa pun yang mereka inginkan, pasti mereka dapat.”¹⁵

Ibnu Jarir al-Thabari berkata, “Mereka makan di dalamnya setiap kali mereka inginkan tanpa merasa takut bahaya dan efek buruknya.”¹⁶

Al-Jazairi berkata, “Berbeda dengan di dunia. Manusia hanya makan makanan yang mereka dapat. Seandainya mereka menyukai suatu makanan dan mereka tidak



mendapatkan, mereka tidak bisa memakannya. Di surga, ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka dia akan mendapati dan memakannya. Ini rahasia yang terkandung dalam ungkapan dalam ayat ini: *mimmâ yasytahûna* (dari apa yang mereka inginkan).¹⁷

Kemudian disebutkan: *Kulû wa [ij]syrabû* ([Dikatakan kepada mereka]: “Makan dan

minumlah kalian dengan enak karena apa yang telah kalian kerjakan”). Kalimat *Kulû wa [i]syrabû* merupakan *amr ikrâm* (perintah sebagai penghormatan), bukan *amr taklif* (perintah sebagai taklif).¹⁸

Menurut Ibnu Katsir, ini dikatakan kepada mereka sebagai penghormatan dan perlakuan yang baik kepada mereka.¹⁹

Mereka dipersilakan untuk makan dan meminum sesukanya. Ibnu Jarir berkata, “Makanlah kalian semua buah-buahan ini dan minumlah dari mata air ini kapan kalian mau!”²⁰

Dalam ayat disebutkan: *hanîa[n]* (dengan enak). Menurut Abdurrahman as-Sa’di, “Tanpa kotoran dan sesuatu yang mengeruhkan.

sababiyah (untuk menyatakan sebab). Artinya, disebabkan oleh amal shalih yang kalian kerjakan di dunia.²² Perbuatan yang telah dikerjakan adalah ketaatan semasa di dunia.²³

Menurut Abdurrahman as-Sa’di, “Amal perbuatan kalian itulah yang menjadi sebab yang mengantarkan kalian ke dalam *Jannah al-Na’îm*. Demikian pula semua orang yang melakukan kebaikan dalam beribadah kepada Allah SWT dan kebaikan kepada sesama hamba-Nya.”²⁴

Ibnu Jarir al-Thabari berkata, “Ini adalah balasan atas apa yang telah kalian kerjakan berupa ketaatan kepada Allah SWT dan kesungguhan kalian dalam melakukan *taqarrub* kepada-Nya.”²⁵

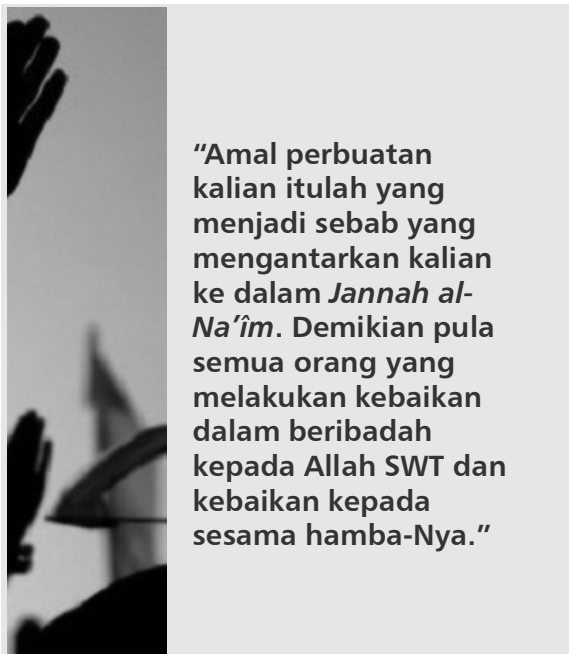
Juga firman Allah SWT: *Innâ kadzâlika Najjî al-muhsinîn* (Sungguh demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik). Artinya, “Sebagaimana Kami membalas *al-muttaqîn* (orang-orang bertakwa), Kami juga akan membalas *al-muhsinîn* (orang-orang yang berbuat kebaikan). Demikian menurut al-Jazairi dan al-Zuhaili.²⁶

Maksudnya, “Inilah balasan Kami terhadap orang-orang yang telah berbuat baik.” Asy-Syaukani berkata, “Balasan agung seperti ini akan Kami berikan kepada orang-orang melakukan perbuatan baik.”²⁷

Allah SWT berfirman: *Wayl[un] yawmaidzi[n] li al-mukadzdzbîn* (Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan). Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mendustakan berita Allah SWT berkaitan dengan nikmat-Nya yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa pada Hari Kiamat.²⁸

Az-Zuhaili berkata, “Yakni azab dan kehinaan pada Hari Kiamat adalah bagi orang-orang yang mendustakan Allah SWT dan para rasul-Nya.”²⁹

Beberapa Pelajaran Penting



“Amal perbuatan kalian itulah yang menjadi sebab yang mengantarkan kalian ke dalam *Jannah al-Na’îm*. Demikian pula semua orang yang melakukan kebaikan dalam beribadah kepada Allah SWT dan kebaikan kepada sesama hamba-Nya.”

Makanan tidak sempurna kelezatannya hingga makanan dan minuman itu aman dari madarat dan kekurangan; dan hingga mereka yakni bahwa makanan itu tidak terputus dan tidak hilang.”²¹

Kemudian dinyatakan: *bimâ kuntum ta’malûna* (karena apa yang telah kalian kerjakan). Huruf *al-bâ’* di sini adalah *li as-*

Pertama: Balasan yang diterima oleh orang-orang yang bertakwa berkebalikan dengan balasan terhadap orang-orang kafir. Menurut Fakhruddin ar-Razi, ketika Allah SWT pada Hari Kiamat mengirimkan kepada orang-orang kafir *zhill dzî tsalâts syu'ab* (naungan yang memiliki tiga cabang), Dia pun menyediakan bagi orang-orang Mukmin tiga macam kenikmatan yang menjadi kebalikan darinya, yakni: *zhilâl* (naungan), *'uyûn* (mata air, sungai) dan *fawâkiha* (buah-buahan) (QS al-Mursalat [77]: 41-42).³⁰

Jika orang-orang kafir diberikan *zhill* (naungan) yang tidak bisa menaungi, juga tidak bisa mencegah bara api dan dahaga, maka naungan orang-orang yang bertakwa benar-benar bisa menaungi. Di dalamnya ada mata air yang airnya segar dan bisa menghilangkan dahaga, serta membatasi antara mereka dengan nyala api, dan terdapat buah-buahan yang mereka senangi dan mereka inginkan.³¹

Kedua: Penghuni surga mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam ayat ini disebutkan: *Wa fawâkiha mimâmâ yasytahûna* (dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini). Makna ayat ini, sebagaimana menurut para ulama, penghuni surga akan mendapatkan buah-buahan yang mereka inginkan. Bukan hanya merasakan lezatnya buah-buahan yang tersedia, namun juga mendapatkan buah apa pun yang mereka inginkan dan angankan. Bukan hanya buah-buahan. Semua yang mereka inginkan pun akan diperoleh di dalam surga (Lihat: QS Fushshilat [41]: 31-32; QS az-Zukhruf [43]: 71).

Ketiga: Balasan yang diterima oleh manusia di akhirat adalah buah dari amal yang mereka kerjakan selama di dunia. Sebagaimana telah dipaparkan di muka, ini dapat dipahami dari firman Allah SWT: *bimâ kuntum ta'malûna* (karena apa yang telah kalian kerjakan). Huruf *al-bâ'* dalam ayat ini adalah *li as-sabab*

(menunjukkan sebab).

Juga firman-Nya: *Innâ kadzâlika Najzî al-muhsinîn* (Sungguh demikianlah Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.). Artinya, surga beserta berbagai kenikmatan sebagai balasan Allah SWT kepada orang-orang bertakwa dan orang-orang yang baik.

Selain ayat ini, banyak ayat lainnya yang isinya senada, seperti QS an-Nahl [16]: 32, al-Zuhruf [43]: 72, dan lain-lain. Surga yang merupakan balasan kepada penghuninya, dengan jelas juga disebutkan dalam QS al-Ahqaf [46]: 14).

Sebagaimana orang-orang bertakwa yang dimasukkan surga sebagai balasan atas amal yang mereka kerjakan, demikian pula dengan para penghuni neraka. Mereka mendapatkan siksa yang amat pedih disebabkan oleh amal perbuatan yang mereka kerjakan selama di dunia (Lihat: QS al-Sajdah [32]: 14).

Surga yang merupakan balasan kepada penghuninya, dengan jelas juga disebutkan dalam QS al-Taubah [9]: 94).

Amat banyak ayat senada dengan ini bahwa manusia tidak mendapatkan balasan kecuali apa yang telah mereka kerjakan di dunia (lihat QS Yasin [36]: 54).

Lalu bagaimana mendudukan ayat-ayat tersebut dengan hadis dari Jabir ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

«لَا يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا أَنَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ»

«TIDAK ADA AMALAN SEORANG PUN YANG BISA MEMASUKKAN DIRINYA KE DALAM SURGA DAN MENYELEMATKAN DIA DARI NERAKA, TIDAK JUGA DENGANKU, KECUALI DENGAN RAHMAT DARI ALLAH (HR Muslim).»

Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surga dan menyelematkan dia dari neraka, tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah (HR Muslim).

Menjelaskan Hadits ini dan semacamnya, Imam al-Nawawi berkata. "Dalam lahiriah

hadis-hadis ini, yang menunjukkan pada *ahlul haqq* bahwa seseorang tidak berhak mendapatkan pahala dan surga dengan ketaatan, padahal Allah SWT telah berfirman: “Masuklah kalian ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kalian kerjakan.” (QS al-Nahl [16]: 32). Juga dinyatakan, “Itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan karena amal-amal yang dulu kalian kerjakan” (QS al-Zuhruf [43]: 72). Demikian pula ayat-ayat lainnya yang menunjukkan bahwa amalan bisa memasukkan orang dalam surga. Semua itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis tersebut. Akan tetapi, makna ayat-ayat itu adalah: Sungguh masuk surga itu disebabkan oleh amalan. Kemudian ada taufik dari Allah untuk beramal dan ada hidayah untuk ikhlas pula dalam beramal. Amal-amal itu diterima karena rahmat dan karunia Allah. Dengan demikian benarlah bahwa seseorang tidak masuk surga hanya semata karena amalnya. Itulah yang dimaksudkan dalam hadis. Kesimpulannya, seseorang masuk surga adalah karena ada amalan. Artinya, disebabkan oleh amal. Amalan itu merupakan rahmat Allah. *Wallâhu a’lam.*”³²

Keempat: Kesamaan antara *al-muttaqîn* dan *al-muhsinîn*. *Al-Muttaqîn* adalah orang-orang yang bertakwa. *Al-Muhsinîn* adalah orang-orang yang berbuat *ihsân* (kebaikan). Keduanya memiliki perbedaan makna meskipun terdapat titik temu di antara keduanya. Dalam ayat ini diberitakan, kedua golongan ini memiliki kesamaan balasan. Keduanya mendapatkan balasan berupa surga. Ini disebutkan dalam firman Allah SWT:

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾

Sungguh demikianlah Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik (QS al-Mursalat [77]: 44).

Menurut para mufassir, ayat ini

memberitakan bahwa sebagaimana Allah SWT balasan surga, demikian pula balasan yang akan diberikan kepada *al-muhsinîn* (orang-orang yang berbuat kebaikan). Ini berarti, ada kesamaan balasan yang akan diterima oleh mereka.

Wallâh a’lam bi ash-shawâb. □

Catatan kaki:

- ¹ Asy-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 435
- ² Ar-Razi, *Ma’ârif al-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1420 H), 780; al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1998), 277
- ³ Al-Jazairi, *Aysar al-Tafsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, 2993), 498
- ⁴ Al-Jazairi, *Aysar al-Tafsîr*, vol. 5, 497
- ⁵ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm*, vol. 8 (tt: Dar Thayyibahm 1999), 301
- ⁶ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 24 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 143
- ⁷ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhibh*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H), 379
- ⁸ Al-Khazin, *Lubâb al-Tanzîl fi Ma’âni al-Ta’wîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 385
- ⁹ As-Sa’di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 905
- ¹⁰ Al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 167; al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 435
- ¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm*, vol., 301
- ¹² Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 24, 143
- ¹³ Al-Jazairi, *Aysar al-Tafsîr*, vol. 5, 497
- ¹⁴ Al-Khazin, *Lubâb al-Tanzîl fi Ma’âni al-Ta’wîl*, vol. 4, 385
- ¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm*, vol., 301
- ¹⁶ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 24, 143
- ¹⁷ Al-Jazairi, *Aysar al-Tafsîr*, vol. 5, 498
- ¹⁸ Az-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1998), 325
- ¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azîm*, vol., 301
- ²⁰ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 24, 143
- ²¹ As-Sa’di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*, 905
- ²² Asy-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 435
- ²³ Al-Khazin, *Lubâb al-Tanzîl fi Ma’âni al-Ta’wîl*, vol. 4, 385
- ²⁴ As-Sa’di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*, 905
- ²⁵ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 24, 143
- ²⁶ Al-Jazairi, *Aysar al-Tafsîr*, vol. 5, 498; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 331
- ²⁷ Asy-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 435
- ²⁸ Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 24, 143-144
- ²⁹ Az-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 325
- ³⁰ Lihat: Ar-Razi, *Ma’ârif al-Ghayb*, vol. 30, 780
- ³¹ Ar-Razi, *Ma’ârif al-Ghayb*, vol. 30, 780
- ³² An-Nawawi, *Syar-h al-Nawawi ‘alâ Muslim*, 17 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1362), 160-161



BERKAH DI BALIK MUSIBAH

Bagi seorang Muslim, musibah tak selamanya buruk. Bahkan boleh jadi mendatangkan banyak keberkahan. Beberapa di antaranya: *Pertama*, Allah SWT menghapus sebagian dosa-dosanya. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Musibah apa saja yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahan kalian)* (QS asy-Syura []: 30).

Nabi saw. pun bersabda, *“Tidak ada penyakit, kesedihan dan bahaya yang menimpa seorang Mukmin hingga duri yang menusuk dia melainkan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dengan semua itu.”* (HR al-Bukhari).

Beliau pun bersabda, *“Cobaan senantiasa akan menimpa seorang Mukmin, keluarga, harta dan anaknya hingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa.”*

Sebagian ulama salaf berkata, “Kalau bukan karena musibah-musibah yang kita alami di dunia, niscaya kita akan datang pada Hari

Kiamat dalam keadaan bangkrut.”

Kedua, Allah SWT memberikan pahala yang besar di akhirat kepada orang yang terkena musibah. Nabi saw. bersabda, *“Manusia pada Hari Kiamat berangan-angan kulitnya dicabik-cabik ketika di dunia karena iri melihat besarnya pahala orang-orang yang tertimpa cobaan.”* (HR at-Tirmidzi).

Ketiga, Allah SWT dekat dengan orang yang tertimpa musibah. Di antaranya musibah sakit. Dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, *“Wahai manusia, si fulan hamba-Ku sakit dan engkau tidak membesuk dia. Sungguh, jika engkau membesuk dia, niscaya engkau mendapati Aku ada di sisinya.”* (HR Muslim).

Keempat, jika dihadapi dengan sabar, musibah mendatangkan ridha Allah SWT. Nabi saw. bersabda, *“Sungguh besarnya pahala bergantung pada besarnya cobaan. Jika Allah mencintai suatu kaum maka Dia akan menguji mereka dengan cobaan. Siapa saja yang ridha atas cobaan tersebut maka dia mendapat keridhaan Allah dan barang siapa yang berkeluh-kesah (marah) maka dia akan mendapat murka-Nya.”*

Kelima, musibah bisa memurnikan tauhid dan menautkan hati kepada Allah SWT. Berapa banyak musibah yang menyebabkan seorang hamba menjadikan dirinya mendekat kepada Allah SWT dan menjauhkan diri dari kesesatan. Inilah yang Allah SWT tegaskan (yang artinya): *Jika Kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Namun, jika ia ditimpa malapetaka, ia banyak berdoa* (TQS Fushilat []: 51).

Keenam, musibah dapat menghilangkan sikap sombong, ujub dan takabur. Betapa banyak manusia sombong, ujub dan takabur, saat ditimpa musibah, ia baru mulai menyadari dirinya serba lemah dan tak berdaya. Saat itu hilanglah kesombongannya.

Ketujuh, Allah SWT menghendaki kebaikan bagi orang yang terkena musibah. Rasulullah

saw. bersabda, *“Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah kebaikan maka Allah akan menimpakan musibah kepada dirinya.”* (HR al-Bukhari).

Beliau pun bersabda, *“Sungguh menakutkan kondisi seorang Mukmin. Sungguh semua perkaranya baik bagi dirinya. Jika dia memperoleh kelapangan, ia bersyukur, dan itu baik bagi dirinya. Jika dia ditimpa kesempitan, ia bersabar, dan itu pun baik bagi dirinya.”* (HR Muslim).

Kedelapan, Allah SWT tetap menulis pahala kebaikan yang biasa dilakukan oleh orang yang sakit. Di antaranya sakit. Pasalnya, andai ia tidak terhalang musibah seperti sakit, tentu ia akan tetap melakukan kebajikan tersebut. Hal ini akan terus berlanjut selagi dia (yang terkena musibah) masih dalam niat atau janji untuk terus melakukan kebaikan tersebut. Rasulullah saw. bersabda, *“Tidak seorang pun yang ditimpa bala pada jasadnya melainkan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menjaga dia serya berfirman kepada malaikat itu, ‘Tulislah untuk hamba-Ku siang dan malam amal shalih yang (biasa) ia kerjakan selama ia masih dalam perjanjian dengan-Ku.’”* (HR Ahmad).

Kesembilan, musibah bisa makin menanamkan rasa takut kepada Allah SWT. Dengan itu orang yang terkena musibah bisa semakin menaati seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Inilah yang secara jelas tergambar dari keteladanan Rasulullah saw. Sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah ra., bahwa jika langit mendung, awan menghitam dan angin kencang, wajah Baginda Nabi saw. yang biasanya memancarkan cahaya akan terlihat pucat-pasi karena takut kepada Allah SWT. Beliau lalu keluar dan masuk ke masjid dalam keadaan gelisah seraya berdoa, *“Ya Allah...aku berlindung kepada-Mu dari keburukan hujan dan angin ini, dari keburukan*

apa saja yang dikandungnya dan keburukan apa saja yang dibawanya.”

Aisyah ra. bertanya, *“Ya Rasulullah, jika langit mendung, semua orang merasa gembira karena pertanda hujan akan turun. Namun, mengapa engkau tampak ketakutan?”*

Nabi saw. menjawab, *“Aisyah, bagaimana aku dapat meyakini bahwa awan hitam dan angin kencang itu tidak akan mendatangkan azab Allah? Kaum ‘Ad telah dibinasakan oleh angin topan. Saat awan mendung, mereka bergembira karena mengira hujan akan turun. Padahal Allah kemudian mendatangkan azab atas mereka.”* (HR Muslim dan at-Tirmidzi).

Masya Alllah! Kita sepantasnya takjub dengan rasa takut Rasulullah saw. kepada Allah. Bayangkan, Rasul saw. adalah kekasih-Nya, penghulu ahli surga. Allah mustahil mengazab beliau. Namun, rasa takut kepada Allah SWT sering menyelip dalam batin beliau di saat-saat awan mendung dan angin kencang.

Bagaimana dengan para Sahabat beliau? Sama saja. Para Sahabat adalah juga orang-orang yang paling takut kepada Allah setelah Baginda Rasulullah saw. Padahal mereka telah dijamin masuk ke dalam surga-Nya. Demikian pula para *tâbîn* dan generasi sesudah mereka. Kebanyakan mereka adalah generasi yang mengisi hari-hari mereka dengan amal-ibadah. Malam-malam mereka diisi dengan zikir, tilawah al-Quran dan qiyamul lail. Waktu siang mereka sering diisi dengan shaum sembari tetap mencari nafkah, berdakwah bahkan berjihad (berperang) di jalan-Nya. Namun demikian, rasa takut mereka terhadap Allah SWT begitu luar biasa. Apalagi saat-saat terkena musibah. Dengan itu mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan semakin berusaha taat kepada-Nya. Bagaimana dengan kita?!

Wa mâ tawfîqi illâ bilLâh. □

FITNAH MENGINTAI SIAPA SAJA YANG MENDATANGI PINTU PENGUASA

« ... وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتُنَّ وَمَا أَزْدَادَ عَبْدٌ مِّنَ السُّلْطَانِ قُرْبًا إِلَّا أَزْدَادَ مِّنَ اللَّهِ

بُعْدًا »

“...dan siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa niscaya terkena fitnah. Tidaklah seorang hamba makin dekat dari penguasa kecuali makin jauh dari Allah.” (HR Ahmad, Abu Dawud, al-Baihaqi, Ibnu ‘Adi dan al-Bukhari dalam *Târikh al-Kabîr*).

Al-Hafizh al-Haytsami di dalam *Majama’ az-Zawâ’id* berkomentar, “Salah satu sanad Ahmad, *rijâl* (para perawi)-nya adalah *rijâl* (perawi) shahih kecuali Hasan bin al-Hakam an-Nakha’i dan dia *tsiqah*.”

Dalam hadis ini, Rasul saw memperingatkan: Siapa saja yang mendatangi pintu penguasa niscaya terkena fitnah. Kedekatan dengan penguasa bisa membuat makin jauh dari Allah. Dalam riwayat lain ada perintah untuk menjauhi pintu-pintu penguasa. Rasul saw. bersabda, “*lyyâkum wa abwâbi as-sulthân* (Jauhilah oleh kalian pintu-pintu penguasa).” (HR al-Baihaqi).

Sabda Rasul saw. *uftutina*, menurut al-Mubarakfuri di dalam *Tuhfah al-Akhwadzi* maknanya adalah *waqa’ a fi al-fitnah* (terjatuh ke dalam fitnah). Sebab jika orang itu menyetujui penguasa atas apa yang dia datangkan dan memuji penguasa itu maka sungguh dia membahayakan agamanya. Sebaliknya, jika dia menyalahi penguasa itu maka dia membahayakan dunianya.

Al-Muzhahir, seperti dikutip oleh al-Mubarakfuri mengatakan, siapa saja yang mendatangi penguasa dan bermanis muka dengan dia, niscaya dia terjatuh dalam fitnah.

Sebaliknya, siapa saja yang tidak bermanis muka, menyampaikan nasihat dan melakukan amar makruf nahi mungkar kepada penguasa itu maka itu merupakan jihad yang paling afdhal.

Abu Utsman Said bin Ismail, seperti diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi berkata, “Bagi orang yang takut kepada Allah seharusnya tidak mendatangi pintu penguasa sampai dia dipanggil, lalu dia mendatangi penguasa itu seraya diliputi rasa takut kepada Rabb-nya ‘*Azza wa Jalla*. Lalu dia melakukan amar makruf nahi mungkar kepada penguasa itu dan mengatakan kebenaran. Ini seperti yang ada dalam hadis, “*Jihad yang paling afdhal adalah mengatakan kalimat kebenaran di depan penguasa yang zalim*.” Kemudian dia pergi dari mereka dan dia tetap diliputi rasa takut kepada Rabb-nya. Maka orang yang ini tidak terjatuh dalam fitnah. Orang yang terjatuh dalam fitnah tidak lain orang yang mendatangi para penguasa karena kehendaknya sendiri dalam rangka mencari dunia, mencari kemuliaan di dunia, mencari posisi di masyarakat, merasa mulia dengan kemuliaan penguasa, membanggakan kekuasaannya. Mereka mendatangi para penguasa, bermanis muka kepada mereka, rela dengan buruknya

perbuatan mereka, mendukung keburukan mereka, membenarkan perkataan mereka yang tidak benar, lalu dia kembali dari mereka dengan rasa bangga kepada mereka, merasa aman dari makar Allah, angkuh dengan kemuliaan yang dia peroleh dari mereka, menyakiti masyarakat dan melampaui batas kepada mereka dan berlaku kuat terhadap mereka. Inilah orang yang terjatuh dalam fitnah, lupa akhirat, bermaksiat kepada Rabb-nya, menyakiti kaum Mukmin dan kurang agamanya. Semua ini tidak bisa ditebus dengan dunia semuanya seandainya pun dunia itu miliknya.”

Banyak bertebaran riwayat-riwayat lain yang berisi larangan mendatangi pintu penguasa dan peringatan akan keburukannya. Karena itu para ulama salaf enggan mendatangi penguasa. Mereka juga enggan mendatangi penguasa meski diminta. Bahkan mereka tetap enggan meski diminta datang untuk mengajarkan ilmunya. Sebab, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik ketika diminta datang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid yang sedang berkunjung ke Madinah agar Khalifah bisa mendengar langsung isi kitab yang beliau tulis dari beliau sendiri, Imam Malik menjawab, “*Al-‘Ilmu yuzâr wa lâ yazûr* (Ilmu itu didatangi dan bukannya mendatangi).” (Abu al-Hasan bin Fihri, *Fadhâ’il Mâlik*).

Begitu juga sikap Imam al-Bukhari. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu al-Munir, ketika penguasa Bukhara meminta Imam al-Bukhari datang membawakan dan membacakan kitab *Al-Jâmi’* dan *At-Târikh*, beliau tidak mau datang. Beliau menjawab, “Aku tidak menghinakan ilmu dan aku tidak datang ke pintu-pintu para penguasa. Jika engkau punya keperluan kepada sesuatu maka hendaklah engkau datang di masjidku atau di rumahku.”

Seperti itulah di antara keberanian dan kebiasaan para ulama salaf dalam bersikap kepada para penguasa dan melakukan amar makruf nahi mungkar terhadap mereka. Sikap

seperti itu akan memperbaiki para penguasa dan menghindarkan umat dari kerusakan. Imam al-Ghazali di dalam kitabnya, *Ihyâ’ ‘Ulûm ad-Dîn* di akhir bab, “*Al-Amru bi al-Ma’rûf wa an-Nahyu ‘an al-Munkâr*,” setelah memaparkan kebiasaan amar makruf nahi mungkar para ulama salaf, beliau menyatakan, “Inilah dulu sirah dan kebiasaan para ulama dalam amar makruf nahi mungkar dan sedikitnya mepedulikan lantai para penguasa karena mereka bertawakal kepada karunia Allah SWT agar Allah menjaga mereka dan mereka ridha dengan keputusan Allah sehingga Dia memberi mereka rezeki kesyahidan. Karena mereka memurnikan niat kepada Allah, ucapan mereka pun berpengaruh pada hati yang keras sehingga melunakkan dan menghilangkan kekasarannya. Adapun sekarang, ketamakan telah mengikat lisan para ulama sehingga mereka diam. Jika mereka berbicara, keadaan mereka tidak membantu ucapan mereka sehingga mereka tidak berhasil. Andai mereka jujur dan memaksudkan hak ilmu niscaya mereka berhasil. Jadi rusaknya rakyat karena rusaknya para raja (penguasa). Rusaknya para raja karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama karena dikuasai cinta harta dan kedudukan. Siapa saja yang dikuasai oleh cinta harta, niscaya dia tidak mampu mengoreksi orang yang paling rendah sekalipun. Lalu bagaimana mungkin dia mampu mengoreksi para raja dan orang-orang sombong.”

Ulama seperti Imam Malik, Imam al-Bukhari dan para ulama salaf dulu itulah yang sangat dibutuhkan oleh umat saat ini. Mereka adalah ulama yang memiliki ‘*izzah* terhadap penguasa. Bukan ulama yang gemar mendatangi penguasa. Apalagi yang malah gemar menjadi stempel penguasa atas kezaliman dan penyimpangannya demi secuil dunia.

Wallâh a’lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]

HADIS YANG DITOLAK

الْحَدِيثُ الْمَرْذُودُ

Secara garis besar, hadis ada dua klasifikasi. *Pertama: Al-Hadîts al-maqbûl*, yakni hadis yang diterima, yang dijadikan dalil dan digunakan ber-*hujjah*. *Kedua: Al-Hadîts al-mardûd*, yakni hadis yang ditolak, tidak bisa dijadikan dalil dan tidak bisa digunakan untuk ber-*hujjah*.

Hadis yang diterima, yang bisa dijadikan dalil dan boleh digunakan untuk ber-*hujjah* adalah hadis shahih dan hasan. Jika tidak termasuk hadis shahih atau hasan, baik *lidzâtihi* maupun *li ghayrihi*, maka sebuah hadis dinilai sebagai hadis *mardûd* (tertolak).

Yang menjadikan suatu hadis diterima atau ditolak adalah *sanad*, perawi dan *matan*-nya. Jika dari *sanad* hadis itu tidak hilang seorang perawi yang hilangnya menyebabkan perawi yang hilang itu tidak bisa ditetapkan adil, perawinya tidak dinilai cacat, *matan*-nya tidak lemah/rusak (*rakîk*) dan tidak menyalahi sebagian al-Quran atau *as-sunnah mutawatirah* atau ijmak yang *qath'i*, maka hadis tersebut diterima dan diamalkan serta dijadikan sebagai dalil syariah, baik apakah hadis itu shahih atau hasan. Adapun jika hadis itu tidak memiliki

sifat-sifat tersebut maka hadis itu ditolak (*mardûd*) dan tidak dijadikan dalil.

Hadis *mardûd* dalam istilah para ulama disebut dengan istilah *hadîts dha'îf*. Imam Ibnu Shalah di dalam *Muqaddimah*-nya menyebutkan, setiap hadis yang di dalamnya tidak terhimpun sifat-sifat hadis shahih, tidak pula sifat-sifat hadis hasan yang telah disebutkan, maka merupakan hadis *dha'îf*. Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* juz III, setelah menyatakan definisi yang sama persis dengan definisi Imam Ibnu Shalah tersebut, beliau menjelaskan, hadis *dha'îf* itu adalah hadis yang tidak terbukti ke-*tsiqah*-an para perawinya, sebagian atau seluruhnya. Penyebabnya adalah ketidakjelasan pada keadaannya (*jahâlah fi hâlihîm*) atau noda pada dirinya tentang kejujuran dan semacam itu yang mengharuskan adanya penafian keadilan dan ke-*tsiqah*-annya.

Menurut Al-Hafizh Zainuddin al-'Iraqi dalam *At-Taqyîdh wa al-Idhâh Syarh Muqaddimah Ibni Shalah*, sifat-sifat yang tidak terpenuhi yang menjadikan hadis itu *dha'îf* ada enam sifat: (1) bersambunganya *sanad*; (2)



keadilan perawi; (3) keselamatan dari banyak keliru dan lupa; (4) datangnya hadis dari arah lain yang di dalam *sanad*-nya ada *mastûr* tetapi tidak banyak rancu; (5) keselamatan dari *syadz*, (6) keselamatan dari *'illat*.

Jika sebuah riwayat tidak memenuhi satu atau lebih sifat itu, maka ia dinilai sebagai hadis *dha'if*. Atas dasar tidak terpenuhinya sifat hadis shahih atau hasan itu maka hadis *dha'if* ada banyak bagian. Abu Hatim Ibnu Hibban al-Basti membicarakan panjang lebar tentang itu dan menyatakan ada 49 bagian hadis *dha'if*.

Menurut Ibnu Shalah, sederhananya yang menjadi patokan pembagian itu bahwa bagian yang tidak memenuhi satu sifat mulai yang pertama hingga keenam, lalu yang tidak memenuhi satu sifat bersama sifat lainnya, lalu yang tidak memenuhi tiga sifat dan seterusnya, hingga yang tidak memenuhi semua sifat itu dan ini merupakan jenis yang paling rendah. Dalam hal ini, Imam Ibnu Shalah menyatakan bahwa hadis *mawdhû'* (hadits palsu) adalah hadits *dha'if* yang paling buruk. Menurut Al-Hafizh Zainuddin al-'Iraqi, pernyataan tersebut adalah benar; bahwa jenis paling buruk dari jenis hadis *dha'if* adalah hadis *mawdhû'* (palsu). Sebab hadis itu dusta. Ini berbeda dengan yang tidak terpenuhi sifat-sifat yang telah disebutkan sebab dari kosongnya sifat itu tidak mesti hadis itu dusta.

Dengan demikian, seperti yang dinyatakan oleh Imam an-Nawawi dalam *At-Taqrîb*, ke-*dha'if*-an hadis itu berbeda-beda tingkatnya seperti halnya tingkat keshahihan hadis. Dalam *Mushthalah al-Hadîts*, ada berbagai sebutan untuk jenis hadis *dha'if* seperti *munqathi'*, *mu'allaq*, *mu'dhal*, *syâdz*, *mu'allal*, *munkar*, *mawdhû'*, *maqlûb*, *mudhtharib* dan sebagainya. Inisebagaimana dirinci dalam *Mushthalah al-Hadîts*.

Dalam hal itu, Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* (1/338-340)

menyatakan, bahwa di bawah hadis *mardûd* ada berbagai jenis hadis yang tidak keluar dari sifat-sifat berikut:

Pertama, al-mu'allaq. Ini adalah jenis hadis yang dari sanadnya gugur satu perawi atau lebih, secara berurutan sejak awal sanad; gugur secara jelas, tidak tersembunyi. Di dalamnya termasuk apa yang oleh seorang *muhaddîts* atau *al-mushannif* disembunyikan semua sanadnya. Misalnya, dia mengatakan, "Rasulullah saw. bersabda atau berbuat demikian..."

Kedua, al-mu'dhal. Ini adalah riwayat yang dari sanadnya gugur dua atau lebih perawi di satu tempat atau lebih. Di dalamnya termasuk apa yang di-*irsâl*-kan oleh *tâbi' at-tâbi'in*. Misal, ketika *tâbi' at-tâbi'in* mengatakan, "Rasulullah saw. bersabda..." atau, "Rasulullah saw. melakukan begini..." dan semacamnya. Intinya, mereka langsung menyandarkan hadis itu kepada Rasulullah saw.

Namun demikian, tidak termasuk dalam jenis ini ucapan fukaha, "Rasulullah saw. bersabda..." dan ucapan mereka, "Dari Rasulullah saw...." Sebab ucapan fukaha seperti itu bukanlah riwayat melainkan *istisyhâd* dan *istidlâl*, jadi boleh saja.

Ketiga, al-munqathi'. Ini adalah hadis yang dari riwayatnya gugur satu perawi sebelum sahabat di satu tempat, di manapun, dan jika berbilang tempat dimana pada setiap tempat hanya satu perawi yang gugur sehingga menjadi *munqathi'* pada beberapa tempat. Demikian juga termasuk *munqathi'*, hadis yang di dalamnya disebutkan perawi yang *mubham* (samar/misterius). Misalnya, di dalam sanadnya disebutkan "...*an rajul[in]* (dari seorang laki-laki)..." tanpa disebutkan siapa orang itu.

Keempat, asy-syâdz. Maknanya, seorang yang *tsiqah* meriwayatkan hadis yang menyalahi apa yang diriwayatkan oleh orang-orang yang lebih *tsiqah* dari dirinya. Tidak termasuk *syadz* hadis yang diriwayatkan oleh

 **Ta'rifat**

seorang yang *tsiqah*, yang tidak diriwayatkan oleh selain dia. Sebab apa yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* diterima walaupun tidak diriwayatkan oleh selain dia, dan boleh dijadikan *hujjah*. Jadi *asy-syâdz* hanyalah riwayat seorang *tsiqah* yang menyalahi apa yang diriwayatkan oleh orang yang lebih *tsiqah*. Artinya, *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *maqbul* yang menyalahi perawi yang lebih *râjih* darinya.

Kelima, *al-mu'allal*, yakni riwayat yang di dalamnya ada '*illat*'. Ini adalah hadis yang di dalamnya ada '*illat*' yang mencederai keshahihannya, sementara pada lahiriahnya selamat dari '*illat*'.

Keenam, *al-munkar*. Ini adalah hadis yang diriwayatkan secara *infirâd* (menyendiri) oleh perawi yang tidak *tsiqah*. Jadi *al-munkar* adalah apa yang diriwayatkan oleh perawi *dha'if* menyalahi perawi *tsiqah*.

Ketujuh, *al-mawdhû'* (palsu), yakni hadis yang dibuat-buat. Ini adalah hadis *dha'if* yang paling buruk. Sebuah hadis diketahui sebagai *mawdhû'* dengan pengakuan pembuatnya, atau yang posisinya seperti pengakuan. Kadang kepalsuan itu dipahami dari *qarînah* kondisi perawi, seperti perawi mengikuti dalam kedustaan itu keinginan sebagian pemimpin, atau jatuhnya dia dalam *isnâd*-nya, sementara dia pendusta, di mana *khobar* itu tidak diketahui kecuali dari sisinya, dan tidak ada seorang pun yang mengikutinya (tidak ada *tâbi'* satu pun) dan tidak ada *syâhid*. Kepalsuan hadis itu juga bisa dipahami dari keadaan apa yang diriwayatkan, yakni dari keadaan *matan* seperti *rikâkah* (kelemahan/kerusakan) *lafal* dan maknanya, atau karena menyalahi ayat al-Quran, as-Sunnah *mutawatir* atau ijmak yang *qath'i*.

Ketujuh jenis itu hanyalah sebagian dari jenis *hadîs mardûd*, dan masih ada jenis-jenis lainnya. Yang harus diperhatikan, sebuah hadis tidaklah ditolak hanya karena tidak memenuhi

syarat-syarat shahih. Tentu selama *sanad*-nya, para perawi dan matannya diterima. Dengan demikian, hadis itu merupakan hadis *hasan* karena para perawinya kurang dari perawi shahih atau di dalamnya ada *mastûr* atau jelek hapalannya, tetapi dikuatkan dengan *qarînah* yang me-*râjih*-kan penerimaannya, misalnya dikuatkan dengan *mutâbi'* atau *syâhid*. Jadi tidak boleh dibuat-buat dalam menolak hadis selama mungkin menerimanya sesuai ketentuan sanad, perawi dan matan. Apalagi jika hadis itu diterima oleh kebanyakan ulama dan digunakan oleh para fukaha umumnya. Ia tetap diterima meskipun tidak memenuhi syarat-syarat shahih sebab hadis itu masuk dalam hadis hasan.

Sebagaimana tidak boleh dibuat-buat dalam menolak hadis, demikian juga tidak boleh *tasâhul* (gampangan) dalam menilai hadis sehingga menerima hadis yang *mardûd* karena sanad, perawi atau matannya (Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, 1/341).

Status hadits *dha'if* tidak bisa dijadikan *hujjah* dan tidak bisa diambil sebagai dalil atas hukum syariah. Ini adalah sesuatu yang disepakati oleh jumur ulama dan fukaha.

Termasuk keliru pendapat bahwa hadis *dha'if*, jika datang dari beragam jalan yang *dha'if* bisa naik ke derajat hadis hasan atau shahih. Sebab jika ke-*dha'if*-an hadis itu karena kefasikan perawinya atau dia dituduh dusta secara riil, kemudian datang dari jalan-jalan lain yang sejenis maka justru menambah ke-*dha'if*-an di atas ke-*dha'if*-an.

Adapun jika makna yang dikandung hadis *dha'if* itu juga dikandung oleh hadis shahih atau hasan maka hadis shahih atau hasan itu yang dijadikan dalil dan digunakan sebagai *hujjah*. Adapun hadis *dha'if* itu ditinggalkan. Oleh karena itu tidak boleh berdalil dengan hadits *dha'if* sama sekali.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]



KRISIS EKONOMI TURKI

Utang Luar Negeri adalah Harga dari Berkuasanya Erdogan

Adnan Khan

Ada resepsi makan siang tanggal 14 Mei lalu di London, Recep Tayyip Erdogan berbicara kepada sekelompok bankir dan *fund manager* sebagai bagian dari perjalanan resminya ke Inggris. Selama makan siang mewah itu, dia berusaha meyakinkan para investor yang gelisah tentang stabilitas dan kelangsungan ekonomi negara itu. Namun, dalam wawancara berikutnya dengan *Bloomberg*, Erdogan dengan cepat mulai bertindak tidak terkontrol [1].

Erdogan melakukan gembor-gembor yang menentang suku bunga dan menimbulkan keraguan tentang independensi Bank Sentral. Ia pun bersumpah melakukan kontrol ekonomi yang lebih ketat jika ia memenangkan pemilihan 24 Juni. Pasar tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam waktu sepuluh hari, mata uang lira Turki jatuh ke titik terendah yang baru. Dalam perdagangan mendekati 5 lima lira untuk 1 dolar. Ini dibandingkan dengan 1,6 dolar AS pada tahun 2011. Bank Sentral Turki terpaksa menaikkan suku bunga utama dari 13,5% menjadi 16,5% karena lira Turki jatuh.

Ini adalah kerugian yang besar bagi Erdogan

yang telah membangun banyak kredibilitas domestiknya pada kinerja ekonomi yang kuat bahkan mendapatkan gelar sebagai *'Erdogonomics'* [2].

Namun demikian, krisis saat ini mengungkapkan bahwa utang luar negeri adalah harga yang harus dibayar Turki atas naiknya Erdogan ke tampuk kekuasaan. Sejak Erdogan naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2002 ia menyelaraskan dirinya dengan kelompok elit bisnis. Erdogan melakukan perjalanan ke Cina, Brasil, India, Rusia dan Benua Afrika dengan banyak pengusaha dan wanita untuk mempromosikan kepentingan bisnis Turki. Para kolega dan pendukungnya melihat seluruh sektor publik secara bertahap diprivatisasi yang sebelumnya digenggam erat oleh rezim-rezim militer. Investasi infrastruktur publik dimungkinkan tanpa membebani Departemen Keuangan, melalui metode privatisasi yang disebut *'build-manage-transfer'*. Hal ini menciptakan peluang besar bagi para kolega bisnis Erdogan dan memungkinkan banyak kelompok berpenghasilan rendah untuk menaiki tangga kemakmuran.

Erdogan menghapus persyaratan visa dari lebih 70 negara. Ia melakukan langkah-langkah yang berkontribusi pada penciptaan pasar bebas dengan negara-negara itu. Pada tahun 2013 Erdogan merayakan saat ia membayar kembali pembayaran pinjaman kepada IMF setelah berhubungan dengan lembaga itu 52 tahun[3].

Pada tahun 2014, Turki menjadi negara MINT (Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki) yang dianggap sebagai raksasa ekonomi berikutnya[4].

Berbeda dengan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi seperti Cina, yang memfokuskan ekonomi pada manufaktur dan mengekspor produk ke pasar global, atau Rusia, yang tumbuh karena permintaan global atas komoditasnya: *booming* ekonomi Turki sebagian besar karena konsumsi domestik. Kemampuan ekspor Turki memang tumbuh, terutama atas barang-barang seperti mesin cuci dan peralatan listrik lainnya. Pertumbuhannya sangat bergantung pada konsumsi dan pada sektor-sektor konstruksi yang berkembang pesat. Banyak ekspansi ekonomi Turki selama beberapa tahun terakhir merupakan hasil dari ledakan bangunan yang dibiayai oleh kredit yang mudah. Kredit itu masuk ke perusahaan-perusahaan raksasa konstruksi dan pembangunan yang kebetulan merupakan sekutu politik Erdogan. Pemerintah memberikan jaminan pinjaman negara dan alat-alat lain untuk mempermudah pinjaman[5].

Gelombang Investasi Langsung Asing (FDI) dari Jerman, Prancis dan Belanda pada banyak sektor ekonomi Turki juga memunculkan keberhasilan ekonomi negara itu.

Mata uang Turki kini telah kehilangan nilainya sebesar 60 selama lima tahun terakhir. Turun dramatis sebesar 20% pada tahun ini dibandingkan dengan dolar. Hutang luar negeri Turki telah menggelembung menjadi \$ 453

miliar. Ini lebih dari 50% dari PDB-nya. Defisit neraca berjalan saat ini, kesenjangan antara impor dan ekspor, melebar menjadi \$47,1 miliar pada tahun 2017 dibandingkan dengan \$32,6 miliar pada tahun sebelumnya.

Apa yang Salah?

Masalah Turki adalah karena utangnya bukan berasal dari sumber-sumber domestik, tetapi dari sumber-sumber asing. Utang eksternal adalah uang yang dipinjam dari luar negeri dalam mata uang asing. Mata uang Turki adalah lira. Jadi ketika meminjam dalam dolar atau euro, utang dalam mata uang asing. Utang eksternal memiliki tantangan, sedang utang dalam mata uang domestik tidak. Dalam kasus Turki, jika ia meminjam dalam lira, maka negara itu membayar bunga dan pokoknya dalam lira. Jika lira terdepresiasi terhadap mata uang lainnya, utang Turki tidak semakin sulit untuk diperbaiki. Kenyataannya, ini menjadi lebih mudah untuk diperbaiki karena ia memiliki jumlah lira yang sama, tetapi mata uangnya bernilai lebih rendah. Meningkatkan jumlah uang beredar (dengan mencetak uang) memungkinkan suatu negara untuk membayar kembali utangnya dengan mata uang yang lebih murah, dan secara efektif menggelembungkan jalan keluar dari beban utang. Meskipun mencetak uang membawa risikonya sendiri, hal itu masih membuat negara dan bank sentralnya sebagai penguasa utang mereka.

Namun, utang luar negeri tidak menawarkan fleksibilitas ini. Sebaliknya, utang ini menghubungkan kemampuan peminjam untuk membayar kembali ke nilai tukar antara lira dan mata uang asing. Ini karena utang harus dilunasi dalam mata uang asing. Jika lira terdepresiasi terhadap mata uang itu, maka akan membutuhkan lebih banyak lira untuk membayar jumlah utang yang sama. Misalnya, jika Turki meminjam \$100 juta dengan tingkat

bunga 10% dalam utang berdenominasi dolar AS, Turki akan berhutang \$10 juta pertahun. Jika nilai tukar antara lira dan dolar adalah 2 banding 1, maka Turki akan berhutang 20 juta lira pertahun. Jika lira terdepresiasi relatif terhadap dolar dan nilai tukar menjadi 4 banding 1, maka Turki masih akan berhutang \$10 juta, tetapi itu setara dengan 40 juta lira pertahun. Akibatnya, biaya pembayaran utangnya akan berlipat ganda hanya karena fluktuasi nilai tukar.

Saat ini total utang luar negeri Turki (baik publik maupun swasta) adalah sebesar 52% dari produk domestik bruto (PDB). Sebagian besar utang luar negeri Turki, sekitar 70%, dimiliki oleh sektor swasta. Keuangan negara Turki relatif tidak terbebani oleh utang. Utang Pemerintah pusat hanya sekitar 30% dari PDB.

Alasan mengapa bank-bank Turki beralih ke pinjaman luar negeri adalah karena tingkat tabungan nasional sangat rendah. Bank-bank berjuang untuk menarik deposito yang cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi. Tingkat tabungan Turki telah menurun dengan stabil sejak tahun 1990. Saat ini negara tersebut memiliki salah satu tingkat tabungan terendah di dunia. Tingkat tabungan yang rendah berarti untuk menarik lebih banyak deposito, suku bunga deposito harus tinggi. Turki memiliki suku bunga deposito yang relatif lebih tinggi terhadap tingkat rata-rata di seluruh dunia. Hal ini pada gilirannya menarik "uang panas", karena uang mencari keuntungan jangka pendek.

Konsumen tidak diperbolehkan meminjam utang dalam mata uang asing. Sebaliknya, bank bertanggung jawab atas sebagian besar utang yang diambil di sektor swasta. Mereka meminjam dari luar negeri dalam mata uang asing dan meminjamkan modal ke luar negeri dalam mata uang lira.

Erdogan telah berkuasa selama 16 tahun. Meskipun terdapat kekayaan mineral dan

perkembangan ekonomi Turki, ini semua telah dirangsang oleh pinjaman. Jenis pertumbuhan ini terus berlanjut selama investor asing percaya bahwa mereka dapat mencapai pengembalian yang lebih baik bagi uang mereka di Turki daripada di tempat lain. Ketika mereka kehilangan kepercayaan, kehilangan likuiditas berikutnya dapat menyebabkan masalah yang cukup besar. Di sinilah Turki saat ini. Inilah alasannya mengapa banyak pejabat Turki yang telah menunjuk adanya tangan-tangan asing dalam krisis mata uang. Wakil Perdana Menteri Bekir Bozdogan mengatakan di TV negara[6], "Mereka yang percaya bahwa dengan memanipulasi dolar mereka akan mengarah pada hasil yang akan merugikan negara dan kantong mereka dan mengubah hasil pemilihan, mereka keliru."

Anak menantu Erdogan, Menteri Energi Berat Albayrak, menggambarkan kemerosotan mata uang sebagai "operasi yang direncanakan secara eksternal"[7].

Hal ini dimungkinkan mengingat Erdogan telah mengecewakan banyak negara dengan ikut campurnya Turki di Suriah dan tindakan kebijakan luar negerinya di kawasan itu. Apa yang ditunjukkan ini adalah bahwa Erdogan, yang telah mensyaratkan keberhasilannya dalam bidang ekonomi, dalam kenyataannya membangun ekonominya dari pinjaman. Istana pasir sekarang saat ini mulai runtuh ketika arus dari para investor asing datang.

Catatan kaki:

- [1] <https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-05-18/a-conversation-with-recep-tayyip-erdogan-full-show-video>
- [2] <https://www.economist.com/special-report/2016/02/06/erdoganomics>
- [3] <http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-imf-debt-to-be-paid-off-foreign-debt-stock-still-on-increase-46647>
- [4] <http://www.bbc.co.uk/news/magazine-25548060>
- [5] <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-22/why-erdogan-is-flooding-turkey-s-economy-with-credit>
- [6] <https://apnews.com/4ce148cd288c444988352a3f0adddfbb>
- [7] <http://foreignpolicy.com/2018/05/25/erdogan-is-a-mad-economist-and-turkey-is-his-laboratory/>



KHILAFAH MEMBANGUN INFRASTRUKTUR

Infrastruktur adalah hal penting dalam membangun dan meratakan ekonomi sebuah negara demi kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena itu Khalifah wajib membangun infrastruktur yang baik, bagus dan merata ke pelosok negeri. Dasarnya adalah kaidah, “*Mâ lâ yatim al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib* (Suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib).

Menjadikan rakyat sejahtera wajib atas Khalifah. Kesejahteraan tidak akan muncul jika tidak terpenuhi sarana dan prasarana menuju kesejahteraan. Salah satunya adalah infrastruktur untuk memperlancar distribusi dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Karena itu adanya infrastruktur yang bagus dan merata ke seluruh pelosok negeri menjadi wajib hukumnya. Kewajiban ini harus diwujudkan oleh Khalifah.

Berbekal spirit kewajiban inilah, di dalam buku *The Great Leader of Umar bin al-Khaththab*, halaman 314 – 316, diceritakan bahwa Khalifah Umar al-Faruq menyediakan pos dana khusus dari Baitul Mal untuk mendanai infrastruktur, khususnya jalan dan semua hal ihwal yang terkait dengan sarana

dan prasarana jalan. Tentu dana ini bukan dari dana hutang. Hal ini untuk memudahkan transportasi antara berbagai kawasan Negara Islam. Khalifah Umar juga menyediakan sejumlah besar unta secara khusus mengingat kala itu unta merupakan alat transportasi yang tersedia untuk mempermudah perpindahan bagi orang yang tidak memiliki kendaraan antar berbagai Jazirah Syam dan Irak.

Selain infrastruktur jalan, Al-Faruq juga mendirikan pos (semacam rumah singgah) yang disebut sebagai *Dar ad-Daqiq*. Rumah singgah ini adalah tempat penyimpanan sawiq, kurma, anggur dan berbagai bahan makanan lain yang diperuntukkan bagi Ibnu Sabil yang kehabisan bekal dan tamu asing. Perbekalan yang layak bagi musafir serta keperluan air disediakan di jalanan di antara Makkah dan Madinah. Al-Faruq menguraikan petunjuk al-Quran yang menunjukkan bahwa pembangunan mengharuskan adanya infrastruktur yang memberikan rasa aman dan tidak membuat musafir bersusah-payah membawa minuman dan perbekalan.¹ Tentu semuanya gratis.

Khalifah Umar selanjutnya memberikan pengarahan-pengarahan kepada berbagai kabilah, pemimpin dan gubernur untuk

program tersebut. Jabir bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya menuturkan, “*Kami bersama Umar bin al-Khatthab tiba dalam umrahnya pada tahun 17 Hijrah. Petugas air yang ada di perjalanan meminta Umar agar memberikan izin untuk membangun perumahan-perumahan mereka di jalanan antara Makkah dan Madinah yang belum ada sebelumnya. Umar mengizinkan mereka dan mensyaratkan agar Ibnu Sabil dan orang tersesat lebih berhak mendapatkan air.*”²

Khalifah Umar memastikan pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk ‘*izzah* (kemuliaan) Islam. Jikalau Negara harus bekerjasama dengan pihak ketiga, haruslah kerjasama yang menguntungkan bagi umat Islam. Bukan justru masuk dalam jebakan hutang, yang menjadikan posisi Negara lemah di mata negara lain/pihak ketiga.

Khalifah Umar melalui gubernur-gubernur sangat memperhatikan perbaikan berbagai jalan tatkala membuat perjanjian antara para gubernurnya dan berbagai negeri yang berhasil ditaklukkan. Saat Nahawand ditaklukkan, para pemilik sumur di kawasan Hardzan dan Dinar datang dan meminta. Hudzaifah memberikan jaminan keamanan. Sebagai imbalannya mereka membayar upeti. Kemudian Hudzaifah menulis surat perjanjian untuk setiap pemilik sumur berisi, “*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Inilah yang diberikan oleh Hudzaifah bin Yaman untuk para pemilik sumur kawasan Dinar. Hudzaifah memberikan jaminan keamanan untuk diri, harta dan tanah mereka. Tidak boleh menyerang secara diam-diam. Mereka tidak terhalang menjalankan syariat mereka. Mereka berhak mendapatkan pembelaan selama mereka membayar upeti setiap tahunnya kepada gubernur mereka.*”³

Selain itu, mereka berkewajiban menunjukkan jalan pada Ibnu Sabil,

Khalifah Umar melalui gubernur-gubernur sangat memperhatikan perbaikan berbagai jalan tatkala membuat perjanjian antara para gubernurnya dan berbagai negeri yang berhasil ditaklukkan. Saat Nahawand ditaklukkan, para pemilik sumur di kawasan Hardzan dan Dinar datang dan meminta. Hudzaifah memberikan jaminan keamanan. Sebagai imbalannya mereka membayar upeti.

memperbaiki jalan, menjamu tentara Muslim saat melewati kawasan mereka, mengizinkan untuk singgah selama satu hari satu malam dan memberi nasihat. Bila mereka berbuat khianat dan mengubah perjanjian berarti tanggungan terbebas dari mereka. Qa’qa’ bin Amru dan Nu’aim bin Muqrin menyaksikan penulisan perjanjian dan ditulis pada bulan Muharram tahun 19 H.⁴

Ini menunjukkan bahwa kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan infrastruktur wajib menjaga ‘*izzah* kaum Muslim dan Islam. Tidak boleh bertekuk lutut dalam jebakan hutang. Apalagi tidak berdaya sama sekali atas tekanan pihak ketiga atau asing karena dana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur.

Obsesi al-Faruq sejak tahun ke-16 Hijriyah beralih ke perbaikan di berbagai daerah di Irak, membuat sungai dan memperbaiki jembatan.⁵

Saking besarnya perhatian Khalifah, Khalifah

Tarikh

sampai membuat keputusan yang mungkin saat ini bisa dianggap irasional. Bagaimana tidak? Khalifah Umar mengamalkan keputusan untuk menggali lagi sungai yang sudah tertimbun oleh tanah. Hal ini terjadi pada saat Khalifah Umar bin al-Khaththab mengetahui bahwa salah satu sungai pernah mengalir di antara Nil di dekat Benteng Babilonia hingga ke Laut Merah. Sungai itu pernah menyatukan Mesir dan hijaz serta mempermudah perdagangan. Lalu Romawi membiarkan dan menutup sungai itu. Karena itu Al-Faruq menginstruksikan Gubernur Mesir Amru bin Ash untuk menggali kembali sungai itu. Amru bin Ash pun menggali kembali sungai tersebut sehingga memudahkan jalan antara Hijaz dan Fusthath, ibukota Mesir kala itu. Aktivitas perdagangan di antara kedua lautan itu pun kembali semarak sehingga bisa membawa kesejahteraan. Di areal sungai ini terdapat berbagai tempat wisata, permadani dan tempat persinggahan yang diberi nama *Khalij Amirul Mukminin* oleh Amru.⁶

Selain itu, Khalifah Umar meminta Gubernur Mesir menyediakan jamuan makanan, tentu dengan stok melimpah dan gratis di perjalanan menuju Madinah dan Makkah. Hal itu membawa manfaat bagi penduduk haramain. Hal itu terus berlaku hingga setelah masa Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah itu para gubernur membiarkan dan meninggalkan jalanan tersebut hingga dipenuhi pasir dan akhirnya terputus dan menjadi terjal mulai dari arah padang pasir Qulzum.⁷

Amru bin Ash menggali kanal air sejauh tiga *farsakh* dari hulu hingga Basrah untuk memasok air dari daerah menuju Bashrah.⁸

Berbagai proyek tersebut direalisasikan mulai dari membuat sungai, teluk, memperbaiki jalan, membangun jembatan dan bendungan menghabiskan anggaran negara dengan jumlah besar pada masa Umar.⁹

Dengan spirit menerapkan syariah Islam,

Khalifah Umar merealisasikan pembangunan infrastruktur yang bagus dan merata di seluruh negeri Islam. Khalifah Umar membuat perencanaan keuangan dan pembangunan. Dengan itu pembangunan yang membutuhkan dana besar dapat dengan mudah dibangun tanpa melanggar syariah Islam sedikitpun (pinjam uang ribawi, dll), juga tanpa merendahkan martabat Islam dan kaum Muslim di mata pihak ketiga/asing.

Khalifah Umar merealisasikan pembangunan infrastruktur yang bagus dan merata di seluruh negeri Islam. Khalifah Umar membuat perencanaan keuangan dan pembangunan. Dengan itu pembangunan yang membutuhkan dana besar dapat dengan mudah dibangun tanpa melanggar syariah Islam sedikitpun (pinjam uang ribawi, dll), juga tanpa merendahkan martabat Islam dan kaum Muslim di mata pihak ketiga/asing.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Abu Umam]

Catatan kaki:

¹ *Ad-Daru as-Siyasy li Ash-Shafwah*, halaman: 189, 190.

² *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Mawardi, halaman 187-188

³ *Asyhar Al-Masyahir Al-Islam*, 2/342

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Al Faruq Umar, Syarqawi*, halaman 245-255

⁷ *Akhbar Umar*, halaman 127

⁸ *Ashr al-Khalifah ar-Rasyidah*. Halaman 230

⁹ *Ibid.*

AGENDA UMAT



Probolinggo. Pakar Hukum, Zulhaidir SH., dari LBH Pelita Ummat, dalam kesempatannya di sesi halqah khashoh, menyampaikan materinya tentang posisi dakwah saat marak persekusi dan kriminalisasi oleh berbagai pihak. Beliau diundang menjadi pembicara di hadapan 300 peserta yang terdiri dari kalangan ulama dan asatidz. Mereka berkumpul dalam majelis Ijtima' Ulama' Aswaja di Ponpes Kiai Sekar Al Amri, Ahad (29/7).



Probolinggo. Pernyataan sikap Forum Komunikasi Ulama Aswaja Jawa Timur mengeluarkan pernyataan sikap tentang terhadap kriminalisasi dan persekusi pada tokoh Islam pada hari Ahad [29/7] di Ponpes Kiai Sekar al Amri, Leces, Jatim.



Probolinggo. Para ulama dan asatidz se-Jawa Timur berkumpul dalam acara Ijtima' Ulama' Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang diadakan di Ponpes Kiai Sekar Al Amri, Leces, Probolinggo, ahad [29/7]. Para tokoh agama ini datang untuk memenuhi undangan acara akbar yang digagas oleh Forum Komunikasi Ulama (FKU) Aswaja Jawa Timur. Selain para ulama, turut juga para tokoh masyarakat mengikuti acara yang bertujuan menolak persekusi terhadap para ulama dan umat Islam ini.



Kedu. Sejumlah 60 kiai dan asatidz dari wilayah Kedu berkumpul di Pondok Pesantren Al Daldiri Gombong mengikuti Multaqo' Ulama yang dilaksanakan pada Ahad [5/8]. Multaqo' Ulama Diponegaran ini membahas tema "Kokohkan Perjuangan Khilafah untuk Indonesia Sejahtera Penuh Rahmat". KH Syaifuddin Al Daldiri, Pengasuh Ponpes Al Daldiri, sebagai shahibul bayt, mengingatkan para ulama untuk tetap berjuang menegakkan kalimat Allah.



Jember. PP. Bahrul Ulum, Tanggul, Jember, mengadakan acara Halal Bi Halal dan Silaturahmi, pada Rabu [18/7] dihadiri tidak kurang dari 60 peserta. Acara dibuka dengan tilawah Al-Qur'an oleh santri dan dilanjutkan dengan hadrah para santri PP. Bahrul Ulum yang melantunkan Shalawat Nabi, para peserta pun ikut melantunkannya.



Ponorogo. Dalam Mudzakah Ulama Mataraman, Jumat [20/7] di Banyuning Ponorogo, KH Anas Karim mewasiatkan kepada sekitar 100 ulama dan muballigh agar terus bicara tentang kewajiban menegakkan syariat Allah yang bernama Khilafah. Sebab, selama Khilafah belum tegak, umat Islam sedunia menanggung dosa yang sangat besar, yaitu mereka hidup di bawah hukum yang tidak diturunkan Allah SWT.



Jember. Senin [16/7], Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Ajung, Jember mengadakan Halal Bi Halal dan Silaturahmi Ulama dan Masyarakat di Kediaman KH. Abdullah. Bertempat di Pondok Tahfidzul Qur'an milik KH. Abdullah.



Mojokerto. Maraknya persekusi yang dialami sejumlah ulama, intelektual dan orang-orang yang menyuarakan kebenaran membuat sejumlah ulama Aswaja Jawa Timur bersikap. Dalam acara Jalsah Ammah Ulama dan Kiai Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Ahad [5/8] mereka membahas persoalan krusial ini. Puluhan Ulama Aswaja Jawa Timur hadir memberikan dukungan pada acara Jalsah Ammah yang digelar oleh Ulama dan Kiai Mojokerto ini.



Mojokerto. Ulama dan Kiai Mojokerto pada Senin [20/8], menyerukan umat Islam merayakan Idul Adha bersama. Sebagaimana diketahui bersama, Mahkamah Ulya Arab Saudi mengumumkan bahwa hari Ahad (12/8) telah masuk bulan baru 1 Dzulhijjah 1439 H. Dengan penetapan ini, maka Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah akan bertepatan dengan hari Senin (20/8) dan Hari Raya Idul Adha pada hari Selasa (21/8). Penetapan masuknya bulan baru tersebut, merupakan hasil pengamatan Tim Ru'yatul Hilal di beberapa tempat, seperti di As-Sudair dan As-Syaqra'.